

TITO KARNAVIAN **PENENTU PILKADA 2024**

**TANGSEL SEMUA
BISA BERKARYA**

**SUMSEL MAKIN
MAJU & MERATA**

**GANJAR SIAPKAN
SATGAS SATUKAN DATA**

**PILIH PILIH
TANGGAL CANTIK
PEMILU**

**BUMN TUTUP
ATAU BUBARKAN
KEMENTERIAN**

**KEMBALI SETELAH
19 TAHUN PERGI**

**BERLOMBA
DAMPINGI JOKOWI
3 PERIODE**



Rp75.000,-

info indonesia INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN 1 HALAMAN

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL

RP 50.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

OKTOBER

Kuartal terakhir atau triwulan keempat tahun ini pun tiba. Oktober mengawali.

Saat kondisi normal, sebelum pandemi Covid-19 mengglobal, Oktober adalah babak akhir pelaksanaan rencana tahunan. Mulai banyak proyek mengejar waktu pencapaian target, baik penyerapan anggaran maupun penyelesaian proyek serta program.

Nah, pandemi Covid-19 di Indonesia yang melanda sejak akhir Agustus 2021 rupanya langsung memicu banyak kegiatan ekonomi maupun politik ataupun campuran keduanya di dalam negeri. Cara paling mudah melihatnya adalah dengan menyimak sejumlah kebijakan pemerintah juga kegiatan kepala pemerintahan kita, Presiden Joko Widodo.

Dari sisi kebijakan, Oktober 2021 ditandai dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Untuk mudahnya, kita sebut saja UU Pajak 2021. Sudah lebih jelas sekarang bahwa UU Pajak 2021 adalah instrumen kebijakan untuk mengupayakan peningkatan penerimaan negara dari kegiatan ekonomi di dalam negeri, alih-alih lebih mengandalkan utang dalam berbagai bentuknya. Bukan hanya pajak sebenarnya.

Beberapa kebijakan lain juga menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Katakanlah rencana kenaikan cukai tembakau atau rokok. Juga kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang usaha perikanan tangkap. Rangkaian kebijakan pajak, cukai, dan PNB menyiratkan optimisme bahwa sumber daya di dalam negeri masih mampu menopang kelangsungan hidup bangsa ini. Baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Nah, relevan dengan semua itu adalah pelantikan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Riset dan inovasi adalah syarat mutlak untuk kemajuan sebuah bangsa, meskipun memerlukan biaya yang kadang sulit dihitung. Biaya bukan sekadar pengorbanan dana, melainkan juga sisi sosialnya.

Kita tidak ingin mendalami kontroversi personel Dewan Pengarah BRIN. Alih-alih menyoal itu, kita melihat perlunya mengarahkan riset dan inovasi nasional yang mendukung atau menunjang ekonomi secara keseluruhan. Katakanlah, sekadar contoh saja, riset tentang tumbuhan yang (berkembang alamiah) dan kini menjadi tanaman (budi daya) kratom, *Mitragyna speciosa*.

Kratom menurut rencana akan tergolong sebagai narkoba, sementara nilai ekonomisnya tinggi. Entah bagaimana akhirnya, yang jelas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, transaksi narkoba sepanjang 2016-2020 mencapai Rp120 triliun. Angka itu akan meningkat jika kratom tergolong narkoba. Jika bukan narkoba, mungkin seperti tembakau yang bisa dipajaki, dikenai cukai, atau PNB. Itu contoh saja untuk mengantarkan kita menuju akhir tahun. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jalan MPR III No. 5B, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (12430)
Telp / Fax : 021-278 123 97

Twitter : @infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
OKTOBER
2021



6 INFO UTAMA

Penentuan tanggal pemilu masih jadi perdebatan. Pemerintah pinginnya tanggal 15 Mei 2024. Tapi PDIP, PKS, dan Partai Demokrat satu suara menolak. Di sisi lain, posisi Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terancam apabila tak mampu memuluskan skenario pemilu.



16 INFO SUMSEL

Pemerintahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Mawardi Yahya telah berjalan tiga tahun sejak dilantik pada 1 Oktober 2018. Lewat visinya "Sumsel Maju Untuk Semua", Herman Deru, ingin menjadikan masyarakat Bumi Sriwijaya semakin sejahtera.



26 INFO DAERAH

Kesetaraan dan kesempatan untuk hidup layak, adalah keinginan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakatnya. Hal ini berlaku kepada siapa saja, terutama bagi yang mengalami disabilitas, agar bisa ikut berkarya.

86

INFO SELEBRITI

Musik dangdut jelas identik dengan Indonesia. MNCTV menyiapkan panggung lintas generasi dan aneka variasi untuk memperingati ulang tahun ke-30 stasiunnya.





54 INFO EKONOMI

Banyak yang menanti sumbangsihnya untuk Indonesia. Maklum pengusaha nasional.



64 INFO POLITIK

Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Tiga gubernur terpopuler yang memiliki peluang sama besar untuk berlaga di Pilpres 2024. Tetapi, politik itu penuh ketidakpastian dan sarat kejutan.



88 INFO KHUSUS

Mungkin banyak yang enggan mendalami Undang-Undang baru tentang Pajak. Namun, enggan atau tidak, ketentuan pajak baru ini memang ingin menjangkau lebih banyak warga untuk memenuhi kewajiban dan taat membayar pajak.

- 3 DARI REDAKSI
- 42 INFO PROFIL
- 46 INFO INOVASI
- 60 INFO LINGKUNGAN
- 68 INFO ISTANA
- 72 INFO TEKNOLOGI
- 76 INFO SPORT
- 80 INFOWISATA
- 98 KAJI



PILAH-PILIH TANGGAL CANTIK PEMILU

Penentuan tanggal pemilu masih jadi perdebatan.

Pemerintah pinginnya tanggal 15 Mei 2024. Tapi PDIP, PKS, dan Partai Demokrat satu suara menolak. Di sisi lain, posisi Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terancam apabila tak mampu memuluskan skenario pemilu.

Hajatan menggelar pemilihan umum, tak sekadar pesta demokrasi dalam beradu gagasan. Sekaligus perang modal untuk menentukan kekuatan politik dalam lima tahun ke depan. Maka wajar, skenario menentukan tanggal sangat penting.

Pasalnya, hal ini tak sekadar menentukan teknis pada saat hari pencoblosan. Sekaligus juga menjadi acuan, dalam strategi yang mau diusung setiap partai politik.

Usulan hari pencoblosan pemilu dilakukan pada 15 Mei 2024 disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Keputusan itu disampaikan setelah melakukan rapat bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Waki Presiden Maruf Amin di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2021).

"Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei (2024)," ujar Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan, pemerintah menyiapkan empat simulasi pelaksanaan pesta demokrasi 2024. Antara lain,

tanggal 24 April, 15 Mei, 6 Mei, dan 8 Mei. Namun, sesuai hasil rapat, dipilih tanggal 15 Mei.

"Ini tanggal yang dianggap paling rasional diajukan kepada KPU dan DPR. Sebelum tanggal 7 Oktober tidak bisa mundur ke berikutnya lagi, karena tahapannya harus ditentukan tanggalnya, itu keputusannya tadi," masih kata Mahfud.

Menurut dia, jika pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilu pada 15 Mei, partai politik baru sudah bisa mulai mempersiapkan diri mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Selain itu, waktu tersebut juga memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mendirikan partai baru.

"Kalau mendirikan partai baru sesudah itu, berarti kurang dari 2,5 tahun, itu dilarang oleh undang-undang," ujar dia.

Skenario memilih tanggal 15 Mei itu dibuat tidak hanya sekadar alasan yang disampaikan Menkopolhukam. Dalam rapat bersama DPR RI pada 16 September 2021, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan pemilihan tanggal pencoblosan di bulan April atau Mei karena alasan kondusivitas.

Selain memperhitungkan waktu dan biaya, Mahfud mengatakan alasan lain dipilihnya tanggal 15 Mei sebagai hari Pemilu 2024 karena memperhitungkan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.

Namun, berdasarkan kesepakatan hasil rapat konsinyering Tim Kerja Bersama, yang terdiri dari DPR, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, menyepakati pileg dan pilpres digelar pada 21 Februari 2024. Sementara pilkada pada 27 November 2024. Tapi mantan Kapolri itu tak setuju.

Tito menjelaskan seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2024, akan maju ke Juni 2022 bila pemungutan suara digelar pada 21 Februari 2024. Menu-

rutnya, hal itu merupakan konsekuensi dari aturan yang mewajibkan tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum waktu pemungutan suara.

Hal itu, katanya, berpotensi mengakibatkan suhu politik nasional dan daerah memanas dan bisa berdampak pada keamanan serta kelancaran program pembangunan, baik di tingkat pusat atau daerah.

"Hal ini dapat mengakibatkan mulai memanasnya suhu politik nasional dan daerah yang dapat berdampak pada aspek keamanan serta kelancaran pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah," ucap mantan Kapolri itu.

Soal usulan penambahan tahapan persiapan oleh KPU yang membuat tahapan Pemilu 2024 berlangsung lebih cepat, yakni Januari 2022, Tito menilai ini akan berdampak kurang kondusif bagi stabilitas politik dan keamanan.

Termasuk polarisasi di tingkat elite serta akar rumput, sehingga berpotensi menghambat kelancaran program pembangunan pusat dan daerah di tengah pandemi.

Karenanya, Tito meminta penentuan waktu pemungutan suara Pemilu 2024 diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR sebelum memasuki masa reses Dewan pada 8 Oktober. Namun, hingga memasuki masa reses, pemilihan tanggal yang cantik untuk pemilu tak kunjung ditetapkan.

Pasalnya, dalam rapat terakhir bersama DPR RI tanggal 6 Oktober 2021 lalu, Tito malah mangkir. Alasannya karena di saat bersamaan harus mengikuti rapat bersama Presiden Jokowi. Alhasil untuk menentukan tanggal pemilu baru akan dibahas lagi dalam masa sidang DPR berikutnya pada November 2021.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Saan Mustopa menyayang-

kan ketidakhadiran Tito pada rapat terakhir. Namun, dengan adanya pemunduran, memberi sedikit waktu untuk DPR meninjau kembali usulan pemerintah tanggal pemilu. Legislatif ujar dia, juga akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).

"Terutama terkait batas waktu penyelesaian sengketa," tutur Saan.

Ilham Saputra menerangkan, pihaknya saat ini masih mengkaji usulan pemerintah soal pemungutan suara, apabila pemilu digelar pada 15 Mei 2024.

"Sedang disimulasikan," kata Ilham kepada wartawan, 28 September 2021 lalu.

Dia menuturkan, salah satu solusi untuk mempercepat pemungutan suara, adalah dengan membat sistem rekapitulasi memanfaatkan teknologi

pilkada serentak," ujarnya.

Menurut dia, e-Rekap menutup kemungkinan terjadi kecurangan. Pertama kali dilaksanakan pada Pilkada Serentak Tahun 2020. Hasilnya, cukup memuaskan.

Hasil pemungutan suara yang masuk ke sistem e-Rekap mencapai 60 persen pada hari pertama. Pelanggaran yang terjadi saat pilkada terkait rekapitulasi juga tidak signifikan.



Petugas kesehatan mengangkat pemilih yang pingsan saat simulasi pemilihan kepala daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (14/9/2020). (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)

Selain tanggal pencoblosan, satu hal lagi yang menjadi polemik adalah terkait hari pemungutan suara. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan masih selisih pendapat.

Pasalnya, KPU dibawah kepemimpinan Ilham Saputra khawatir akan ada perselisihan hasil pemilu di MK yang memakan waktu semakin lama. Terlebih jika MK memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

yang disebut e-Rekap.

Dengan digitalisasi pemilu, harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, efektif, dan optimal.

"Peluang kecurangan pemilu lebih banyak terjadi bukan pada tahapan pemungutan suara atau pencoblosan surat suara, melainkan saat rekapitulasi. Ada kasus kecurangan rekapitulasi suara yang terjadi di sejumlah daerah saat

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan e-Rekap, yakni jaringan internet yang kurang memadai, terutama di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kondisi ini masih ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua.

"Pemilu Serentak Tahun 2024 akan menggunakan e-Rekap. Tentu segala kekurangan dalam pelaksanaan e-Rekap akan dibenahi, terutama terkait jaringan internet," ujarnya. •



Gedung Komisi Pemilihan Umum di Jalan Imam Bonjol.

► Koalisi Tolak Tanggal Pemilu Dari Pemerintah

PDIP, PKS, DEMOKRAT KINI KOMPAK

Dari sembilan partai yang kini menduduki DPR RI, ada tiga yang tak setuju terhadap tanggal usulan pemilu yang disorong pemerintah. Yakni PDIP, PKS, dan Partai Demokrat. Uniknya ketiga partai itu, berbeda haluan saat ini, namun sepakat dalam satu hal.

Anomali ini bukan karena keti-
ganya satu suara. Posisi PDIP
sebagai partai penguasa
yang pro pemerintah, malah
kini berbalik melawan. Sementara PKS
yang kini dipimpin oleh Akhmad Syai-
khu, sejak awal pemerintahan Jokowi
memang berada di pihak oposisi. Se-
dangkan Demokrat berada di tengah,
kadang setuju, atau malah kerap ribut
dengan dua partai di atas.

Alasan PDIP menolak tanggal pemi-
lu yang diajukan pemerintah disam-
paikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR
RI, Junimart Girsang. Kader partai ber-

logo bangteng ini beralasan, pihaknya
menolak karena apabila dilaksanakan
tanggal 15 Mei 2024, akan bertepatan
dengan ibadah puasa dan Hari Raya
Idulfitri, yang mengakibatkan tergang-
gunya masa kampanye.

Sebaliknya, Junimart berharap,
Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai
dengan ketentuan pada Undang-Un-
dang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilu, yang mengamanatkan bahwa
hari, tanggal, dan waktu pemungutan
suara ditetapkan oleh KPU.

"Fraksi PDIP sangat setuju jadwal
dari KPU, pemilu dilaksanakan pada



Petugas KPPS memeriksa kertas suara.

tanggal 21 Februari 2024. Karena terkait usulan itu, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, terkait usulan pemerintah tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sangat sulit dilakukan, dengan tenggang waktu yang sangat sempit.

Dia menjelaskan, hal itu karena perintah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 27 November 2024.

“Kita hitung-hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan pileg dan pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November. Karena kalau Mei dilakukan pemilu, lalu terjadi dua putaran, bagaimana urusan sengketa yang akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu, sementara pilkada sudah ditentukan UU dilakukan pada 27 November 2024,” katanya.

Serupa namun sedikit berbeda

dilontarkan Partai Keadilan Sejahtera. Alasan penolakan lebih karena kekawatiran dualisme kepemimpinan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyatakan, adanya

‘dua matahari kembar’ bisa mengakibatkan gejolak politik.

Sisa jabatan Presiden Joko Widodo di periode kedua habis pada Oktober 2024. Sementara, apabila pemilu di-



Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman.

gelar 15 Mei 2021, akan ada presiden terpilih dan presiden definitif. "Nah ini khawatir. Padahal saya yakin siapa pun yang terpilih jadi presiden nanti, tidak akan cawe-cawe untuk gangguin Pak Jokowi," kata Mardani dalam diskusi yang disiarkan secara daring pada 9 Oktober 2021 lalu.

Sementara itu, Mardani menilai alasan pemerintah mengusulkan agar pemilu diundur menjadi 15 Mei juga

nanti COVID-19. Kita sudah sukses melaksanakan Pilkada 2020 bahkan itu in the middle of crisis dan tidak jadi klaster COVID-19 2020. Jadi tidak terlalu kuat untuk mundur ke bulan Mei 2024," ujarnya.

Mardani justru mendukung usulan KPU terkait penyelenggaraan pemilu pada 21 Februari 2024. Menurutnya, KPU telah memperkirakan tahapan pemilu agar tidak bentrok dengan ta-

lebih meninggal, ini hajatannya super-duper ini. Karena Pemilu 2019 yang ada lima kotak suara menyatukan pil-pres dan pileg ini berat. Ditambah lagi di tahun yang sama ada Pilkada Serentak 2024, itu 34 provinsi plus 514 kabupaten/kota. Ini berat juga dan dua pekerjaan besar di tahun yang sama buat KPU ini betul-betul bukan testing the water, tapi testing the rope. Jadi kuat nggak nih talinya, kita naik nanti



Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang.

mengada-ada. Sebab, pemerintah dikatakan alasan pengundurannya karena khawatir situasi COVID-19, padahal menurut Mardani, Pilkada 2020 dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 serta tidak terlalu ada banyak klaster Corona.

"Nah, yang saya masih belum terima alasannya terlalu naif dimundurkan karena khawatir kerumunan, khawatir nanti terlalu cepat, khawatir

hapan pilkada yang awalnya dijadwalkan pada November 2024.

Selain itu, Mardani menilai opsi pemilu pada 21 Februari yang diusulkan KPU itu, dinilai juga telah mempertimbangkan pengalaman Pemilu Serentak 2019 dengan lima kotak suara, yang mengakibatkan sejumlah KPPS meninggal dunia akibat kelelahan.

"Justru opsi awal KPU itu belajar dari Pemilu 2019. Ketika tadi ada 800 orang

jatuh ambruk semua," ujarnya.

Partai Demokrat malah mengendus adanya skenario gelap pemerintah di balik polemik jadwal pemilu tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman mengatakan, bahwa seharusnya penetapan tanggal diserahkan sepenuhnya kepada KPU.

"Penyelenggara pemilu itu adalah KPU menurut UUD NRI 1945, bukan

pemerintah. Pemilu yang diselenggarakan KPU itu sekali dalam lima tahun, pemerintah menolak merevisi UU Pemilu, yang berarti UU Pemilu yang lama tetap diberlakukan. Karena UU Pemilu sudah ada, selanjutnya penyelenggara pemilu diserahkan sepenuhnya kepada KPU," kata Benny

Atas alasan itu, Benny merasa heran jika pemerintah tetap ngotot agar pemilu diselenggarakan pada 15 Mei

lah, anggota Komisi III DPR ini meminta agar pemerintah menjelaskan alasan mendasar kekeh Pemilu diselenggarakan 15 Mei 2024.

"Untuk menghindari kecurigaan yang tidak perlu, pemerintah penting menjelaskan secara terbuka kepada rakyat alasan mendasar di balik usulan untuk menetapkan pemilu pada 15 Mei 2024," ujarnya.

Kader dari partai berlogo mercy lain-

jadi perhatian publik. Di antaranya terkait ketersediaan anggaran hingga ada ratusan daerah yang akan dipimpin oleh pejabat sementara akibat pilkada serentak digelar November 2024.

"Jadi 2024 hanya pileg dan pilpres. Ini sekaligus mengatasi beberapa persoalan yang dikhawatirkan sebelumnya, terkait ketersediaan anggaran, banyaknya daerah yang kepala daer-



Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.

2024. Dia menduga ada skenario gelap pemerintah di balik tidak kunjung jelasnya jadwal Pemilu 2024.

"Pemerintah ngotot pemilu tanggal 15 Mei itu tidak jelas benar, sehingga patut dicurigai ada skenario gelap yang hendak dicapai pemerintah," ucapnya.

Benny menyebut KPU adalah penyelenggara Pemilu yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Untuk itu-

nya, juga menyarankan agar tahapan Pilkada Serentak 2024 dimajukan pada 2023. Hal itu dilakukan apabila pemerintah tetap ngotot menyelenggarakan hari pencoblosan 15 Mei.

"Pilkada serentak dimajukan pada 2023 sesuai wacana awal normalisasi pilkada," kata Kamhar, politisi Partai Demokrat.

Dengan Pilkada Serentak dimajukan, akan mengatasi persoalan yang

ahnya di Plt-kan," ujar Kamhar.

"Dan lamanya masa jabatan Plt kepala daerah. Untuk Plt kepala daerah agar dari pejabat sipil, bukan dari perwira TNI-Polri," sambung dia.

Kamhar menambahkan, mengenai jadwal pemilu, Demokrat sebetulnya tetap mendukung usulan KPU bahwa pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden dilaksanakan 21 Februari 2024. ●

TITO KARNAVIAN TANGAN KIRI JOKOWI

► Orang yang Tepat di Tempat yang Pas

Dengan memanasnya situasi politik demi mempersiapkan 2024, posisi Menteri Dalam Negeri menjadi sangat sentral. Dikarenakan ratusan jabatan kepala daerah akan mengalami kekosongan. Sehingga akan dikendalikan penuh oleh pemerintah di bawah Kemendagri dengan adanya pelaksana tugas.

Dikhawatirkan dengan posisi Plt pengganti kepala daerah, membuat oligarki lebih mudah melakukan manuver politiknya. Mengatur sistem dan pelaksanaan pemilu, sembari ber-lindung dari pemerintah.

Di sini lah peran seorang Tito Karnavian sangat penting. Sebagai mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di masa periode pertama Presiden Jokowi, dia tak hanya mampu mengoreksi pemerintah tingkat daerah, tapi juga institusi Kepolisian.

Meski sempat terjadi polemik jabatan Tito akan ditukar guling dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo. Namun, menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing

ing isu itu sengaja diembuskan oleh pihak yang menginginkan agar mendapat posisi tersebut.

"Isu itu kan diembuskan oleh pengiring opini atau opinion leader. Karena dari istana atau rezim belum pernah menyampaikan. Yang mengembuskan itu punya kepentingan politik, supaya duduk di jabatan menteri itu (Mendagri). Karena menurut saya yang melempar isu itu bukan dari pengambil keputusan," jelas dia saat diwawancarai Info Indonesia.

Emrus melihat, sejauh ini, Tito Karnavian

adalah Menteri Dalam Negeri yang melaksanakan tugasnya dengan baik.

"The right man in the right place. Karena koordinasi den-

gan kepala daerah dan kementerian-kementerian sangat baik," sambung dia.

Terutama kinerja direktorat jenderal yang berada di bawah koordinasi Tito. Sebagai contoh, dia mengapresiasi kinerja Dirjen Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang mengalami perbaikan dan mampu melakukan inovasi di tengah pandemi ini. Sehingga selaku orang kepercayaan Jokowi, dia menyatakan tak perlu mantan Kapolri itu digantikan oleh orang lain, termasuk Tjahjo Kumolo yang juga mengembangkan tugas berat sebagai Menpan-RB.

Dia menyadari peran Tito dalam beberapa tahun ke depan akan sangat sentral. Terutama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik dari tingkat pusat sampai daerah. Dengan pengalaman sebagai seorang pimpinan Polri dan juga memiliki latar belakang akademik yang mumpuni, dia percaya Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bakal terlaksana baik.

"Saya rasa dia (Tito Karnavian) sudah mengkalkulasikan variabel apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menyelenggarakan pesta demokrasi mendatang. Terlebih dia adalah seorang jenderal Polri yang sudah pengalaman mengurus pemilu," tuturnya.

Tentang polemik tanggal pemilu yang masih jadi perdebatan, dan menunggu dalam masa sidang DPR usai reses pada November mendatang, Emrus menyarankan kepada parpol untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, dia mahfum dengan keinginan parpol untuk meminta pelaksanaan hari pencoblosan dipercepat atau diundur dari yang diajukan pemerin-



tah. Hal ini berkaitan dengan skema dan waktu politik

"Parpol banyak kepentingannya, sangat banyak. Sehingga menemukan kepentingan tersebut, para politisi tidak lepas dari politik waktu. Boleh saja antarpol berbeda, karena kalkulasinya jika pemilu dipercepat atau dimundurkan dari usulan pemerintah. Karena kepentingan politik waktu sangat bervariasi dari parpol. Yang terbaik serahkan pada pemerintah," ucap dia.

Dengan sejumlah argumentasi di atas, Emrus meyakini isu tukar guling antara Tito Karnavian dan Tjahjo Kumolo seharusnya tak perlu terjadi. Apalagi melihat performa kedua menteri ini menurut dia cukup memuaskan.

PDIP Punya Kepentingan

Namun, pada pertengahan September lalu, ramai diberitakan mengenai potensi reshuffle kabinet kembali terjadi. Perombakan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju ini, salah satunya adalah mengganti Mendagri kepada Tjahjo Kumolo, dan jabatan Menpan-RB didapuk Tito Karnavian.

Pemantiknya adalah Direktur Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio. Pengamat politik dan pengajar di Universitas Paramadina ini menyampaikan, dalam diskusi virtual. Padahal dia mengaku agak sedikit bingung juga saat itu, karena performa kedua menteri itu masih sangat baik.

"Pak Tito dan Pak Tjahjo Kumolo tukeran. Pak Tito jadi PAN-RB sementara Pak Tjahjo Mendagri. Makin menarik tuh peta politiknya," ucap Hensat.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, substitusi menteri itu biasa terjadi. Terlebih perombakan menteri adalah hak prerogatif presiden. Namun, dia menganalisa ada kepentingan PDIP dibalik skenario tukar guling tersebut.

"Mungkin-mungkin saja PDIP ingin ganti Tito. Karena Tito dianggap tak menguntungkan bagi PDIP. Karena kelihatannya Tito ingin nyapres. Tapi semuanya tergantung Jokowi," singkat dia saat diminta tanggapan mengenai isu ini oleh Info Indonesia.

Motivasi lainnya yaitu, kewen-

gan Mendagri menunjuk Plt kepala daerah yang membuat PDIP ngebet kadernya duduk di kursi yang saat ini milik Tito. Alasan itu yang menurut Ujang, membuat partai yang masih diketuai oleh Megawati Soekarnoputri agak sedikit berseberangan dalam penentuan tanggal pemilu. "PDIP tentu ingin berkuasa tiga kali berturut-turut," terang dia.

Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno mengaku belum mendengar kabar

adapun jika Tito ditukar posisinya dengan Tjahjo Kumolo akan sangat berat. Meski dia tak menampik bahwa PDIP menginginkan orang kepercayaan sebagai Mendagri.

"Tidak terlalu berlebihan analisa yang menyebut bahwa PDIP menginginkan kontrol yang cukup kepada kepala Plti," ujar Ray.

Hanya saja, dia meragukan tukar guling jabatan akan terealisasi. Mengingat Presiden Jokowi lah yang meng-



soal tukar guling jabatan Mendagri dan Menpan-RB. Ia menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan ketua umum partai sepenuhnya. "Itu bukan zona diskusi kami," ujarnya kepada awak media 4 Oktober 2021.

Direktur Eksekutif Lingkaran Madani (Lima) Ray Rangkuti menerangkan,

inginkan jabatan Mendagri diisi oleh Tito Karnavian, saat pembentukan kabinet di periode kedua ini.

"Sebab kan kelihatan betul yang diinginkan Pak Presiden Jokowi jadi Mendagri ya Tito Karnavian. Beliau belum berakhir jabatan di Polri tetap diminta jadi Mendagri," tutup dia. •

REBUTAN KENDALI PENJABAT KEPALA DAERAH

Ada banyak daerah mulai tingkat provinsi sampai kabupaten terjadi kekosongan kekuasaan. Posisi gubernur, wali kota, hingga bupati menjadi rebutan partai politik, yang kendalinya kini dipegang Tito Karnavian.

Penunjukkan pengganti kepala daerah yang disebut pelaksana teknis (Plt), atau Penjabat (Pj), akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebagai nakhoda di kementerian, maka mutlak keputusannya milik Tito Karnavian seorang, berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo.

Maka wajar saja, banyak parpol ingin memegang kendali. Plt sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, memiliki kuasa penuh atas aparatur sipil negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, hingga keberlangsungan pesta demokrasi 2024. Kewenangannya sangat besar.

Bahkan, sempat muncul opsi untuk menjadikan perwira TNI dan Polri di posisi tersebut. Meski akhirnya dikritik habis-habisan oleh DPR RI dan lapisan masyarakat yang aktif di isu politik.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas menyebut aparat TNI/Polri dengan status aktif tidak bisa menjabat sebagai penjabat (Pj) kepala daerah menjelang Pilkada Serentak 2024.

Hal itu ia sampaikan merespons Kementerian Dalam Negeri yang tidak menutup

opsi Pj kepala daerah di 24 provinsi pada 2022-2024 dipilih dari golongan TNI/Polri.

"Kalau Pilkada habis, Plt itu haknya presiden melalui Mendagri, jadi terserah pak presiden, tapi kalau TNI/Polri aktif tidak bisa, tapi kalau pensiun saya kira haknya sama kan ya sipil, tapi kalau aktif tidak bisa dong," kata Zulhas.

Kandidat penjabat adalah aparatur sipil negara (ASN) pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I. Kemudian, Mendagri bisa mengajukan tiga nama calon penjabat gubernur, namun keputusan akhir tetap berada di tangan presiden.

"Itu siapa yang akan ditunjuk, memang hanya pak presiden melalui Mendagri," ujar Zulhas.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat, Anwar Hafid menerangkan, mekanisme Pj kepala daerah, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 Ayat 9-11. Pasal itu menjelaskan, gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari kalangan aparatur sipil negara.

Dalam Undang-Undang Pilkada, kata Anwar Hafid, juga diatur bagaimana mekanisme pengisian jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi

gi madya atau setara dengan eselon satu. Sementara untuk posisi bupati dan wali kota diisi pejabat pimpinan tinggi pratama atau setara dengan eselon dua.

"TNI/Polri sendiri tidak masuk dalam kategori ASN, sehingga jika mereka ditunjuk sebagai Plt kepala daerah justru nantinya dapat memunculkan atau menghidupkan kembali dwi fungsi TNI/Polri," ujarnya.

"Opsinya penunjukan Pj, juga bisa diambil dari pejabat daerah seperti sekretaris daerah yang memang sudah mengetahui dengan baik daerah bersangkutan," sambung dia.

Senada, Kepala Departemen Perubahan Sosial dan Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes berpendapat belum ada urgensi untuk menunjuk penjabat kepala daerah dari TNI dan Polri sebagai kepala daerah, meski dengan alasan keamanan. Ia menilai setiap daerah memiliki satuan keamanan, seperti kepolisian daerah atau polda dan komando daerah militer atau kodam, yang bertugas menjaga urusan pertahanan dan keamanan di wilayah bersangkutan.

Hingga saat ini juga tidak ada alasan mendesak, yang mengharuskan pemerintah memilih Pj kepala daerah dari TNI atau Polri. Terlebih urusan keamanan bukan tugas penjabat kepala daerah dan mereka juga belum memiliki pengalaman dalam urusan teknis pemerintahan.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan menerangkan bahwa opsi mengangkat perwira dari TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah baru sekadar usulan. Pihaknya, mengaku akan fokus dan memprioritaskan dari kalangan aparatur sipil negara dahulu untuk mengisi posisi tersebut.

"Kalau kita melihat aturan yang dimaksud adalah pejabat tinggi pratama dan pejabat tinggi madya itu adalah



Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan

yang dari ASN. Sementara teman-teman TNI dan Polri bukan ASN," katanya, Jumat (24/9/2021)

Seperti diketahui, penunjukkan perwira dari TNI dan Polri, menjadi Pj gubernur pernah dilakukan pada masa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Di antaranya Komjen Mochamad Iriawan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, Irjen Pol Carlo Brix Tewu menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Mayjen TNI Soedarmo sebagai Pj Gubernur Aceh.

"Memang ada pengalaman ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Pertama adalah pejabat TNI dan Polri pindah di kementerian/lembaga. Jadi sudah tidak aktif di lembaga TNI/Polri. Di Kemendagri ada mantan Dirjen Polpum Pak Sudarmo. Ada Pak Carlo Tewu dari Kemenkopolhukam," ungkapnya.

Dia mengakui di aturan memang tidak ada larangan TNI/Polri menjadi Pj Gubernur. Namun memang yang utama adalah yang berasal dari ASN. Sehingga menurutnya terkait hal ini masih bisa menjadi bahan diskusi karena memang terbuka kemungkinan itu.

"Kemendagri fokus sesuai dengan aturan dulu. Kemudian nanti mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal lain. Seperti kondisi daerah, keberlanjutan penyelenggaraan pembangunan untuk bahan pertimbangan. Tentunya ini bisa jadi bahan diskusi. Untuk tahap awal tentu sebagaimana aturan dulu. Di dalam aturan memang tidak dilarang juga. Terbuka kemungkinan itu. Meskipun aturan yang utama adalah ASN," katanya.

Di balik aturan dan pertentangan yang ada, diduga ada skenario yang lebih besar. Sebagai perpanjangan tangan, kendali Pj pun hanya mengikuti perintah dari pemerintah pusat. Namun, bukan berarti Pj atau pun Plt tak memiliki kelebihan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing menerangkan, kelemahan adanya Pj dalam jangka periode yang cukup lama adalah tidak bisa membuat keputusan strategis. Sehingga, ketika ada suatu kebutuhan mendasak, tidak mudah membuat program sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kelebihannya menurut pandangan saya, bisa melakukan tinjauan dari pekerjaan kepala daerah yang digantikan. Mewujudkan yang belum dilakukan, mengevaluasi pemerintahan yang digantikannya," terang dia.

"Karena tanggung jawab Plt atau Pj kepada pemerintah pusat dan rakyat. Jadi keberhasilan itu buka saja. Dibuka juga program dari kepala daerah yang belum selesai, jika ditemukan ada kelemahan dan penyimpangan," saran dia.

Sehingga dalam momen ini, memberikan kesempatan kepada publik, untuk meminta bukti kinerja kepada pemerintah. "Jadi jangan terlalu segan, sehingga berbasis data dan fakta," saran dia.

Namun, dia tak memungkiri kendali

RB) Tjahjo Kumolo pun terjadi.

Dia mencium gelagat partai berlogo banteng itu dari sikap penolakan tanggal pemilu 15 Mei 2024 yang diajukan pemerintah.

"Mungkin PDIP punya alasan sendiri. Atau mungkin juga, PDIP tidak punya peran atau tidak dilibatkan dalam penentuan Plt kepala daerah oleh Kemendagri. Karena isunya Plt akan digunakan untuk kepentingan pencapresan menteri tertentu," terang dia.

Selain itu, dia menduga ada skenario lainnya, mengenai Pj dan Plt kepala daerah itu daerah pemerintah. Hal itu terkait amendemen jabatan tiga periode kepala daerah. "Semua skenario mungkin saja. masih fifty-fifty," ucap dia.



Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin.

atas Pj dan Plt ini menjadi rebutan parpol. Namun, apabila hal yang seperti itu diperebutkan demi mendapatkan kekuasaan, akan membahayakan bagi demokrasi.

"Parpol harusnya bersaing dalam demokrasi gagasan ide dan program. Sehingga tidak hanya bicara kalah dan menang. Bicaralah gagasan ide dan program. Kalau kalah menang, itu aktor politik pragmatis," ujar dia.

Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin berpendapat, salah satu partai yang ngebet mendapatkan kendali adalah PDIP. Sehingga menyebabkan isu tukar guling jabatan Mendagri, Tito Karnavian dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyoroti lamanya Pj atau Plt kepala daerah, jika Pilkada serentak digelar pada 2024. Sedangkan masa jabatan kepala daerah ada yang habis pada 2022 dan 2023.

Awalnya Hendri berbicara tentang reformasi 1998, ketika rakyat telah memperjuangkan presiden hanya dua periode. Akan tetapi, kini ada kemunculan isu presiden tiga periode, supremasi sipil, serta ada isu tentang penjabat atau pelaksana tugas kepala daerah akan mengisi jabatan sementara terlama di dunia bila Pilkada 2024.

"Tapi kini Indonesia akan memiliki masa penjabat atau Plt terlama di dunia," ujar Hensat. •



► 3 tahun Herman Deru – Mawardi Yahya

SUMSEL MAKIN MAJU DAN MERATA

Pemerintahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Mawardi Yahya telah berjalan tiga tahun sejak dilantik pada 1 Oktober 2018. Lewat visinya “Sumsel Maju Untuk Semua”, Herman Deru, ingin menjadikan masyarakat Bumi Sriwijaya semakin sejahtera.

Sejak awal kepemimpinannya, pria yang disapa HD ini, menjelaskan, ada lima misi yang ingin dicapainya hingga akhir masa jabatan pada 2023.

Pertama, membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung oleh sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh, untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan diperkotaan maupun pedesaan.

Kedua, meningkatkan SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketakwaannya, kejujuran dan integritas.

Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, didukung aparatur pemerintah yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.

Keempat, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

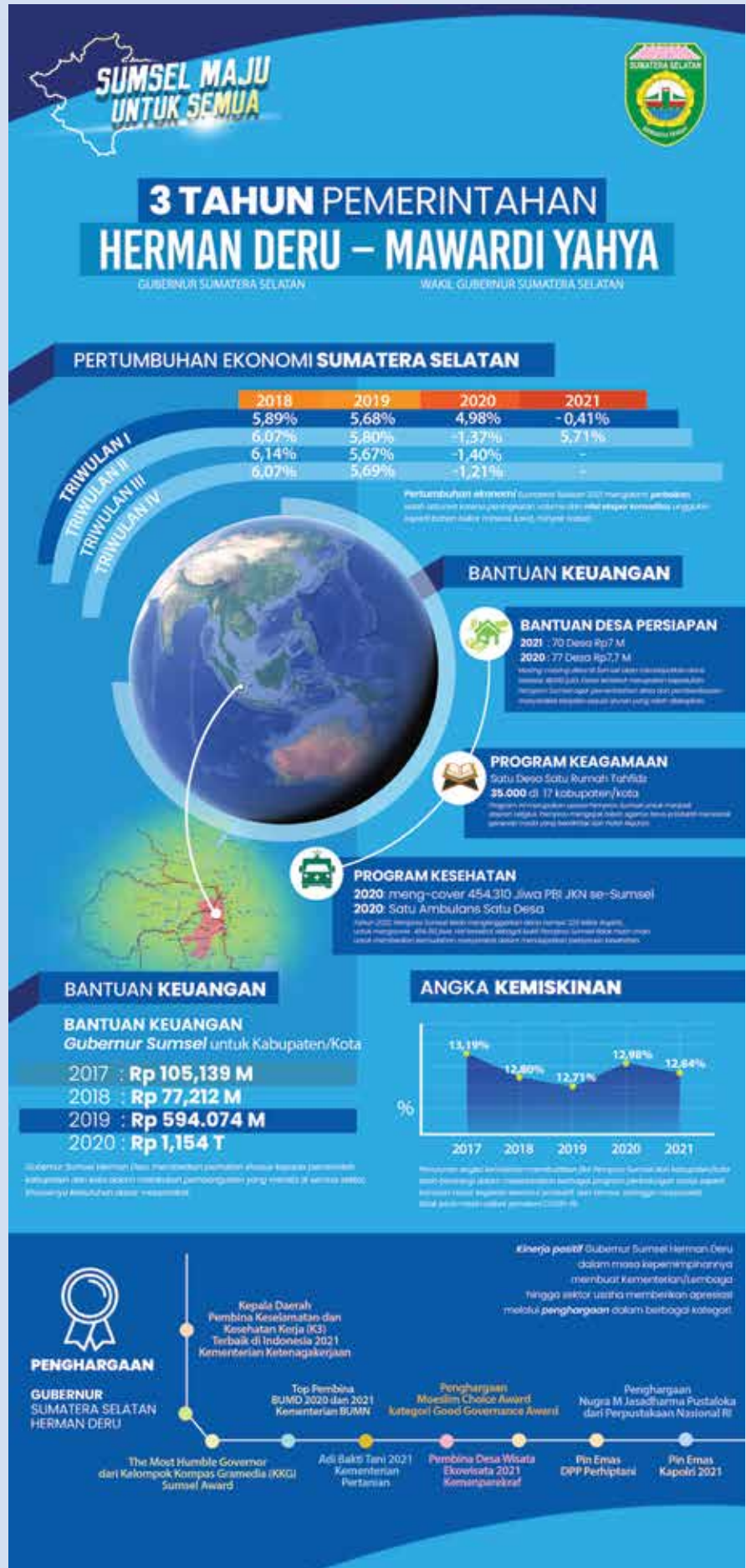
Kelima, meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, dengan ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, sedangkan pengembangan pariwisata berorientasi pada pariwisata religius.

Herman mengatakan, di tahun ketiga kepemimpinannya ini, semangatnya membangun Sumsel masih sama seperti ketika baru pertama dilantik.

"Jadi semangat itu tidak pernah surut, itu modal awal untuk kita terus bergerak membangun Sumsel," kata HD, Jumat (1/10/2021).

Sayangnya, dalam tiga tahun dia menjabat, harus dihadapkan dengan kondisi Indonesia dan dunia, yang terkena pandemi COVID-19. Bahkan, sudah berlangsung lebih dari 1,5 tahun dan belum diketahui kapan akan berakhir.

Meski begitu, HD mengatakan kewajiban pemerintah membangun infrastruktur semuanya sesuai dengan





target.

"Namun, hal itu tidak akan mengganggu semangat untuk terus melakukan pembangunan di Provinsi Sumsel ini. Kami menyelesaikan infrastruktur kewajiban provinsi, jalan, jembatan, boleh dibilang sudah dirasakan masyarakat," ujarnya.

Dalam tiga tahun kepemimpinan Herman Deru dan Mawardi Yahya, memang belum nampak pembangunan mega proyek. HD menegaskan, mega proyek yang dilakukannya sejak menjabat adalah untuk menyejahterakan masyarakat Bumi Sriwijaya.

"Jadi mega proyek itu jangan diartikan gedung yang bertingkat atau diartikan dengan sebuah konser besar, tapi artikan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu pengertian mega

proyek bagi saya," jelasnya.

Dalam mengelola anggaran daerahnya, HD menyatakan setiap tahun mengalokasikannya untuk program pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah memberikan dana bantuan keuangan untuk puluhan desa persiapan yang tersebar

di 7 kabupaten. Dana tersebut dialokasikan untuk pemberadaan masyarakat desa.

Tahun ini, pihaknya menyiapkan Rp70 miliar untuk 70 desa persiapan, di mana setiap desa mendapatkan Rp100 juta. Tahun lalu, Pemprov Sumsel memberikan bantuan Rp7,7 miliar untuk 77 desa persiapan.

HD menegaskan, Pemprov mengambil inisiatif untuk registrasi desa-desa persiapan yang diakui pada tingkat provinsi. Sembari menunggu perubahan pasal yang mengatur desa persiapan teregister di Kementerian Dalam Negeri.

"Inisiatif ini diambil langsung oleh Pemerintah Provinsi Sumsel untuk me-



nyeimbangkan, meski tidak sama dengan desa definitif. Paling tidak ini dapat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan dalam mengelola sumber daya desanya,” terang HD.

HD berharap dana yang dikucurkan Pemprov bagi desa-desa persiapan tersebut, dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan pengembangan usaha-usaha produktif yang ada desa.

Selain itu, HD juga punya program Satu Desa Satu Rumah Tahfidz. Dia mengajak masyarakat untuk terus produktif dalam mencetak generasi muda yang berakhlak, serta memiliki pemahaman dan hafal Alquran. Dengan begitu, upaya Pemprov Sumsel untuk menjadi daerah religius dapat dengan cepat terwujud.

Pemerataan Infrastruktur

Kemudian, dalam hal pembangunan infrastruktur, dia rutin memberikan anggaran melalui Bantuan Keuangan Gubernur. Pada 2019, Bankeugub yang dianggarkan sebesar Rp594 miliar atau naik cukup signifikan disbanding 2018 yang hanya Rp77,2 miliar. Sedangkan, tahun lalu, Bankeugub mencapai Rp1,154 triliun.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Supriyono, meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam secepatnya melakukan verifikasi atas pengajuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal itu disampaikan dalam pembahasan verifikasi bantuan gubernur untuk APBD Perubahan Tahun 2021, 8 Oktober lalu.

“Saya harap verifikasi dapat dilaksanakan secepatnya oleh seluruh OPD yang menerima surat terkait dana bantuan Gubernur. Senin kami sudah menerima hasil verifikasi tersebut,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar seluruh OPD dapat melakukan perhitungan yang matang, terkait dengan usulan bantuan gubernur yang diminta, baik dari segi nominal dan ketepatan waktu dalam melakukan pekerjaan tersebut.

“Jangan sampai verifikasi yang dilakukan menghasilkan pekerjaan yang tidak terselesaikan, dan dana yang dia-

jukan tidak rasional. Saya harap pada saat melakukan verifikasi perhitungan betul semua unsur tersebut jangan asal mengesahkan saja,” pungkasnya.

Supriyono menambahkan, Pemprov Sumsel menargetkan angka kemiskinan di Bumi Sriwijaya turun hingga menyentuh angka satu digit. Saat ini, tingkat kemiskinan di Sumsel menca-

dana bantuan gubernur yang bersumber dari APBN kepada pemerintah kabupaten/kota.

Namun, yang menjadi catatan bahwa usulan pemerintah kabupaten/kota itu harus memberikan efek pada penurunan kemiskinan, agar target satu digit tercapai meski di tengah pandemi.

Berdasarkan data Badan Pusat



pai 12,84 persen.

Supriyono mengatakan, Pemprov meminta dukungan dari pemerintahan kabupaten/kota untuk memprioritaskan penurunan angka kemiskinan dalam program pembangunannya.

Pemprov Sumsel juga berupaya melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah, bukan hanya bidang infrastruktur tapi menysasar juga bidang ekonomi kerakyatan.

Sejauh ini, kata dia, Gubernur Herman Deru, dalam upaya pengentasan kemiskinan itu telah mengucurkan

Statistik (BPS) Sumsel, jumlah penduduk miskin mencapai 1,11 juta orang atau masih di angka 12,84 persen dari total penduduk per Maret 2021.

Angka tersebut sebenarnya sudah menurun jika dibandingkan kondisi pada September 2020 yang mencapai 12,98 persen dari total penduduk.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mengevaluasi wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas untuk ditangani, utamanya kawasan yang masuk tingkat kemiskinan cukup tinggi. •



► Hasil Survei Populi Center

DUKUNGAN UNTUK HD DAN PEMPROV KIAN MENGUAT

Hasil survei terbaru menunjukkan masyarakat Sumatera Selatan semakin mendukung kepemimpinan Gubernur H Herman Deru dan Wakil Gubernur H Mawardi Yahya. Setelah dinamika pembangunan dan politik berlangsung selama tiga tahun pasca pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur pada 1 Oktober 2018 lalu.

Sudah tiga tahun pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh pasangan Gubernur H Herman Deru dan Wakil Gubernur H Mawardi Yahya. Banyak sudah kebijakan dan program

yang berjalan. Namun, gambaran tentang perasaan, pemikiran, dan penilaian warga Sumsel terhadap kebijakan serta gerak-langkah pemimpinnya itu belum jelas nian.

Nah, untuk memahaminya, lem-

baga penelitian non-profit Populi Center yang mendalami pendapat masyarakat (opini publik) dan kebijakan publik (pemerintahan) berusaha menemukan jawabannya melalui survei. mengenai persepsi masyarakat



Sumsel tentang dinamika pembangunan dan politik di provinsi ini. Sulit membantah survei ini menjadi penting karena untuk apa ada pemimpin jika tak bermanfaat untuk warganya, untuk apa kebijakan pemerintah jika masyarakat tak merasakan maslahatnya.

Metode penilaian melalui survei juga penting karena berlandaskan asas ilmu pengetahuan: empiris atau nyata, dan objektif atau berdasarkan fakta dan data yang dapat didalami serta diperiksa atau diverifikasi kebenarannya secara bersama-sama. Maka, Populi Center melangsungkan surveinya pada 9-15 Oktober dengan mengambil sampel sebanyak 800 orang perwakilan warga secara acak bertingkat (multistage random) dari tingkat kelurahan terpilih hingga muncul dua wakil warga di setiap rukun tetangga secara

merata (proporsional) di 17 kabupaten dan kota seluruh provinsi.

Angka 800 sampel atau perwakilan warga ini boleh jadi terkait dengan jumlah total warga Sumsel mencapai sekitar delapan juta jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2020 menunjukkan total warga Sumsel mencapai 8,5 juta lebih.

Alhasil, survei itu menunjukkan secara umum tingkat kepuasan terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur cukup tinggi, mencapai 79,9 persen warga. Menurut peneliti Populi Center Dimas Ramadhan, hasil yang sama ditemukan pada tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah provinsi, penilaian terhadap pembangunan, serta penanganan Covid-19.

"Diduga faktor-faktor kepuasan ini yang menjadi faktor yang melambungkan elektabilitas Gubernur Herman Deru dibanding dengan kandidat lain-

nya. Meski demikian, Gubernur Herman Deru masih mempunyai pekerjaan rumah, terutama agenda yang paling mendesak untuk diatasi adalah persoalan bahan pokok yang tinggi dan jumlah pengangguran," ungkapnya ketika menyampaikan hasil survei itu pada Senin, 20 Oktober 2021.

Angka kepuasan mendekati 80 persen ini tentu menunjukkan peningkatan dukungan yang berkali lipat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel setelah tiga tahun terpilih. Sekadar mengingatkan, saat terpilih, Gubernur HD dan Wagub Mawardi Yahya memperoleh 34,59 persen suara pemilih Sumsel. Jadi, dukungan terhadap HD dan Mawardi Yahya meningkat lebih dari dua kali lipat setelah tiga tahun memimpin.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Suma-

tera Selatan dari empat juta lebih pemilih di 17 kabupaten dan kota pada pemilihan Gubernur 2018 lalu mencatat pasangan nomor urut 1, Herman Deru- Mawardi Yahya mendapatkan 1.394.438 suara. Mereka mengungguli pesaing dekatnya, pasangan nomor urut 4 Dodi Reza Alex-Giri Ramanda Kiemas, yang mendapat 1.200.625 suara.

Sementara, pasangan nomor urut 2, Aswari Rivai-Irwansyah, mendapatkan 442.820 suara. Adapun pasangan nomor urut 3, Ishak Mekki-Yudha Pratomo 839.743 suara. Jumlah suara yang

sah yakni sebanyak 3.877.626 suara. Suara yang tidak sah yakni sebanyak 133.072 suara dengan total jumlah suara yakni 4.010.698.

Populi Center dalam pernyataannya mengemukakan, survei setelah tiga tahun pemerintahan HD ini berlangsung sebelum Dodi Reza Alex Noerdin, politisi Golkar dan Bupati Musi Banyuasin yang juga mengikuti Pilgub 2018 terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK. OTT KPK di Muba itu berlangsung pada Jumat, 13 Oktober 2021.

Nah, hasil lain survei Populi Center di Sumsel menunjukkan kemudian, se-

lain kepuasan hampir 80 persen warga adalah mayoritas masyarakat Sumsel puas terhadap kinerja pemerintahan Pemprov Sumsel. "Dari 800 responden yang diwawancarai, sebesar 68,0 persen mengaku puas (5,5 persen sangat puas, 62,5 persen puas) dengan kinerja Pemprov Sumsel. Sementara sebesar 18,0 persen mengaku tidak puas (17,4 persen tidak puas, 0,6 persen sangat tidak puas), sebesar 11,8 persen menyatakan biasa saja, dan sisanya sebesar 2,3 persen tidak menyatakan pendapatnya.

Selain itu, masyarakat mengakui



bahwa pembangunan infrastruktur dan perbaikan jalan merupakan prestasi paling berkesan dari pemerintahan Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya. Dalam pertanyaan terbuka mengenai prestasi paling berkesan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebanyak 15,8 persen menjawab pembangunan infrastruktur dan sebesar 12,5 persen menjawab pembangunan dan perbaikan jalan.

Masyarakat Sumsel, menurut survei yang sama, menilai positif juga pembangunan Sumsel dalam satu tahun terakhir. Tentang pembangunan di

Sumatera Selatan selama satu tahun terakhir, 74,1 persen responden menjawab mengalami kemajuan (19 persen menganggap maju pesat, 55,1 persen menganggap sedikit maju), Sedangkan sekitar 8,3 persen responden menilai belum ada kemajuan, dan sekitar 12,1 persen menilai pembangunan mengalami kemunduran (9,6 persen menilai sedikit mundur, 2,5 persen menilai banyak kemunduran).

Hasil survei lainnya, walaupun pembangunan Sumsel dirasakan maju, masyarakat secara umum merasakan penurunan penghasilan rumah tang-

ga. "Diduga penurunan ini terjadi menyeluruh, oleh sebab pandemi Covid-19," kata Dimas.

Toh masyarakat optimis terhadap penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel selama ini. Pada pertanyaan apakah yakin atau tidak yakin dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebesar 87,3 persen masyarakat mengaku yakin, sedangkan sebesar 9,6 persen mengaku tidak yakin.

Pada pertanyaan terkait dengan kinerja Pemprov Sumsel dalam menan-



gani pandemi COVID-19, sebesar 89,3 persen responden menilai baik kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani pandemi COVID-19, sementara itu sebesar 8,5 persen menjawab buruk.

peningkatan penghasilan (24,9 persen mengaku meningkat, 0,9 persen mengaku sangat meningkat).

Pada pertanyaan terkait bagaimana perasaannya terhadap kondisi/situasi kehidupannya, sekitar 48,8 persen

Survei juga menggali keinginan warga Sumsel untuk kehidupannya. Alhasil, masyarakat Sumsel mengusulkan beberapa hal penting terkait urusan yang perlu ditangani. Antara lain penurunan harga-harga bahan pokok, pengentasan pengangguran, dan penurunan biaya pendidikan dasar.

Ketika responden mendapat pertanyaan apa yang paling perlu untuk segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi Sumsel, sebesar 23,9 persen menjawab harga bahan-bahan pokok yang tinggi (23,9 persen), disusul sebesar 21 persen menjawab jumlah pengangguran, sebesar 16,5 persen menjawab biaya pendidikan dasar, dan sebesar 11,3 persen menjawab biaya/akses berobat. Sedangkan pilihan jawaban lainnya mendapat angka di bawah lima persen.

Rupanya survei juga menanyakan kepada warga, apakah setuju atau tidak setuju dengan rencana Pemprov melanjutkan pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di lahan baru. Hasilnya, sebesar 77,9 persen menyatakan setuju (7,5 persen sangat setuju, 70,4 persen setuju). Namun, sekitar 10,5 persen warga menyatakan tidak setuju (10,0 persen tidak setuju, 0,5 persen sangat tidak setuju).

Masyarakat Sumsel juga menilai buruk tingkat korupsi di wilayahnya. Ketika ditanya seberapa buruk atau tidak buruk tingkat korupsi di Sumsel, sebesar 54,3 persen menjawab buruk (42,4 persen buruk, 11,9 persen sangat buruk), sedangkan sebesar 27,5 persen menjawab tidak buruk (24,4 persen tidak buruk, 3,1 persen sangat tidak buruk).

Dari berbagai penilaian itu, survei mendalami keinginan masyarakat tentang bagaimana sebaiknya Gubernur saat mendatang. Jawabannya, sekitar 97,5 persen menjawab berpengalaman dalam memimpin, sebesar 97,4 persen menjawab taat beribadah, dan sebesar 97 persen menjawab tegas.

Sedangkan tiga kemampuan yang paling diharapkan masyarakat Sumsel dari calon gubernur meliputi, sebesar 63,6 persen menjawab mampu mengatasi masalah ekonomi, sekitar sembilan persen menjawab mampu memberantas korupsi, dan sebesar 7,6 persen menjawab mampu mem-



Namun, pada pertanyaan terkait meningkat-tidaknya penghasilan rumah tangga dibandingkan setahun lalu, kata Dimas, sebesar 49 persen responden menjawab menurun (42,1 persen mengaku menurun, 6,9 persen mengaku sangat menurun). Sementara, 25,8 persen responden mengakui

responden menjawab lebih baik (2,9 persen mengaku jauh lebih baik, 45,9 persen mengaku lebih baik). Sedangkan responden yang menjawab lebih buruk sebesar 30,1 persen (28,1 persen mengaku kehidupannya lebih buruk, 2 persen mengaku jauh lebih buruk).

berikan pelayanan publik. Untuk pilihan jawaban lainnya berada pada persentase di bawah tujuh persen.

Ketika responden ditanya calon manakah yang akan dipilih, sebesar 52,3 persen menjawab gubernur saat ini, disusul sebesar 32,5 persen menjawab calon/tokoh baru, dan sebesar 3,9 persen menjawab wakil gubernur saat ini. Sebesar 11,4 persen responden tidak menyatakan pendapatnya.

Hasil survei menunjukkan pula bahwa Herman Deru merupakan sosok paling populer. Sebesar 96,6 persen responden menjawab mengenal Herman Deru, disusul Syahrial Oesman (73,5 persen), Dodi Reza Alex Noerdin (70,5 persen), Mawardi Yahya (58,3 persen), dan Eddy Santana Putra (55,9 persen). Sedangkan popularitas tokoh lainnya berada di bawah 40 persen.

Sosok Herman Deru unggul dalam semua kategori pertanyaan akseptabilitas dibandingkan 12 tokoh lainnya, kategori tersebut meliputi bersih dari korupsi (30,5 persen), paling berani memberantas korupsi (32,1 persen), paling mampu memimpin (48,4 persen), paling membawa perbaikan (42,5 persen), paling taat beragama (34,6 persen), paling tegas (44,4 persen), paling sering diperbincangkan (43,1 persen), paling layak (46,9 persen), paling sering dibaca di koran (27,1 persen), paling sering ditonton di televisi (44,1 persen), dan paling disukai (48,8 persen).

Masih menurut survei ini, masyarakat banyak memilih Herman Deru apabila pemilihan gubernur diadakan hari ini. Dalam pertanyaan terbuka apabila pemilihan gubernur dilakukan hari ini, sebesar 41,4 persen menjawab Herman Deru, disusul Alex Noerdin (4,8 persen), Giri Ramanda Kiemas (4,0 persen), Eddy Santana Putra (2,1 persen), dan Dodi Reza Alex Noerdin (2,0 persen). Adapun nama lain memperoleh persentase di bawah dua persen.

Secara umum, survei kali ini menunjukkan Herman Deru masih menjadi sosok paling unggul dan paling berpeluang untuk menjadi kandidat Gubernur Sumatera Selatan periode mendatang. Sosok Herman Deru paling populer, unggul dalam seluruh kategori akseptabilitas, serta paling

banyak dipilih dalam pertanyaan akseptabilitas meninggalkan tokoh lain yang berpotensi menjadi pesaingnya.

Temuan menarik ada pada pertanyaan terkait partai politik. Masyarakat lebih banyak memilih Golkar sebagai

figur/kandidat masih menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan calon gubernur

mendatang. Hal ini barangkali disebabkan oleh kuatnya dinasti politik dalam peta politik di Sumatera Sela-



partai pengusung calon Gubernur mendatang, namun pada pertanyaan partai yang paling banyak dipilih, PDIP mendapatkan persentase terbesar. "Ini mengindikasikan bahwa kedekatan pemilih dengan partai tidak terlalu kuat. Pemilih lebih pragmatis dalam urusan kepartaian dan keunggulan

tan," kata Dimas.

Nah, silakan menilai hasil survei ini. Justru karena objektif ia dapat diverifikasi bersama-sama dan menjadi landasan untuk langkah selanjutnya. Termasuk dukungan hampir 80 persen warga untuk Gubernur HD dan Pemprov Sumsel. •



DI TANGSEL SEMUA BISA BERKARYA

► Memasyarakatkan Bahasa Isyarat Jadi Program Pemerintah

Kesetaraan dan kesempatan untuk hidup layak, adalah keinginan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakatnya. Hal ini berlaku kepada siapa saja, terutama bagi yang mengalami disabilitas, agar bisa ikut berkarya.

Pemkot Tangsel pun mendukung penuh program Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin). Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, salah satu program yang sedang direncanakan adalah pelaya-

nan bahasa isyarat di pusat pelayanan umum.

"Kami mendukung kesetaraan pelayanan dengan menyiapkan pelayanan dengan bahasa isyarat. Pelayanan ini dibutuhkan terutama untuk disabilitas di Tangsel," ujarnya saat hadir dalam

Musyawarah Cabang (Muscab) Gerkatin Tangerang Selatan yang digelar di Aula Blandongan Pusat Pemerintah Kota (Puspemkot) Tangsel, Minggu (17/10/2021).

Benyamin menjelaskan, dalam proses perwujudan program itu butuh sinergi-

tas antara Pemkot Tangsel dan Gerkatin. Terutama, dalam menciptakan kebijakan untuk disabilitas.

Karena itu, Benyamin mewakili Pemkot Tangsel mendukung setiap rapat atau musyawarah yang bisa diselenggarakan oleh Gerkatin. Sebab dengan begitu akan lahir kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah.

"Saya berharap dengan adanya musyawarah akan terjadi sinergitas atau komunikasi dengan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, Benyamin juga berharap bahwa dengan diselenggarakannya Muscab ini, Gerkatin terus berkembang dan terlibat dalam kemajuan Kota Tangsel. Terlebih organisasi ini dikelola oleh mereka yang mengalami disabilitas pendengaran yang telah tersebar di seluruh Tanah Air, termasuk di Tangsel.

"Saya berharap melalui Muscab, organisasi Gerkatin ini akan terus melebar sayap dan semakin sukses juga maju untuk berperan serta secara aktif dalam setiap proses pembangunan di Tangsel," katanya.

Dalam beberapa kesempatan, penggunaan bahasa isyarat di lingkungan Pemkot Tangsel sudah mulai diterapkan. Bahkan Benyamin bersama Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan telah mengkampanyekan melalui media sosial, yang juga diliput oleh sejumlah media massa nasional.

Semua itu dilakukan demi membangun Tangsel lebih inklusif, menjadi rumah bagi seluruh masyarakat. "Bahasa isyarat bentuk komunikasi yang mesti kita kuarasa, membantu para penyandang tuna rungu agar tidak mengalami kesulitan dalam komunikasi," jelas Benyamin.

Dia pun mengajak untuk seluruh masyarakat dapat menguasai jenis bahasa ini. Sebab, dengan belajar bahasa isyarat, dapat meningkatkan penggu-

naannya di seluruh Indonesia, yang jumlahnya masih sangat sedikit.

"Maru dukung perjuangan teman-teman penyandang tuna rungu untuk membangun Tangsel yang lebih inklusif," ajak Benyamin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan menjelaskan, dengan semakin banyak orang yang menggunakan bahasa isyarat, akan memudahkan dalam berkomunikasi

bagi siapa saja. Tak terkecuali bagi penyandang disabilitas.

Efeknya, tak hanya dari sosial, namun juga ekonomi dan lainnya. Sebab, hal itu akan membuat ruang seluas-luasnya untuk dapat terus berkarya. Hal itu ujarnya dapat terlihat dari salah satu kafe di sekitar kawasan Bintaro yang telah menerapkan bahasa isyarat, sebagai bahasa sehari-hari.

"Kami Pemkot Tangsel sangat meng-



apresiasi langkah untuk mengkaryakan warga dengan kebutuhan khusus bisa bekerja dan mencari nafkah sendiri. Ini merupakan contoh bagus yang patut ditiru oleh kafe, restoran, dan tempat lainnya. Agar kita semua peduli kepada sesama. Percayalah kaum difabel pun punya kemampuan yang nggak kalah hebat dengan orang pada umumnya," jelas Pilar.

Pilar pun mengaku banyak belajar bahasa isyarat dari kaum difabel. Dengan begitu, terang dia, juga terbangun empati, simpati, dan kepedulian kepada sesama masyarakat, tanpa memandang kelas. "Sehingga semua bisa ikut berkarya di Tangsel," singkat dia. •ADV

PASTIKAN EKONOMI CEPAT PULIH, MASYARAKAT TETAP TERLINDUNGI

Demi mendorong perekonomian semakin cepat pulih, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi didampingi Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan, melihat proses penggunaan aplikasi PeduliLindungi di Pasar Modern 8 Alam Sutra, Serpong, pada 30 September 2021.

Dalam kesempatan itu, keduanya memastikan perkembangan para pedagang yang sudah disuntik vaksin COVID-19. "Bagaimana kabar bu, sudah vaksin semua," tanya Mendag Lutfi kepada pedagang. "Harga bawang bagaimana naik atau menurun," tanya Lutfi lagi.

la menjelaskan, Pasar Modern Alam Sutra adalah satu dari yang pertama kali menerapkan aplikasi PeduliLindungi untuk bisa masuk ke dalam. Baik itu bagi pedagang, pengunjung ataupun pengelola.

"Ini kita bersama melihat ke pasar untuk kesiapan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, untuk keamanan dan kenyamanan berbelanja di pasar. Ini adalah salah satu pasar dari enam pasar pertama kita ujicobakan," kata Lutfi.

Dari tinjauan di pasar tersebut, Lutfi mengaku tidak menemukan hambatan berarti. Sebab, masyarakat ataupun pedagang mau secara sukarela me-

PeduliLindungi di seluruh kegiatan masyarakat.

"Kami pemerintah menyambut baik kehadiran Pak Menteri datang ke sini. Tentu saja ini sangat memberikan semangat kami warga Tangerang Selatan untuk vaksinasi agar di kantong aktivitas masyarakat seperti pasar bisa kita genjot juga," jelasnya saat berbincang dengan Info Indonesia.

Pilar mengatakan, di wilayah Kota Tangsel sudah ada dua pasar yang menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

"Alhamdulillah, sekarang di pasar Tangerang Selatan sudah ada dua pasar yang menggunakan koneksi aplikasi PeduliLindungi. Yang pertama di Pasar 8 dan kedua ada di BSD," jelasnya.

Pilar berharap, dengan program vaksinasi dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi bisa mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kota Tangsel.

"Insya Allah tidak ada klaster-klaster baru kedepannya di Tangsel. Dan kami juga berharap semua ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar pulih kembali," ujarnya.

Terlebih di sektor ritel ujar Pilar yang paling terdampak dari pandemi COVID-19. Sehingga sangat penting untuk memulihkan ekonomi, sembari melindungi masyarakat.

"Ada berbagai macam respons dan harapan dari pedagang pasar kepada Bapak Menteri dan kami pemerintah kota. Diantaranya adalah bagaimana daya beli masyarakat bisa kembali pulih," terang dia

Dari kunjungan mendampingi Mendag Lutfi, Pilar juga sempat memantau harga bahan pokok masih tetap stabil, dan tidak melonjak drastis. Sehingga dia mengaku cukup tenang.

"Kami mengucapkan terimakasih atas kunjungan Bapak Menteri, semoga bisa memberi semangat tersendiri bagi pemerintah kota dalam mendorong pemulihan ekonomi daerah," harap dia. •ADV



Adapun, Lutfi menjelaskan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39/2021 yang terbit pada Senin (20/9/2021), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Tangsel berada pada Level 3 hingga 4 Oktober 2021. Sehingga sangat penting menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Terutama di kawasan yang merupakan pusat aktivitas masyarakat.

Saat memasuki pasar, Lutfi langsung mengeluarkan smartphone untuk membuka aplikasi PeduliLindungi serta scan QR code dan ukur suhu tubuh.

lakukan scan QR code untuk memasuki area pasar.

Setelah berhasil di enam pasar, rencananya Kemendag akan menambah 14 pasar lagi. Barulah kemudian akan diterapkan di seluruh pasar yang ada di Indonesia

"Pasar ini kita gunakan PeduliLindungi yakni untuk kenyamanan bersama, dan para pengunjung bisa kembali datang untuk berbelanja," jelas Lutfi.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, akan terus memantau warganya untuk vaksinasi COVID-19 dan menggunakan aplikasi



► Raih Opini WTP Lima Kali Berturut-turut

MODAL UNTUK TERUS BERINOVASI DAN BERKEMBANG

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang disampaikan secara virtual pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021, Selasa (12/10/2021).

Untuk kelima kalinya secara berturut-turut Pemkot Tangsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian ini didapat melalui hasil dari Laporan Keuangan Tahun 2020. Penyerahan penghargaan secara langsung diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tangerang yang mewakili Kementerian Keuangan kepada Wali kota Tangsel, Benyamin Davnie di Puspemkot Tangsel.

Wali Kota Benyamin Davnie, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemkot Tangsel, yang telah bekerja sama untuk mematuhi aturan, dan ketentuan. Sehingga Pemkot Tangsel mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan.

"Harapan saya, kedepan kita akan semakin solid dan terus mengem-

bangkan inovasi pelayanan publik, dengan menempatkan prioritas pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul ditopang dengan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik," harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tangsel, Warman Syahnuhin, penghargaan ini merupakan penghargaan kedua Pemkot Tangsel atas pelayanan di bidang keuangan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan melalui KPPN Tangerang.

"Jadi penghargaan ini diberikan atas capaian bahwa pengelolaan keuangan sudah menyesuaikan aturan yang diberikan oleh pemerintah," ujar Warman yang menambahkan bahwa pengelolaan keuangan di Kota Tangsel ini sudah sesuai dengan aturan Kemendagri dan Kemenkeu.

Selain apresiasi terhadap pengelolaan keuangan, Tangsel juga dipastikan mendapatkan predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD). Pada kesempatan ini, apresiasinya juga diberikan kepada Pemerintah Kota Tangsel.

"Itu merupakan apresiasi kepada kami semua, terhadap tanggung jawab penggunaan anggaran," ujar Warman.

Dengan adanya penghargaan ini, Warman berharap bahwa seluruh OPD dan pemangku kepentingan bisa dengan mempertahankan prestasi. Begitu juga melahirkan inovasi-inovasi yang mampu mempermudah pelaporan keuangan.

Sementara mewakili Kementerian Keuangan, Kepala KPPN Tangerang I Wayan Supatra menjelaskan alasan Tangsel menjadi salah satu daerah yang mendapatkan penghargaan ini. Yaitu transparansi penggunaan anggaran.

Tangsel sudah menerapkan teknologi terhadap pengelolaan keuangan. "Digitalisasi sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena itu kami mengapresiasi," ujar Wayan pada saat memberikan penghargaan tersebut.

Dia menambahkan bahwa dengan digitalisasi pengelolaan keuangan, maka pekerjaan akan semakin mudah dan laporan juga akan lebih baik.

● ADV



Wakil Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie.

► Pelan-pelan Keluar Dari Pandemi

TENAGA KESEHATAN BISA BERNAPAS, TAPI TETAP WASPADA

Tingkat penularan COVID-19 di Kota Tangerang Selatan perlahan menurun. Rumah Lawan COVID-19 sebagai pusat perawatan intensif pasien Corona pun pada pertengahan Oktober sudah nihil pasien.

Tenaga kesehatan di sana bisa bernapas lega.

Kepala Rumah Lawan COVID-19, Suhara Manullang menjelaskan, kondisi itu terjadi seiring dengan tren kasus yang mulai membaik. Kondisi ini sedikit membuat beban kerja para tenaga kesehatan yang bertugas selama hampir dua tahun terakhir lebih ringan dari sebelumnya.

Namun, dia memastikan bahwa Rumah Lawan COVID-19 tetap bersiaga

untuk menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus. Sebab, pandemi belum berakhir. "Jadi tetap, yang akan diutamakan adalah zona dua untuk menerima pasien. Sementara untuk zona satu, itu kan ada beberapa sarana yang sedikit harus diperbaiki, terutama aula," ungkap Suhara.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan pun memastikan bahwa mereka belum akan menutup pusat karantina Rumah

Lawan COVID-19 meski tak lagi dihuni oleh pasien terkonfirmasi positif. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie mengatakan, Rumah Lawan COVID-19 akan tetap disiagakan untuk penanganan pasien positif tanpa gejala maupun bergejala ringan.

"RLC tetap kami siagakan sebagai tempat penanganan covid. Walaupun sudah kosong tapi tetap kami siagakan," ujar Benyamin, Selasa (19/10/2021).

Menurut dia, penanganan pasien COVID-19 di pusat karantina itu akan difokuskan di zona dua Rumah Lawan COVID-19 yang memiliki kapasitas sekitar 150 tempat tidur. Sementara gedung utama di zona satu Rumah Lawan COVID-19, kata Benyamin, akan dilakukan perbaikan sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan setelah beroperasi hampir dua tahun terakhir.

"Memang konsentrasinya akan lebih ke RLC Zona dua kapasitasnya 150 tempat tidur. Itu tetap kami siagakan," tegas dia.

Dibuka Pelan-pelan

Meski pemerintah pusat telah menetapkan Tangerang Selatan masuk ke dalam level dua, namun, pemerintah kota tak mau terburu-buru membuka semua aktivitas masyarakat. Paling utama adalah kegiatan bisnis, yang nyaris bangkrut selama pandemi. Hal ini dilakukan demi mencegah lonjakan yang signifikan dalam sekejap.

Namun, untuk membuka sejumlah tempat hiburan atau bisnis, terang Benyamin perlu dilakukan kajian khusus dengan sangat berhati-hati. "Harus ada fakta integritas dulu dengan Satgas COVID-19," terang dia.

Sebagai contoh adalah permintaan untuk dibuka kembali tempat hiburan karaoke dan spa. Pemkot Tangsel ujar Benyamin, tak mau tergesa-gesa memberi izin, namun di kemudian hari malah menjadi klaster penularan COVID-19/

"Kalau umpamanya memenuhi standar nggak apa-apa. Tapi kalau tidak memenuhi, ya nggak kita izinkan. Peluang buka itu ada, tapi saya hati-hati saja," jelas dia.

Selain mempertimbangkan sejumlah aspek dengan penuh kehati-hatian untuk membuka tempat usaha atau bisnis, Pemkot Tangsel juga terus berupaya mengencangkan vaksinasi. Terutama kepada anak-anak berusia 12-17 tahun.

Hal ini dilakukan demi mempercepat proses belajar-mengajar yang mengalami learning loss, akibat pandemi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar menjelaskan, hingga 17 Oktober 2021, sudah ada 36.862 anak yang telah

mendapatkan dosis vaksin pertama. Sedangkan yang telah mendapat vaksin dosis lengkap sebanyak 31.395 anak.

Jumlah anak yang telah menerima dosis kedua itu setara dengan 24,1

pukul 16.30 WIB," kata Allin dalam keterangannya.

Allin menambahkan, tersisa 93.613 anak berusia 12-17 tahun di Tangsel yang sama sekali belum menjalani vaksinasi Covid-19 dari target. "Target



Rumah Lawan COVID-19.



Kepala Rumah Lawan COVID-19, Suhara Manullang.

persen dari total target 130.475 peserta vaksinasi anak di Tangsel yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Banten.

"Yang sudah masuk (penyuntikan) dosis kedua kedua 24,1 persen atau 31.395 orang hingga 16 Oktober 2021

remaja atau anak usia 12-17 tahun sebanyak 130.475 jiwa," kata Allin.

Saat ini, Pemerintah Kota Tangsel sedang berupaya mempercepat vaksinasi COVID-19 agar kekebalan komunal bisa segera terbentuk, dan pandemi bisa semakin terkendali. •ADV



GANJAR SIAPKAN SATGAS SATUKAN DATA

► Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah

Pemerintah tengah memacu program untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Tanah Air yang saat ini jumlahnya mencapai 10,86 juta jiwa. Tidak tanggung-tanggung, hingga 2024 mendatang, pemerintah ingin membuat kemiskinan ekstrem hingga nol persen.

Wakil Presiden Maruf Amin, sebagai ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), menyebut, salah satu daerah di Indonesia yang harus segera melakukan penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah Jawa Tengah.

Ada lima daerah di Jateng yang masuk dalam catatan miskin ekstrem. Yakni Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa atau 6,83 persen, Kabupaten Pe-

malang 124.270 jiwa atau 9,52 persen, Kabupaten Brebes sebanyak 197.520 jiwa atau 10,34 persen, Kabupaten Kebumen sebanyak 92.190 jiwa atau 7,68 persen, dan Kabupaten Banjarnegara sebanyak 67.010 jiwa atau 7,23 persen.

Wapres menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperbaiki data warga dengan kondisi miskin ekstrem.

"Target kita 2024 sudah nol persen di seluruh Indonesia sesuai arahan Presiden. Kami berkoordinasi dengan

5 kabupaten di Jateng yang menjadi target 2021 ini, agar lima kabupaten itu tidak ada lagi kemiskinan ekstrem," kata Wapres Maruf di Kota Semarang, Kamis (7/10/2021).

Maruf meminta Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan kelima bupati untuk terus memperbarui data dan informasi masyarakat penerima bantuan. Termasuk tambahan Bantuan Sosial Tunai dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

"Sehingga upaya kita untuk dapat membantu percepatan pengentasan

kemiskinan ekstrem tahun 2021 di lima kabupaten prioritas tersebut bisa diwujudkan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah untuk aktif memberdayakan masyarakat di lima kabupaten dalam bidang UMKM. Hal itu bertujuan untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

“Ada dua pendekatan dengan perlindungan sosial, yaitu bansos dan pemberdayaan berupa pengembangan UMKM. Tambah lagi nanti dari CSR, filantropi, Baznas. Bisa selesai di lima kabupaten di Jateng,” kata Maruf.

Meski begitu, Wapres Maruf optimis penanggulangan kemiskinan ekstrem pada lima kabupaten di Jateng, segera tercapai akhir 2021 mendatang. Apalagi, potensi UMKM di daerah tersebut cukup bagus.

“Saya melihat beberapa produk UMKM, karena UMKM ini merupakan salah satu daripada upaya kita untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar Maruf.

“Saya lihat beberapa kabupaten yang hari ini kita jadikan sasaran kemiskinan, banyak produknya yang sudah bagus, bahkan sudah diekspor. Dan potensi ini ingin kita terus kembangkan, sehingga proses kemiskinan secara menyeluruh segera dapat diatasi,” katanya.

Maruf mengatakan, setidaknya ada 212 Kabupaten di seluruh Indonesia yang menjadi target penanggulangan kemiskinan ekstrem hingga 2024. Percepatan dilakukan mulai tahun ini, dengan target sasaran 35 Kabupaten di tujuh provinsi.

Wapres memaparkan, program pengurangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah terbagi dalam dua kelompok. Yaitu kelompok program menurunkan beban pengeluaran rumah tangga miskin. Anggarannya mencapai Rp272,12 triliun untuk subsidi dan bantuan sosial. Kelompok program kedua adalah peningkatan produktivitas masyarakat miskin dengan anggaran mencapai Rp168,57 triliun.

“Tantangan terbesar adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menysasar sasaran yang sama,”

jelasnya.

Mantai Ketua MUI ini, meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemda mengidentifikasi program pengentasan kemiskinan. Lalu memastikan rumah tangga kemiskinan ekstrem menerima manfaat seluruh program itu.

Kuncinya Pada Data

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan siap menjalankan instruksi yang diberikan Wapres Maruf dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Dia mengatakan akan menyiapkan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar sinkron dengan pusat, sehingga bantuan bisa tepat sasaran.



“Saya minta pemda untuk menghitung dari desil satu di lima kabupaten prioritas itu untuk dipetakan. Setiap nama, alamatnya di mana, kondisi hari ini seperti apa, dan bantuan yang sudah didapat seperti apa. Kalau kemudian kita mau aksi untuk tiga bulan ke depan, penyelamatan apa yang mesti dilakukan kepada mereka agar terentaskan dengan cepat,” terang Ganjar.

Untuk itu, Ganjar langsung mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem dengan membentuk satuan tugas gas khusus percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem langsung. Satgas tersebut akan diketuai Sekretaris Daerah

Jateng, Sumarno.

“Satgas ini kami bentuk untuk mempercepat, kan ini waktunya pendek, hanya sampai Desember harus selesai. Saya rasa kita perlu tim khusus atau satgas untuk bisa melakukan percepatan. Saya khawatir ada beberapa kabupaten yang tidak siap, maka kita harus bantu mereka,” kata Ganjar usai rapat penanggulangan kemiskinan ekstrem di kantornya, Jumat (8/10/2021).

Ganjar menjelaskan, tugas Satgas yang paling penting adalah verifikasi dan validasi data. Sebab, dari data yang sudah ada, tercatat 27 ribu lebih masyarakat miskin ekstrem yang ada di 5 daerah itu. Setelah verval selesai, maka tindakan lanjutan adalah inter-

vensi.

“Verval ini kuncinya, agar tidak ke-liru. Sebab kita punya contohnya, ada orang di Banyumas, dia masuk desil satu. Tapi semuanya ada, air minum ledeng, sumur terlindungi, listrik sudah PLN, fasilitas BAB sudah punya, tinja sudah ada tangki, RTLH tidak prioritas. Tapi kenapa masih masuk data? Nah, yang begini-begini ini harus diselesaikan,” tegasnya.

Secara keseluruhan, lanjut Ganjar, angka kemiskinan ekstrem di Jateng masih ada sekitar 1,5 juta orang. Namun, itu berasal dari berbagai daerah. Dan untuk percepatan kali ini, hanya lima kabupaten yang menjadi prioritas

pusat agar diselesaikan hingga akhir Desember tahun ini.

"Tapi saya ingatkan, bahwa penanganan harus paralel. Sekarang kan sedang menyusun RAPBD 2022, saya minta itu dimasukkan agar berlanjut. Sehingga, desil satu bisa diselesaikan maksimal sampai akhir 2022," tegasnya.

Pemprov Jateng juga akan menggunakan strategi graduasi mandiri ekono-

mi. Pihaknya menargetkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jateng dapat selesai dalam dua tahun.

"Yang penting mereka ada pemasukan pendapatan, sehingga dengan penghasilan mereka di atas Rp500 ribu, mereka sudah lepas dari garis kemiskinan, berdasarkan hitungan kami dengan peningkatan pendapatan bisa terlihat di dua tahun," ujarnya.

Terkait dengan strategi graduasi

mana menangani (kemiskinan ekstrem) di lima kabupaten, di bawahnya ada kecamatan, diturunannya ada desa, kami tadi mendorong OPD yang memiliki desa dampingan di lima kabupaten tersebut. Utamanya untuk penanganan anak yatim piatu, yatim, piatu, di kawasan tersebut untuk diprioritaskan," kata pria yang akrab disapa Gus Yasin ini.

Dia mengatakan, jajarannya hingga



mi untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah.

"Kami pakai strategi graduasi ekonomi mandiri, jadi kami melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sinergi program lintas sektoral secara berkelanjutan," kata Kepala Dinas Sosial Jateng, Harso Susilo.

Menurut dia, dengan cara itu, pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah prioritas dilakukan dengan mengubah pola pikir keluarga penerima manfaat (KPM). Pihak yang selama ini menerima bansos dan lainnya dilatih keterampilan tangan hingga wirausa-

mandiri ekonomi itu, Ganjar Pranowo meminta agar segera diterapkan di lima daerah prioritas yang disorot pemerintah pusat. Sehingga target menanggulangi kemiskinan ekstrem dapat selesai dalam tiga bulan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meminta penanganan anak yatim piatu di kabupaten dengan kemiskinan ekstrem lebih diutamakan. Dia mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendampingi desa untuk pengentasan kemiskinan di Jateng turut terlibat.

"Karena instruksinya adalah bagai-

saat ini sudah melakukan assesment kebutuhan bagi anak yatim piatu korban COVID-19 di Jawa Tengah. Menurutnya, Pemprov Jateng akan segera melakukan langkah terkait penanganan anak yatim piatu sesuai dengan kebutuhan mereka.

"Misalnya pendidikan, bagaimana keberlangsungan hidup mereka, siapa yang mengasuh. Itu kita assesment semuanya," katanya.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jawa Tengah, Imam Maskur, mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan data anak yatim piatu

yang tinggal di Desa Dampingan OPD Jateng.

Imam menjelaskan, sampai saat ini ada sebanyak 81 Desa Dampingan di Jawa Tengah yang diketahui terdapat anak yatim, piatu, dan yatim piatu. "Kami akan koordinasi hingga sebulan ke depan terkait progres penanganan dari masing-masing OPD," ujarnya.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Pemprov Jateng sebelumnya sudah membuat beberapa program dan inovasi. Salah satunya adalah Desa Dampingan, Satu OPD Satu Desa.

"Ini Pak Wagub sudah melakukan evaluasi untuk tiap OPD yang mendampingi desa miskin. Rasa-rasanya hasilnya ada, tapi belum menggembirakan, karena ada COVID-19. Jadi, ke depan gerakannya perlu dilebarkan," terangnya.

Ganjar meminta OPD bisa menjembatani kerja sama pihak lain, seperti BUMN, BUMD, perguruan tinggi, dan perusahaan, untuk turut membantu dalam penanganan kemiskinan.

"Untuk Dinsos menyiapkan data paling valid, komunikasi dengan Mensos kalau perlu sampai wapres. Dan prioritaskan mereka (desa) yang berada di paling bawah," tegasnya.

Pemprov Jateng juga meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan (Silap) Corporate Social Responsibility (CSR), pada 2 Maret 2021. Silap CSR dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelaporan program atau kegiatan dan rencana pelaksanaan program CSR perusahaan, BUMN dan BUMD.

Gus Yasin menuturkan, pandemi COVID-19 menjadi kendala utama program pendampingan desa oleh OPD sejak tahun lalu.

"Sebenarnya sudah ada penurunan (jumlah desa miskin), tapi karena pandemi COVID-19, ada kenaikan dari 750 menjadi 764 desa, karena kondisinya seperti ini. Jadi, kita benar-benar assesment lagi," ujar politikus PPP ini.

Pihaknya berkomitmen akan menggenjot untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Selain pendampingan Satu OPD Satu Desa, juga melalui Silap-CSR yang telah diluncurkan.

"Jadi aplikasi ini untuk memudah-

kan kita mengarahkan CSR dalam membantu penanganan kemiskinan di Jawa Tengah. Bukan mengambil, tapi mengarahkan ada berapa nominal dan akan diarahkan ke bidang apa," jelasnya.

Pemkab Harus Bijak

Masuknya Kabupaten Banyumas sebagai salah satu daerah di Jateng dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi, disikapi dengan bijak oleh Bupati Achmad Husein. Dia menyebut hal itu sebagai wujud perhatian khusus dari pemerintah pusat.



Masuknya Banyumas menjadi salah satu daerah dengan kemiskinan ekstrem salah satu faktornya karena kondisi geografis Banyumas yang luas.

Namun, kondisi kemiskinan itu bukan menunjukkan tidak ada perkembangan penurunan kasus di Banyumas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kasus kemiskinan di Banyumas tahun 2013 sebanyak 18,44 persen, kemudin 2020 turun menjadi 12,53 persen.

Adanya pandemi COVID-19 memiliki dampak yang cukup besar, di mana terdapat penambahan 14 ribu penduduk miskin baru di Banyumas. Sehingga, angka kemiskinan di akhir 2020 kembali naik menjadi 13,26 persen.

Pemkab Banyumas berencana menggunakan anggaran Belanja

Tidak Terduga (BTT) di APBD Perubahan 2021 mencapai Rp84 miliar untuk mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsosperma-des) Banyumas, Widarso, mengatakan, ada keinginan mengambil dana BTT. Namun, bentuknya seperti apa masih melakukan koordinasi dengan pusat dan juga BPS. Menurutnya, mengatasi kemiskinan ekstrem yang paling mungkin digunakan adalah BTT karena penanganan tersebut bersifat tidak terduga.

"Tidak mungkin selain BTT. Bulan ini akan kita bahas kebutuhannya berapa," jelasnya, Rabu (14/10/2021).

Pembahasan tersebut untuk mempertimbangan jenis penanganan apa yang akan digunakan. Jika berupa bantuan, maka bantuan apa yang akan diberikan.

"Jika kaitannya dengan infrastruktur, maka nanti bisa RTLH. Jika nanti ternyata soal pemenuhan gizi, maka berupa sembako bantuannya," paparnya.

Terkait bantuan, pihaknya menegaskan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap II tahun ini tidak akan ada. Saat ini, pihaknya fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem.

"Tren pandemi juga mulai membaik. Orang-orang sudah bisa bekerja kembali seperti semula," terangnya. ●



Suasana pembukaan STQ Nasional XXVI 2021 di Masjid Raya Sofifi. Provinsi Maluku Utara, Sabtu (16/10/2021) malam. (ANTARA/Ikhwan Wahyudi)

MERDUNYA LANTUNAN AYAT SUCI DARI SOFIFI

Alunan ayat suci Al Quran yang dibacakan Said Agil Husin Al Munawar membuat hadirin yang memenuhi halaman Masjid Raya Shaful Khairaat di Sofifi, Provinsi Maluku Utara (Malut) pada Sabtu (16/10/2021) malam terkesima.

Membacakan Surat Al Hasyr ayat 21 di panggung utama, Ketua Dewan Hakim Seleksi Tilawatil Quran Nasional XXVI 2021 itu tampil memukau

bersama Abdul Aziz pada malam pembukaan.

Lantunan ayat suci itu kian paripurna, dengan latar kemegahan Masjid Raya Sofifi yang baru saja selesai di bangun

dengan latar cahaya lampu kebiruan. Memiliki dua menara yang tinggi dan gagah di sisi kiri dan kanan serta lafaz Allah dan Muhammad dalam bahasa Arab dengan kubah di tengah, Masjid



Raya Sofifi menjadi salah satu ikon baru di bumi Maluku Kie Raha.

Siapa yang menyangka Sofifi sebuah desa di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara dan ditetapkan sebagai ibu kota provinsi kini menjadi tuan rumah pelaksanaan STQ Nasional XXVI 2021 yang berlangsung pada 16-24 Oktober 2021 diikuti seluruh peserta dari seluruh Tanah Air.

Sebanyak 589 peserta dari 34 provinsi di Tanah Air berlaga pada empat cabang dan 10 golongan.

Cabang yang diperlombakan antara lain tilawah terdiri atas golongan dewasa putra putri dan anak-anak putra putri.

Kemudian, cabang tahfidz lima golongan yaitu tahfidz 1 juz, 5 juz, 10 juz dan 30 juz masing-masing putra putri. Lalu,

cabang tafsir bahasa Arab putra putri dan cabang hadist terdiri atas dua golongan 100 hadist pakai sanad dan 500 hadist tanpa sanad putra putri.

Sebagai sebuah kelurahan yang masih baru, jelas tidak ada hotel untuk menginap. Panitia pelaksana pun memutuskan menginap peserta di perumahan aparat sipil negara (ASN) yang baru dibangun. Untuk menuju Sofifi dari Jakarta bisa menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh empat jam dan mendarat di Bandara Sultan Babullah Kota Ternate.

Perjuangan para qori dan qoriah belum selesai, guna menuju lokasi perlombaan harus menaiki kapal cepat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate menuju Sofifi dengan waktu tempuh sekitar 45

menit. Dari dermaga pemda menempuh perjalanan darat sekitar empat kilometer menuju lokasi acara di Jalan Bahar Andili di pusat kota.

Untuk pelaksanaan lomba dipusatkan di sejumlah fasilitas perkantoran Pemprov Maluku Utara di Jalan yaitu Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara, Aula DPRD, Aula Dikbud, Aula PUPR hingga Masjid Raya.

Semangat Al Quran

Pada mulanya, Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba sempat merasa ragu untuk menawarkan Sofifi sebagai tuan rumah pelaksanaan STQ Nasional XXVI. Sebagai gubernur ia merasa tidak pantas menyelenggarakan event tersebut karena selama ini pelaksanaan STQ

Nasional dilaksanakan di tempat yang punya fasilitas amat memadai.

"Di Sofifi ini tidak ada hotel, dan tidak ada fasilitas yang bisa dibanggakan, orang bertanya apa mungkin bisa digelar di sebuah kota kecil yang pada awalnya adalah desa," kata dia.

Akan tetapi berbekal keberanian dan optimistis ia yakin bisa menyelenggarakan kompetisi membaca Al Quran tersebut. Abdul Ghani mengaku sempat dibilang gila oleh Presiden Jokowi karena berani membangun kecamatan menjadi ibu kota provinsi, namun berbekal ke-

Cholil Qoumas berharap pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran Nasional XXVI 2021 di Sofifi, Maluku Utara menjadi momentum membumikan semangat Islam yang penuh rahmat dan damai.

"Pada tahun ini STQ Nasional dilaksanakan di Sofifi, Maluku Utara yang sarat akan sejarah panjang, kaya nilai kearifan lokal," kata dia.

Menurutnya Maluku Utara adalah wilayah kesultanan Islam yang memiliki nilai peradaban tinggi. Menurut dia Al Quran adalah pusat energi yang tidak hanya menggerakkan tetapi merawat Is-

ruh pelosok Nusantara dan mengambil peran dalam kehidupan beragama.

Sementara Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin menyampaikan STQ Nasional XXVI 2021 diikuti 589 peserta dari seluruh provinsi di Tanah Air.

STQ Nasional memiliki empat cabang dan 10 golongan. Cabang tersebut yaitu tilawah terdiri dari golongan dewasa putra putri dan anak-anak putra putri.

Kemudian Cabang Tahfidz ada lima golongan yaitu tahfidz 1 juz, 5 juz, 10 juz dan 30 juz masing-masing putra putri. Cabang Tafsir bahasa Arab putra putri dan cabang Hadist terdiri dari dua golongan 100 hadist pakai sanad dan 500 hadist tanpa sanad putra putri.

"Penyelenggaraan STQ Nasional merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda kepada Al Quran sehingga lahir generasi unggul cerdas dan berakhlak mulia," kata dia.

Tidak hanya itu STQ Nasional di Sofifi membuat sejumlah pakar Al Quran hingga hadits berkumpul sebagai dewan hakim. Sekitar 80 dewan hakim yang ahli di bidangnya datang ke Sofifi sebagai penilai.

Ini pun menjadi ajang silaturahmi para pakar yang senantiasa memberikan pencerahan kepada umat. Selain itu ia juga mengingatkan agar jangan sampai ada penularan COVID-19 pada pelaksanaan Seleksi Tilawatil Quran Nasional XXVI 2021 di Maluku Utara pada 16-24 Oktober 2021.

"Presiden berpesan karena sekarang masih pandemi dan kegiatan ini mendatangkan banyak orang pastikan tidak ada penularan COVID-19 dan mari berikhtiar menjaga protokol kesehatan semaksimal mungkin," kata dia.

Menurut dia saat ini panitia penyelenggara telah membuat standar operasional prosedur yang begitu ketat dan berharap semua pihak bisa menjalankan dengan baik.

Ia mengemukakan belajar dari pelaksanaan PON XX di Papua yang sempat ditemukan kasus COVID-19 maka ia berharap hal serupa tidak terjadi hal yang sama pada pelaksanaan STQ.

"Semoga berkat Al Quran hal yang sama tidak terjadi dan terjaga semuanya," katanya. ●



Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

beranian dan dukungan semua pihak akhirnya bisa terwujud.

"Saya meyakini acara ini bisa digelar karena kebesaran dan keagungan Al Quran itu sendiri, dan mulai malam ini Al Quran akan terus berkumandang selama pelaksanaan STQ," kata dia saat pembukaan STQ Nasional.

Ia menceritakan dalam waktu delapan bulan pihak mulai membangun fasilitas STQ salah satunya Masjid Raya Shaful Khairaat ia juga memohon maaf jika sebagai tuan rumah tidak maksimal memberikan pelayanan kepada semua kafilah dan peserta.

Membumikan Islam

Sementara Menteri Agama Yaqut

lam untuk terus berperan dalam mewarisi keragaman Nusantara.

"STQ Nasional bukan hajatan yang bersifat hura-hura hingga adu gengsi, ini adalah langkah untuk mengenalkan keislaman yang moderat kepada generasi muda," ujarnya.

Ia menilai ajang ini juga sarana mendekatkan Al Quran kepada masyarakat luas dan menggali makna holistik untuk dijadikan spirit berbangsa dan bernegara.

"Spirit Al Quran telah mendorong lahirnya generasi Islam yang moderat," kata dia.

Ia menyampaikan insan tilawatil Quran merupakan mitra strategis kementerian Agama karena mereka tersebar di selu-

Gubernur Untuk Negeri



untuk memilih klik www.infoindonesia.id

Polling Gubernur Untuk Negeri memasuki tahap final
Mulai sekarang, kami menampilkan nama-nama yang berhasil
menduduki 10 besar pada hasil polling kedua.



Anies Baswedan
Gubernur DKI Jakarta



Herman Deru
Gubernur Sumatera Selatan



Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat



Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah



Wahidin Halim
Gubernur Banten



Zulkieflimansyah
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Isran Noor
Gubernur Kalimantan Timur



Sri Sultan Hamengkubuwana X
Gubernur D.I. Yogyakarta



Erzaldi Rosman Djohan
Gubernur Kepulauan Babel



Sutarmidji
Gubernur Kalimantan Barat



TUAH BUMI UNTUNG BENUA

HUT Ke-22 Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 pada 12 Oktober 2021. Hari jadi ini menjadi momen penting, karena pada 2020 lalu, perayaan hari jadi tak dilaksanakan secara langsung.

Puncak peringatan HUT dilaksanakan dengan upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati, yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutim, Ardiansyah.

Terdapat hal penting dalam momen HUT tahun ini. Ardiansyah mengingatkan, bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, waktu efektif tersisa sekitar hanya dua bulan lagi. Maka, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Kutim diinstruksikan berkinerja lebih efektif.

Selanjutnya, memberikan perhatian dan konsentrasi penuh terhadap penanganan Pandemi COVID-19. Terutama pelaksanaan vaksinasi agar bisa mencapai target yang diharapkan. Sehingga Kabupaten Kutai Timur bisa berada di zona hijau penularan COVID-19.

Berikutnya dalam pelaksanaan Pembelajaran Tata Muka (PTM) Terbatas di Sekolah, harus diterapkan secara hati-hati dan ekstra ketat. Pastinya diwajibkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.

"Jangan sampai lalai, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan anak-anak kita," tegas Ardiansyah yang mengenakan baju khas adat Kutai.

Sebagai upaya melindungi generasi muda, Ardiansyah dengan tegas menyatakan perang terhadap narkoba. Sebab, menurutnya kejahatan ini harus dihentikan, harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan lagi. Upaya memerangi narkoba memerlukan dukungan semua pihak tanpa terkecuali.

Maka dari itu dia mengajak lembaga, aparat hukum, mulai dari Polres Kutim, BNN Kutim, penggiat anti narkoba dan masyarakat mendukung sepenuh hati.

"Semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi dan mengejar, serta menangkap pengedar maupun pengguna narkoba," ajak Ardiansyah.

Tak hanya itu, semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan terhadap tanggap bencana. Hal ini dilakukan guna menyikapi banyaknya fenomena alam, seperti kebakaran lahan, hutan atau pemukiman penduduk serta bencana banjir.

Terkait hal ini, seluruh jajaran instansi terkait diminta untuk terus siap siaga dan bekerjasama dengan masyarakat luas guna memberikan reaksi tanggap bencana secepatnya.

Suami dari Siti Robiah ini juga mengingatkan masyarakat, untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Terutama tindakan lebih berhati-hati membagikan informasi dalam menggunakan media sosial.

Sehingga tidak meresahkan masyarakat, sekaligus mendukung gerakan anti-hoaks dan ujaran kebencian. Untuk dapat menangkal dan mencegah potensi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Selanjutnya kepada seluruh jajaran aparaturnya Pemkab Kutim, Bupati meminta untuk lebih meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta berada pada koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna menghindari terjadinya penyimpangan yang berimplikasi terhadap proses hukum. Hal ini membutuhkan pemahaman dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Sedangkan penetapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia (RI) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tentunya akan berpengaruh langsung pada masyarakat Kutim.

"Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri untuk target pembangunan tersebut. Khususnya generasi muda untuk meningkatkan potensi diri, agar mampu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal, profesional, dapat bersaing berdaya guna di masa sekarang dan masa depan," katanya.

Di momen HUT ke 22 Kutim ini, Ardiansyah tak lupa mengucapkan selamat, apresiasi, rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada putra-putri atlet-atlet kebanggaan Kutim yang berprestasi di ajang PON XX Papua. Karena telah mengharumkan nama Kutim di ajang nasional.

"Kiranya ini menjadi teladan bagi kita semua untuk hidup bugar, sehat dan berprestasi," ujar Ardiansyah mengingatkan.

Terakhir, Ardiansyah berharap semua pihak bisa berperan menjaga kondusifitas daerah. Sehingga pelaksanaan aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta memelihara hubungan silaturahmi antar umat beragama dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sejahtera Untuk Semua

Walau diperingati dalam suasana penuh kesederhanaan, bukan berarti pun-

cak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tanpa hiburan. Tarian massal bertajuk "Menata Untuk Semua" sukses menghidupkan suasana peringatan ulang tahun daerah berslogan "Tuah Bumi Untung Benua".

Sebanyak 100 pelajar Kutim menampilkan kebolehannya menari, khusus untuk menyemarakkan HUT ke-22 Kutim. Ratusan pelajar itu nampak gemulai menampilkan berbagai tarian adat dari suku yang ada di Kutim. Mulai dari tarian Dayak, Kutai, Bugis, Toraja, Jawa hingga Papua.

Berikutnya, 22 adalah simbol empat penjuru mata angin yang bersatu pada titik pusat mewujudkan kesejahteraan untuk semua.

"Bersama kita tangguh, menata segala beda, menata bersama, menata untuk sejatera, kembalimu adalah harap bagi bumi Kutai Timur. Kembalimu adalah amanah bersama membangun agar lebih sejahtera untuk semua," ujar Robito mengakhiri tarian masal itu.

Bupati Kutim, Ardiansyah menjelaskan bahwa toleransi dan keberagaman, menjadi nilai penting dalam kehidupan



Sesuai sinopsis yang dibacakan Rubito selaku Tim Produksi, tarian tersebut mengisahkan mutiara hitam yakni Kutim yang sudah terbingkai usia 22 tahun. Awalnya, tahun 1999 telah ditorehkan gagasan dan peletakan pondasi pembangunan.

Sebagai dasar wujud mimpi kesejahteraan. Jatuh bangun dan silih berganti waktu sebagai penanda kedewasaan. Berbagai upaya dilakukan merajut keragaman, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

berbangsa. Untuk itu, dia mengimbau seluruh jajaran aparaturnya pemerintah dan masyarakat Kutim untuk selalu menjaga silaturahmi dan kebersamaan yang didasari oleh kesatuan yang kokoh.

"Sehubungan dengan itu diperlukan adanya kesamaan persepsi dari seluruh komponen masyarakat Kutim terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat Kutim pada tahun-tahun mendatang, serta adanya tekad yang sama dalam menghadapi tantangan tersebut," harap dia. ●



M Tito Karnavian

MENDAYUNG DI ANTARA SEKIAN BANYAK KEPENTINGAN

Mulai hari-hari ini hingga dua tahun ke depan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan lebih mendapat banyak sorotan. Beriringan pandemi Covid-19 yang melandai, agenda politik dalam negeri begitu padat meskipun pemerintahan hasil Pemilu dan Pilpres 2019 baru menjelang dua dari lima tahun periodenya.

Maka, bagaikan nakhoda bahtera politik, Tito Karnavian akan mendayung di antara banyak kepentingan, hingga sampai ke pelabuhan tujuan: kondisi stabilitas politik nasional dan kesinambungan pemerintahan demokratis tanpa



gangguan layanan publik yang akhirnya menjaga keutuhan bangsa.

Nah, banyak kepentingan yang berpotensi mengalami persilangan belak-kangan ini. Yang mencolok antara lain persiapan pemilihan umum 2024.

Sejak pertengahan September 2021 lalu, tanggal penyelenggaraan hari pemungutan suara dalam Pemilihan Umum 2024 masih belum pasti. Rapat Kerja Komisi II DPR pada 16 September lalu gagal menyepakati jadwal hari pemungutan suara Pemilu 2024. Pemerintah yang diwakili Mendagri Tito Karnavian mengusulkan Pemilu 2024

Jadi, dengan pertimbangan itu pemerintah akan mengkaji pergeseran jadwal pemilu ke April atau Mei 2024. Alasan lain, Mendagri Tito pun mengemukakan biaya mahal pemilu. Menurut dia, merasa anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp86 triliun terlalu tinggi.

Dia membandingkan usulan anggaran KPU dengan anggaran pemilu 2014 yang berada di kisaran Rp16,186 triliun. Ia menyebut anggaran Pemilu 2019 juga hanya di angka Rp27,49 triliun.

"Kami kemarin membaca di media, pengajuan Rp86 T, jujur saja kami perlu

pa menteri di Kabinet Indonesia Maju menggelar rapat internal dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin ihwal pembahasan hari pemungutan suara Pemilu 2024. Dari rapat itu, muncul empat tanggal yang dinilai ideal untuk menggelar pesta demokrasi tersebut.

"Tadi rapat di Istana menyampaikan laporan bahwa kita bersimulasi tentang empat tanggal pemungutan suara Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang urutannya itu tanggal 24 April, 15 Mei, 8 Mei atau 6 Mei," kata Mahfud dalam keterangan video, Senin,



berlangsung pada April atau Mei 2024.

Stabilitas politik dan efisiensi anggaran menjadi alasan pemerintah menolak usulan KPU yang memajukan tahapan dan menjadwalkan pemungutan suara pada 21 Februari 2024. Mendagri Tito menyatakan jadwal Pemilu pada Februari 2024 berpotensi memicu polarisasi politik.

"Ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan, eksekusi program-program pemda, dan lain-lain. Bukan hanya pusat, daerah juga kan semua berdampak," ungkapnya dalam rapat itu.

melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut, karena ini lompatannya terlalu tinggi," ucapnya.

Nah, rapat kerja Mendagri dengan DPR pun akhirnya tanpa kesepakatan tanggal hari pemungutan suara. Selanjutnya, Rapat Kerja Mendagri Tito dengan Komisi II DPR dan penyelenggara Pemilu yang menurut rencana akan membahas waktu pelaksanaan Pemilu 2024 dijadwalkan ulang. Kali ini jadwal rapat akan berlangsung pada 6 oktober 2024.

Menjelang 6 Oktober 2021, bebera-

27 September 2021.

Mahfud memaparkan, dari empat tanggal yang diwacanakan, pemerintah menilai 15 Mei 2024 menjadi tanggal yang paling rasional menggelar pemilu. Sebab, banyak proses yang lebih singkat pada 15 Mei 2024, mulai dari waktu sampai dengan anggaran.

"Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei ini adalah tanggal yang paling rasional untuk diajukan ke KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober. Tidak bisa mundur ke berikutnya lagi, karena tahapan ini harus ditentukan tanggalnya," ucapnya.

• INFO PROFIL

Namun rapat kerja di DPR yang dijadwalkan pada Rabu, 6 Oktober 2021 ternyata tertunda. Pada tanggal itu Tito Karnavian berhalangan hadir dengan alasan mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri kabinet lainnya.

"Mendagri mengirimkan surat ke Pimpinan Komisi II DPR meminta rapat ditunda," kata Wakil Ketua Komisi II Junimarit Girsang, Rabu, 6 Oktober 2021.

Dengan penundaan rapat itu, maka pembahasan tentang tanggal pemun-

sidang berikutnya.

Toh pemerintah bergeming dengan usulan 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 pada tanggal itu

"Makanya kami usul hari H Pemilu yang efisien waktu dan biayanya tanpa melanggar agenda konstitusional. Itu sudah dengan simulasi yang ketat. KPU dan DPR bisa membuat usul juga," kata

Pemerintah baru mengajukan usul jadwal Pemilu? Kok tidak dulu-dulu? Ya, iyalah. KPU yang berwenang menetapkan jadwal Pemilu kan baru meminta pendapat Pemerintah dan DPR sesuai ketentuan UU. Kalau belum diminta kita kok ngajukan duluan nanti dituding ada agenda terselubung," ujar Mahfud.

Nah, sebenarnya, sejak pertengahan Juni 2021 lalu, Mendagri Tito sudah mengemukakan soal kemungkinan perubahan jadwal dari 28 Februari 2024. Menurut dia, tanggal itu bukan keputusan resmi atau final.

Ia menjelaskan, jadwal pada 28 Februari itu merupakan usulan dari KPU pusat setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024. "KPU menyampaikan 28 Februari dengan alasan kesiapan anggaran sudah ada. Kemudian dilaksanakan sebelum Ramadan untuk menghindari kelelahan petugas. Nah, diambil 28 Februari, tapi ini belum menjadi keputusan resmi," ujar Tito, Rabu, 9 Juni 2021.

Ia menegaskan, jadwal tersebut bisa berubah dari yang diusulkan KPU jika ada pertimbangan lain. Salah satu yang kini menjadi perhatian ialah pada 28 Februari 2024 akan ada Hari Raya Galungan yang merupakan hari libur nasional.

"Mungkin ada yang menyampaikan ke publik, 28 Februari adalah Hari Raya Galungan. Otomatis harus exercise dan itu tidak bisa berlaku. Apa yang dilakukan berikutnya, nanti akan dilakukan rapat kembali, rapat exercise bukan rapat final loh," tutur Mendagri.

Nantinya, lanjut Tito, pemerintah akan mengkaji bersama Bawaslu maupun Komisi II DPR RI terhadap rencana jadwal Pemilu 2024. "Nanti kita akan bertemu kembali untuk melihat tanggalnya yang mana yang pas untuk pilpres dan pilkada. Sehingga risiko overlapping-nya menjadi rendah," kata mantan Kapolri ini.

Mendagri menjelaskan, amanat UU Pemilu menyebutkan pemilu presiden-wakil presiden akan digelar bersamaan dengan legislatif, DPRD, dan digelar pada 2024. Sementara pada UU 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah spesifik disebut pemilihan pada November 2024.

Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan peluang terjadinya Pilpres dua



gutan suara akan tertunda lebih lama. Harap maklum, DPR akan memasuki masa reses selama sebulan, antara 8 Oktober hingga 7 November 2021. Maka, pembahasan tentang jadwal Pemilu 2024 baru akan berlangsung setelah reses berakhir dan DPR memasuki masa

Mahfud MD dalam kicauan di akun Twitter @mohmahfudmd, Minggu, 17 Oktober 2021

Dia pun kemudian menanggapi adanya pertanyaan mengapa pemerintah baru mengusulkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. "Ada yg bilang, kok

putaran. Bila melihat pelaksanaan Pilpres 2019, pemilihan digelar pada April dan berjalan hanya satu putaran.

Konsekuensinya, bila ada dua putaran Pilpres di 2024, maka penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 bisa jadi tabrakan dengan Pilkada serentak 2024. "Nanti akan tabrakan overlapping pekerjaan yang sangat berat sekali. Pilpresnya belum selesai, pilkadanya sudah dimulai, itu akan berat. Maka KPU berusaha exercise, gap waktunya lebih longgar. Hitungan mereka baiknya Januari, Februari, Maret," kata Tito.

Mendagri menuturkan jika Pemilu 2024 digelar pada Januari, persoalan yang muncul ialah anggaran yang biasanya belum cair pada tahun anggaran. Sedangkan pada Maret diperkirakan akan ada bulan puasa atau Ramadan. Jika Pemilu 2024 berjalan saat Ramadan berpotensi memicu kelelahan bagi petugas.

"Sehingga mereka (KPU) mengexercise April terlalu mepet dengan pilkada. Menurut KPU yang baik adalah di bulan Februari. Sehingga waktu exercise mereka, exercise ya (bukan final), diajarkanlah 28 Februari," tutur Mendagri Tito ihwal jadwal Pemilu 2024.

Sedangkan pihak KPU mengatakan mengkaji pula usulan jadwal Pemilu 2024 dari pemerintah. "Sedang kami kaji. Tentunya dalam perspektif penyelenggara pemilu dan juga mengacu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada," ujar Ketua KPU Ilham Saputra, Rabu, 29 September 2021.

Menurut dia, jika penyelenggaraan Pemilu 2024 ditetapkan pada 15 Mei sesuai usulan pemerintah maka akan ada pertimbangan-pertimbangan yang akan disampaikan KPU. "Tentu ada pertimbangan lain yang akan kami sampaikan dalam konsinyering sebelum RDP. Mungkin pembicaraan suatu dinding terlebih dahulu pada hari ini dan kita bicarakan lagi pada konsinyering berikutnya," ucap Ilham.

Yang jelas-jelas keberatan dengan jadwal pemungutan suara pada 15 Mei 2024 adalah PDI Perjuangan. Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR Arif Wibowo meminta pemerintah mengkaji betul usulan pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada tanggal itu.

Arif yang juga Wakil Sekretaris Jender-

al PDI Perjuangan ini mengatakan, fraksinya keberatan dengan usulan itu lantaran sejumlah pertimbangan. "Apakah PDI Perjuangan keberatan pemungutan suara pada 15 Mei karena meminta menimbang ulang, tentu keberatan," ujarnya, Selasa, 28 September 2021.

Ia mengatakan PDIP pun melakukan kajian terhadap jadwal Pemilu 2024. Ia mengingatkan jadwal Pemilu 2024 pada 15 Mei akan melewati Ramadan dan Idul Fitri pada tahun tersebut. Merujuk penganggalan, Idul Fitri 2024 kemungkinan akan jatuh pada 9-10 April.

Menurut Arif, PDI Perjuangan menilai semestinya tak ada kegiatan politik apa pun saat Ramadan. Ia menilai tidaklah

harus kita hindari. Maka rekayasa sistem yang sederhana dan murah itu menjadi penting dan perlu," kata dia.

Alasan berikutnya adalah penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jika pencoblosan digelar 15 Mei, kata Arif, waktu yang ada sempit dan pendek menuju pencalonan kepala daerah. Padahal, salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah pereolehan kursi DPRD oleh partai.

"Belum lagi kalau capres-cawapresnya yang kompetisi harus masuk putaran kedua. Kerumitan dan masalah yang ditimbulkan akan sangat banyak," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini.



etis dan berpotensi muncul masalah jika bulan suci umat Islam itu diisi dengan kegiatan kampanye politik menuju pemungutan suara.

"Saya kira harus bijak mempertimbangan dengan matang dan baik bahwa pada masa Ramadan itu seharusnya tidak perlu kampanye politik oleh partai, termasuk tim kampanye capres dan cawapres," ujarnya.

Selain itu, Arif berpendapat biaya kampanye di masa Ramadan dan Idul Fitri berpotensi menjadi lebih mahal. Padahal, pemerintah ingin pemilihan legislatif dan presiden menjadi lebih sederhana dan murah.

Ia pun mengingatkan postulat bahwa pemilu yang mahal akan berimbas pada tumbuh kembangnya oligarki dan korupsi. "Padahal itu penyakit politik yang

Arif mengatakan pemerintah dan pemangku kepentingan pemilu lainnya, termasuk penyelenggara, perlu mengkaji secara seksama dan mendalam bagaimana membentuk sistem pemilihan yang ajeg. Ia mengatakan sistem pemilu mestinya terintegrasi dan harmonis yang diatur dalam dua undang-undang, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Nah, begitu banyak kepentingan yang berpotensi bersilangan dengan penentuan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Tak mengherankan jika Mendagri Tito Karnavian akan semakin mendapat sorotan di hari-hari ke depan. Bagaimana nakhoda bahtera politik dalam negeri, Tito Karnavian akan mendayung di antara sekian banyak kepentingan. ●



BERLOMBA DALAM SENYAP MENINGKATKAN INOVASI

Berbagai daerah provinsi hingga kota dan kabupaten tengah berlomba dalam inovasi layanan publik sepanjang 2021 ini. Akhir tahun ini akan terlihat siapa jagoannya.

Untuk derajat inovasi termasuk layanan pemerintahan, Indonesia memang masih ketinggalan. Di tingkat dunia, posisinya pada 2021 berada di peringkat 87 dari 131 negara.

Urutan Indonesia turun dua peringkat dibandingkan dengan posisi tahun lalu setelah bertahan di peringkat 85. Dibandingkan dengan negara sekawasan di Asia Tenggara (ASEAN), posisi Indonesia berada di peringkat ketujuh dari 10 negara.

Jadi, sangat pantas jika upaya menin-

gkatkan inovasi layanan pemerintahan menjadi agenda. Terlebih, Global Innovation Index (GII) edisi ke-14 untuk 2021 baru saja dirilis pada akhir September lalu oleh Cornell University, INSEAD, dan World Intellectual Property Organization (WIPO).

GII melihat keadaan inovasi di antara 131 ekonomi di seluruh dunia dan faktor-faktor yang berkontribusi pada peringkat tersebut, seperti lingkungan kelembagaan, kecanggihan bisnis, keluaran pengetahuan dan teknologi, keluaran kreatif, kecanggihan pasar, infrastruktur,

dan modal manusia juga penelitian.

Indonesia memiliki skor tinggi dalam empat dari tujuh pilar GI: Infrastruktur, kecanggihan pasar, output pengetahuan dan teknologi serta output kreatif, yang berada di atas rata-rata untuk kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Sebaliknya, Indonesia mendapat skor di bawah rata-rata untuk kelompok pendapatannya dalam tiga pilar: kelembagaan, sumber daya manusia dan penelitian, serta kecanggihan bisnis.

Indonesia yang tahun ini turun ke peringkat 87 berada di bawah kelompok

berpenghasilan menengah ke bawah dan kinerjanya masih sejalan dengan tingkat pembangunan, meskipun masih kalah dibandingkan dengan negara berpenghasilan menengah ke bawah. -kelompok tetangga di ASEAN, seperti Vietnam (42), dan Filipina (50).

Toh, Indonesia berada di peringkat sembilan dalam ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah, tepat di atas Kenya (86), dan berada di peringkat 14 di antara 17 ekonomi di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Oseania. Sayangnya, statistik menunjukkan bahwa dibandingkan dengan ekonomi lain di kawasan, kinerja Indonesia di bawah rata-rata.

Laporan tersebut melaporkan kekuatan dan kelemahan Indonesia sebagai faktor penyumbang indeks inovasi dalam hal inovasi. Kekuatan pentingnya, antara lain, termasuk skala pasar domestik, perdagangan dan persaingan, kemudahan penyelesaian kebangkrutan, peringkat universitas, dan informasi modal.

Sedangkan kelemahan yang berkontribusi, antaranya, termasuk lingkungan peraturan, pendanaan pemerintah, skala PISA dalam membaca, matematika dan sains, perusahaan R&D global, pekerja pengetahuan, artikel ilmiah dan teknis, mobilitas tersier dalam negeri. Juga dan arus keluar bersih penanaman modal asing langsung (FDI).

Di Asia Tenggara per 2020, Singapura memimpin dengan skor 56,61 dan duduk di peringkat 8 dunia. Selanjutnya Malaysia dengan skor 42,2 duduk di peringkat 33 dunia. Berlanjut dengan Vietnam dengan skor 37,12 dan duduk di peringkat 42 dunia. Thailand di peringkat 44 dunia dengan skor 36,68. Lanjut dengan Filipina dengan skor 35,19 dan ada di urutan 50 dunia. Brunei memiliki skor 29,82 dan duduk di peringkat 71 dunia. Sedangkan Indonesia memiliki skor 26,49. Di bawah Indonesia ada Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Toh jajaran pemerintahan menyadari pentingnya membenahi sisi inovasi ini di Indonesia. Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Maritim dan Investasi Odo RM Manuhutu menjelaskan ada dua indeks untuk mengukur daya saing sebuah indikator yang dimiliki sebuah negara. Yakni Global Competitiveness Index Ranking yang dikeluarkan oleh World

Economic Forum (WEF) dan Global Innovation Index (GII) yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO).

"GII telah menjadi salah satu referensi terkemuka untuk mengukur kinerja

pada Mei 2021 lalu.

Dia berharap, evaluasi Global Innovation Index ini dapat meningkatkan kesadaran kementerian/lembaga akan pentingnya partisipasi bersama dalam meningkatkan peringkat Indonesia baik



Indonesia

GII 2021 rank

87

Output rank	Input rank	Income	Region	Population (mn)	GDP, PPP\$ (bn)	GDP per capita, PPP\$	GII 2020 rank
64	87	Upper middle	SEAO	273.5	3,328.3	12,345	85

Institutions			Score/ Value Rank
1.1	Political environment		58.5 64
1.1.1	Political and operational stability*		66.1 74
1.1.2	Government effectiveness*		54.7 59
1.2	Regulatory environment		20.4 131
1.2.1	Regulatory quality*		41.1 76
1.2.2	Rule of law*		37.7 82
1.2.3	Cost of redundancy dismissal		57.8 129
1.3	Business environment		74.6 52
1.3.1	Ease of starting a business*		81.2 108
1.3.2	Ease of resolving insolvency*		68.1 35
Human capital and research			22.4 91
2.1	Education		35.4 106
2.1.1	Expenditure on education, % GDP		3.6 82
2.1.2	Government funding/pupil, secondary, % GDP/cap		10.5 90
2.1.3	School life expectancy, years		13.6 74
2.1.4	PISA scales in reading, maths and science		361.9 72
Business sophistication			17.5 110
5.1	Knowledge workers		8.0 126
5.1.1	Knowledge-intensive employment, %		11.3 106
5.1.2	Firms offering formal training, %		7.7 97
5.1.3	GERD performed by business, % GDP		0.0 83
5.1.4	GERD financed by business, %		8.0 80
5.1.5	Females employed w/advanced degrees, %		6.3 87
5.2	Innovation linkages		20.7 54
5.2.1	University-industry R&D collaboration*		58.4 27
5.2.2	State of cluster development and depth*		61.9 23
5.2.3	GERD financed by abroad, % GDP		0.0 99
5.2.4	Joint venture/strategic alliance deals/bn PPP\$ GDP		0.0 113
5.2.5	Patent families/bn PPP\$ GDP		0.0 99
5.3	Knowledge absorption		23.9 73
5.3.1	Intellectual property payments, % total trade		0.9 44
5.3.2	High-tech imports, % total trade		8.9 48
5.3.3	ICT services imports, % total trade		1.6 48
5.3.4	FDI net inflows, % GDP		2.0 78
5.3.5	Research talent, % in businesses		7.5 65

inovasi ekonomis, serta tingkat perkembangannya menjadi alat pembanding berharga yang dapat memfasilitasi dialog publik atau swasta dimana para pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengevaluasi kemajuan inovasi dari suatu negara setiap tahunnya," jelas Deputy Odo dalam acara evaluasi GII

di tingkat regional maupun dunia.

Lebih dari itu, Kementerian Dalam Negeri juga terus mengupayakan soal inovasi ini hingga ke pelosok daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, misalnya, sejak Juli 2021 lalu melanjutkan upaya peningkatan Indeks Inovasi Daerah dengan menyelenggarakan Innovative Gov-

• INFO INOVASI

ernment Award (IGA).

Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan sosialisasi tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi mengenai Indeks Inovasi Daerah dan mendorong daerah agar segera melaporkan inovasinya kepada Menteri Dalam Negeri. Selain itu, gelaran ini juga bertujuan untuk memperkenalkan pembaruan dalam sistem Indeks Inovasi Daerah.

"Kami berharap melalui sosialisasi ini, tingkat partisipasi Pemda dalam melaporkan inovasinya melalui sistem Indeks Inovasi Daerah dapat meningkat signifikan," ujar Agus Fatoni.

Daerah tahun lalu, sambungnya, Kemendagri telah memberikan penghargaan berupa piagam dan trofi kepada 195 daerah kategori sangat inovatif. Selain itu, di antara daerah tersebut, sebanyak 31 daerah penerima IGA, diusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapat alokasi dana insentif daerah (DID).

Agus berharap berbagai capaian inovasi di daerah dapat memperkuat kerja sama antardaerah, sehingga mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal. "Selain berkompetisi dalam inovasi, daerah juga perlu membina kerja sama, berkolaborasi, saling

pada Indeks Inovasi Daerah melalui situs <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>.

Selanjutnya data input akan divalidasi dan dilakukan pengukuran mandiri oleh Pemda, untuk kemudian dikirimkan kepada Kemendagri untuk dilakukan pengukuran indeks. Pengukuran indeks sendiri akan menggunakan 36 indikator. Setelah dilakukan pengukuran, maka akan menghasilkan ranking Indeks Inovasi Daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, Papua dan Papua Barat.

"Tahun ini kami mengajak pihak eksternal yang independen untuk melakukan quality control. Upaya ini kami lakukan agar menghasilkan pengukuran



Agus menambahkan, setiap tahun, Kemendagri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah. Pada 2020 lalu, Kemendagri telah menjaring sedikitnya 17.779 inovasi dari 484 pemerintah daerah. Namun, dari data yang tersedia, masih terdapat 58 daerah berkategori tidak dapat dinilai (disclaimer). Kategori ini didapat karena daerah tersebut tidak melaporkan inovasi daerahnya.

Ia berharap, pada tahun ini seluruh Pemda dapat melaporkan hasil inovasinya. Lantaran, hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 388 ayat (7). "Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri," sambung Agus.

Pada pelaksanaan Indeks Inovasi

mengisi, saling belajar dan mengoptimalkan kekhasan daerah," ujarnya.

Kaballitbang Kemendagri juga mengimbau daerah untuk tidak semata-mata hanya ingin mendapatkan penghargaan dalam melakukan inovasi. Namun yang terpenting adalah agar tercipta budaya kerja yang kreatif dan inovatif. "Inovasi bukan tujuan, tapi cara meningkatkan kinerja daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah," sambung Agus Fatoni.

Sedangkan Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah, Matheos Tan menjelaskan tahapan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Pada tahap awal, daerah diminta melaporkan data inovasi dengan menginputnya

“
Kepala daerah melaporkan inovasi daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri Dalam Negeri

dan penilaian inovasi yang transparan dan akuntabel,” ujar Theo.

Dari pengalaman tahun lalu, proses penilaian IGA 2020 dilakukan secara objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain dengan melibatkan banyak Tim Penilai dari berbagai Instansi, Akademisi, dan Tokoh/ Pakar Inovasi Daerah.

Menteri Dalam negeri M Tito Karnavan menyatakan, yang terlibat dalam tim penilai mencapai 15 orang yang berasal dari unsur Kemendagri; Kemen PAN-RB; Kemenristek/BRIN; Kementerian Keuangan; Kementerian PPN/Bappenas; Lembaga Administrasi Negara; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Kamar Dagang dan Industri; Universitas Indonesia; United Cities and Local Government Asia Pacific (UCLG-ASPAC). Media massa terlibat pula dalam penilaian rupanya..

Bagaimana untuk 2021? Meskipun tampak senyap, kita nantikan hasil akhir penilaiannya Desember nanti. ●

SEMENTARA KABUPATEN BOGOR UNGGUL

Ini contoh saja. Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sangat serius menerapkan upaya inovasi daerah. Antara lain dengan mengajukan 199 inovasi dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2021.

Alhasil, untuk sementara, kabupaten dengan jumlah penduduk lima juta lebih --terbanyak di Indonesia-- sementara ini menduduki peringkat pertama penilaian mandiri. Toh penilaian masih berlangsung.

"Pada 2021 ini, kita ikut kembali dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA), sampai hari ini proses validasi inovasi oleh Kemendagri masih berlangsung dengan nilai sementara 92,07 dan Kabupaten Bogor berada di peringkat kesatu," kata Bupati Bogor Ade Yasin pada acara Bogor Innovation Wildly Important Goals (WIG) tahun 2021, di Hotel Pullman Ciawi, Rabu, 29 September 2021 di hadapan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni MSI, serta para rektor perguruan tinggi di Bogor.

Awal September 2021, Kabupaten Bogor masih berada di peringkat keempat dari 360 kabupaten, atau peringkat keenam dari seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Peringkat pertama hingga ketiga saat itu adalah Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Tegal.

Namun, upaya yang lebih serius membawa Kabupaten Bogor naik ke urutan pertama pada Oktober 2021. Bupati Ade Yasin menjelaskan, dengan strategi yang terstruktur selama kurang lebih enam bulan Kabupaten Bogor menyiapkan kompetisi IGA melalui sosialisasi dan workshop, penyusunan regulasi, desk, pembentukan tim pengelola inovasi dan pengelola website inovasi, serta dukungan anggaran hingga akhirnya berhasil menghimpun sebanyak 199 inovasi.

"Pemkab Bogor berkomitmen untuk mendorong dan membangun budaya inovasi melalui kolaborasi dan kompetisi di berbagai sektor. Salah satunya dengan kebijakan one institution, one

innovation dan one village, one innovation," kata Ade Yasin.

Ia pun mengemukakan beberapa inovasi. Antara lain untuk mengatasi masalah kesehatan, Dinas Kesehatan telah mengeluarkan sistem informasi obat dan perbekalan kesehatan, penanganan stunting, Bogor Pain Center di RSUD Ciawi sebagai satu-satunya rumah sakit yang memberikan pelayanan komprehensif dalam penanganan nyeri.

"Pada bidang pendidikan Pemkab Bogor telah mengeluarkan ibogorkab sebagai digital library dalam rangka mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), peluncuran ATM Pancakarsa untuk insentif guru honorer, guru madrasah, guru PAUD dan RT / RW, Beasiswa Pancakarsa untuk 1.200 mahasiswa berprestasi, dan beasiswa Magister Inovasi Regional bagi ASN. Termasuk pem-

timis, drive thru perizinan, BPHTB online, Bogor Career Center, Bogor Gercep dan Graha Pancakarsa sebagai one stop center pelayanan masyarakat miskin.

"Berikutnya dalam rangka mempercepat penuntasan desa tertinggal dan pembangunan infrastruktur di desa, Pemkab Bogor telah melaksanakan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Samisade dilaksanakan dengan mekanisme padat karya, sehingga melibatkan masyarakat sekitar. Tentunya hal ini dapat mendorong pemulihan ekonomi daerah. Kami juga bekerjasama dengan IPB University melaksanakan Sekolah Pemerintahan Desa, dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa se-Kabupaten Bogor," terang dia.

Dalam rangka melestarikan kebudayaan, lanjut dia, Kabupaten Bogor



berikan Kartu Bogor Cerdas (Bodas) bagi warga yang tidak mampu berupa ATM yang bisa dibelanjakan untuk keperluan sekolah seperti seragam, alat tulis dan lain-lain," ungkap Ade Yasin.

Selanjutnya, kata Ade Yasin, dalam rangka mengatasi pengangguran, mempermudah investasi, meningkatkan PAD dan masalah sosial, Pemkab Bogor membranding Kabupaten Bogor sebagai Sport and Tourism. Juga mengeluarkan aplikasi perizinan op-

mengeluarkan program Kamis Nyunda, Bogor Culture Night, TIGER CEPOL dan Sistem Pengaduan Sipesat. Adapun selama pandemi, Pemkab Bogor telah melakukan beberapa inovasi antara lain, ketahanan lumbung desa, pelayanan isoman oleh Bogor Gercep, dan pelayanan mobil vaksin keliling," ungkap Ade Yasin.

Kita nantikan penilaian akhir dalam IGA 2021. Tapi, untuk sementara, bolehlah kita bilang hebat euy.... •



BUMN TUTUP DAN ATAU BUBARKAN KEMENTERIAN

Sangat beralasan anggapan umum menyebut perusahaan pelat merah cuma jadi parasit negara. Sampai-sampai Presiden Jokowi pun angkat bicara soal kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus menurun. Teguran keras dari Kepala Negara memicu desakan untuk membubarkan kementerian yang dipimpin Erick Thohir.

Dalam pengarahannya kepada para Direktur Utama BUMN, Presiden mengkritik keras BUMN yang tidak efektif dan gagal merespons kemajuan zaman dalam model bisnisnya. Jokowi tambah kesal karena perusahaan-perusahaan tersebut selalu mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN)

untuk penyelamatan. Kepada Menteri BUMN, Erick Thohir, ia menginstruksikan penutupan perusahaan BUMN yang performanya terus anjlok.

Jauh sebelum teguran Presiden Jokowi ke Erick Thohir, Komisaris Utama Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sudah lebih dulu mengungkapkan kemarahannya. Di

medio September 2020, Ahok mengkritik tata kelola BUMN yang sangat tidak profesional dan sarat kepentingan politik.

Akar masalahnya di Kementerian BUMN, yang sudah seharusnya segera dibubarkan. Ahok sendiri mengakui bahwa jabatan direksi ataupun komisaris di Pertamina sangat kental dengan



lobi-lobi politik dengan Menteri BUMN.

Menyusul kritik presiden, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman, menggaungkan lagi desakan membubarkan Kementerian BUMN.

Menurut dia, kementerian tersebut jadi biang keladi raibnya kultur profesionalisme.

Karena itulah banyak perusahaan negara yang jauh tertinggal jika dibandingkan perusahaan swasta. Maman menyarankan pembubaran Kementerian BUMN dan menggantikannya dengan super holding yang posisinya setingkat di bawah kementerian teknis. "Merrespons pidato Pak Jokowi, saya mendorong agar Kementerian BUMN dibubarkan," kata Maman Abdurrahman, dalam keterangan persnya.

Maman menilai, para direksi BUMN selama ini lebih tunduk kepada Kementerian BUMN ketimbang kepada kementerian teknis yang mengurus

bidang kerjanya. Kalau tidak tunduk ke Kementerian BUMN maka jabatan menjadi taruhan.

Kondisi itu membuat para direksi memiliki budaya kerja asal bapak senang atau ABS. "Contohnya PLN, Pertamina, PGN, INALUM, tanyakan saja ke semua direksi, apakah mereka pernah berkoordinasi dengan Dirjen masing-masing di Kementerian ESDM? Bahkan mereka cenderung sering sekali berbeda," kata Maman.

Mengenai pembentukan super holding yang posisinya di bawah kementerian teknis, Maman menyebut tugas pokok dan fungsinya sebatas koordinasi, konsolidasi serta sinergisitas antara perusahaan BUMN.

Dengan begitu, para direksi BUMN akan bisa bekerja lebih tenang tanpa khawatir munculnya 'matahari kembar', serta terbangun profesionalisme yang berorientasi peningkatan kinerja korporasi.

Peneliti dari Institute for Develop-

ment of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menanggapi usul tersebut. Menurut dia, ide membubarkan Kementerian BUMN dan menjadikannya super holding adalah gagasan dari mantan Menteri BUMN, Rini Soemarno.

Secara perusahaan, kata Huda, pembentukan super holding akan membuat BUMN lebih efisien dalam tata kelola dan fokus terhadap keuntungan (profit oriented).

"Tidak masalah (Kementerian BUMN) dibubarkan, tapi harus hati-hati," kata Huda kepada Info Indonesia, Senin, 18 Oktober 2021.

Meski begitu, pemerintah harus melihat kembali riwayat kehadiran Kementerian BUMN. Kementerian itu sejatinya dibentuk untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.

Menurut Huda, BUMN seharusnya tak semata mengejar profit, efisiensi, dan sejenisnya. BUMN harus lebih

memberikan manfaat dan menjadi pionir kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, pembubaran Kementerian BUMN harus dibarengi mekanisme baru yang jelas. Pertanyaannya, akan seperti apa keterlibatan pemerintah setelah super holding terbentuk.

Diwawancara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Surakarta (UNSA), Agus Trihatmoko, mengang-gap reformasi tata kelola BUMN sudah diupayakan sejak diberlakukannya UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Tujuan reformasi tersebut dilandasi oleh kajian agar BUMN dapat bekerja profesional dalam kon-

kata Agus.

Masih ada catatan banyaknya BUMN yang berkinerja buruk adalah fakta. Harus diakui pula Kementerian BUMN tidak pernah lepas dari intervensi politik.

"Ini yang sering kali dan terus-menerus merusak organ good corporate governance. Apalagi, jika keberadaan BUMN tanpa menteri, justru intervensi kepentingan tertentu dalam hal corporate governance dan manajemen korporasi sulit terdeteksi," katanya.

Dia menegaskan, Kementerian BUMN harus tetap dipertahankan. Yang utama adalah peran DPR un-

pungan kelompok relawan dan politisi pro pemerintah yang pernah berjasa dalam Pemilu. Mereka mendapatkan balas jasa berupa posisi direksi atau komisaris.

Bila dibubarkan, para relawan dan politisi tersebut akan kehilangan pekerjaan atau menganggur. "Kalau menganggur, ya marahnya ke Jokowi," kata Ujang.

Selain itu, dihapusnya Kementerian BUMN akan mengganggu seluruh perusahaan negara. Selama ini perusahaan pelat merah selalu mengekor pada Kementerian BUMN.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Fraksi

(Kapoksi) PKB di Komisi VI DPR, Nasim Khan, menilai usul membubarkan Kementerian BUMN masih sulit diwujudkan. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan BUMN yang saat ini masih mencatat kerugian. Baik kerugian yang disebabkan oleh tata kelola hingga menimbulkan beban

utang menggunung, atau disebabkan kesalahan strategi bisnis yang menyebabkan perusahaan gagal mendapatkan peluang besar menghasilkan laba.

Selain itu, belum semua sektor BUMN membentuk holding. Kendati nantinya holding sudah berdiri untuk semua bidang, Nasim menganggap keberadaan

Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan. "Se-

benarnya keberadaan Kementerian BUMN tetap layak dibutuhkan karena fungsinya sebagai pembinaan, evaluasi, dan peningkatan kinerja," kata Nasim.

Menurut dia, kinerja perusahaan holding akan diawasi secara khusus oleh Menteri BUMN atau Kepala Badan Pengelola BUMN, agar berjalan sebagaimana mestinya.

Nasim berpendapat pembubaran Kementerian BUMN dan pengalihan perusahaan-perusahaan BUMN ke kementerian teknis bisa dilakukan. Tapi, masih membutuhkan banyak pertimbangan. ●



teks bisnis dan bebas dari bias kekuasaan kementerian per sektoral.

Maksudnya, keberadaan Kementerian BUMN akan berkonsentrasi pada tata kelola dan manajemen strategis. Hal itu tentu berbeda jika BUMN di bawah kementerian teknis.

Pada dasarnya, Kementerian BUMN berorientasi pada layanan kepentingan pemerintah dan publik, bukan bisnis. Dia berpendapat Kementerian BUMN perlu dipertahankan. "Kalau, dibubarkan bisa berisiko terhadap BUMN dalam hal kepemimpinan manajemen pemerintahan negara, yang implikasinya terhadap korporasi,"

tuk mengawasi kementerian tersebut dalam setiap kebijakan strategis di setiap BUMN. "Misalnya, aksi privatisasi, akuisisi, utang, dan termasuk penggabungan perusahaan atau holdingisasi," ucapnya.

Relawan Menganggur

Analisis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, meyakini ide pembubaran Kementerian BUMN akan sebatas wacana. Menurut dia, tidak akan terjadi pembubaran Kementerian BUMN di era kepresidenan Jokowi.

Sejauh ini BUMN adalah penam-

BUKAN ASAL TUTUP DAN BUBAR JALAN

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir menutup perusahaan milik negara yang sakit dan tak mampu mewujudkan daya saing. Karena menurut dia, terlalu banyak yang meminta pertolongan kepada negara, setelah tak mampu mendapat cuan.

Jokowi pun memberi peringatan keras kepada Erick Thohir untuk menutup BUMN yang secara keuangan tak sehat atau di ambang kebangkrutan. "Kalau yang lalu-lalu, BUMN-BUMN-nya banyak terlalu keseringan kita proteksi. Sakit, tambah PMN. Sakit, suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali! Dan, akhirnya itu yang mengurangi

nilai-nilai yang tadi saya sampaikan. Berkompetisi enggak berani, bersaing enggak berani, mengambil risiko enggak berani. Ya bagaimana profesionalisme, kalau itu tidak dijalankan?" ucap presiden dalam tayangan di kanal Youtube Sekretariat Presiden yang diunggah pada Sabtu, 16 Oktober 2021.

"Kalau Pak Menteri (BUMN) 'Pak ini ada seperti ini perusahaan kondisinya, BUMN', kalau saya langsung, tutup saja," lanjut Jokowi.

Jokowi pun memberi tenggat waktu yang singkat kepada Erick Thohir untuk membenahi perusahaan pelat merah. Hanya dalam waktu dua tahun, semuanya beres. "Saya ingin melihat betul-betul dalam waktu setahun dua tahun ada sebuah perubahan-perubahan yang fundamental yang menyebabkan daya saing kita bisa naik levelnya," kata dia.

Namun yang paling penting dari penggabungan tersebut adalah terbentuknya kekuatan besar. "Dan kalau 'berpartner' dengan perusahaan luar yang memiliki 'networking', jaringan kuat ke seluruh negara akan jadi kekuatan besar," tambah dia.

Sesungguhnya sudah sejak enam tahun lalu ia meminta agar penggabungan BUMN itu berlangsung tapi tidak jadi terwujud. "Sudah kita mulai, tapi tidak pernah gabung ya sudah. Kalau transisi dua 'holding' dulu dilakukan, tapi juga tidak ketemu-ketemu, tapi alhamdulillah semua sudah beres dan hal-hal seperti ituyang harus saya

sampaikan apresiasi setinggi-tingginya," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, jumlah BUMN di Indonesia sebelumnya terlalu banyak. "Ada 108 (BUMN) sekarang sudah turun jadi 41 (BUMN). Ini sebuah fondasi yang sangat baik, kemudian diklasterkan juga baik. Yang paling penting ke depan yang ingin kita bangun adalah nilai-nilai, 'core value', yang ingin kita bangun itu," sambung dia.

Selain membangun nilai, Jokowi meminta agar para direksi BUMN memiliki kepercayaan diri dalam berusa-

"Tidak boleh PLN sampe bertele-tele begitu, tidak bisa lagi. Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti ini? Sudah di kementerian berbelit-belit, daerah berbelit-belit, masuk ke BUMN berbelit-belit lagi. Lari semua," tegas Presiden Jokowi.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, sudah ada tujuh perusahaan pelat merah yang akan dibubarkan. Seluruh perusahaan sudah tak beroperasi saat ini. "Sekarang yang perlu ditutup tujuh (BUMN) yang sudah lama tidak beroperasi," ucap Erick



ha. Nilai BUMN yang perlu ditanamkan, menurut Presiden adalah tidak ruwet dan berbelit-belit. "Jangan sampai yang namanya BUMN seperti birokrasi ruwetnya. Bapak ibu bisa membayangkan, mau izin pembangkit listrik 259 izin, meski namanya beda-beda, ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, semuanya sama saja itu izin. Itu jumlahnya 259

izin. Kalau dibawa dalam koper mungkin 10 koper ada dan waktu yang diperlukan mencari izin bisa 3, 4, 5, 6, 7 tahun. Ada yang 7 tahun ngadu ke saya!" kata Presiden.

Perizinan yang berbelit-belit itu, kata Presiden Jokowi, harus dipangkas.

kepada media.

Selain itu, direksi dan pimpinan BUMN juga diminta menjaga nilai kompetisi yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terus dibangun pemerintah. "Jangan lagi mengandalkan proteksi, sebab persaingan semakin terbuka, dan makin berorientasi go global. Amanah tersebut akan terus kami jaga agar BUMN selalu menjadi garda terdepan dalam membangun Indonesia," ujarnya.

Lain lagi pandangan Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. "Penutupan bukan solusi, tetapi bentuk kefrustasian," ujarnya, Minggu, 17 Oktober 2021. •



► Kadin Indonesia

MULAI BERGERAK DENGAN TANTANGAN BERAT

Banyak yang menanti sumbangsihnya untuk Indonesia. Maklum pengusaha nasional.

Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia dalam Musyawarah Nasional di Kendari, Sulawesi Tenggara akhir Juni 2021 lalu, Arsjad Rasjid mulai menyusun personel kepengurusan para pengusaha nasional itu. Alhasil, susunan kepengurusan terbentuk dan Arsjad melantiknya pada Rabu, 20 Oktober 2021.

Yang termasuk banyak menyita waktu dalam penyusunan Kadin Indonesia, kata Arsjad, harus bertemu satu persatu dengan calon pengurus. Untuk membahas program kerja calon pengurus, dan orang-orang yang akan diajak oleh para pengurus. Pada intin-

ya, kata dia, Ketua Umum KADIN Indonesia, ingin memastikan para calon pengurus, bisa bahu membahu membangun KADIN yang lebih baik lagi.

"Saya sebagai ketua umum, bertemu dengan setiap wakil ketua umum (WKU), wakil ketua umum koordinator dan juga kepala kepala badan, secara personal, one on one. Saya mendiskusikan program-program dari setiap WKU atau kepala badan, dan juga kepengurusannya. Siapa komisi tetapnya, siapa wakil ketua komisi tetap. Ini harus dijabarkan," kata Ketua Umum KADIN Indonesia itu, Kamis, 16 Oktober 2021 lalu.

Tambahan pula, ada penyusunan



program umum organisasi dan pokok pokok kebijaksanaan KADIN Indonesia 2021 - 2025 oleh Tim Ad Hoc Kadin Indonesia. Ketua Tim Ad Hoc, Juni Ardianto Rachman sudah menyerahkan

hasil kerja timnya sehingga pelantikan pengurus sudah bisa dilaksanakan. "Sudah disahkan sebagai keputusan. Jadi, ketum bisa melaksanakan kepengurusan pelantikan," ungkapanya.

Akhirnya penyusunan program tun-
tas, juga pertemuan-pertemuan den-
gan calon pengurus. Pelantikan pen-
gurus pun berlangsung pada Rabu, 20
Oktober 2021 lalu, dihadiri secara lang-

“

Saya sebagai ketua umum, ber-
temu dengan setiap wakil ketua umum (WKU), wakil ketua umum koordina-
tor dan juga kepala kepala badan, se-
cara personal, one on one





sung jajaran pengurus mulai dari Ketua Dewan Kehormatan Rosan Roeslani, Ketua Kadin Indonesia sebelumnya hingga Ketua Dewan Pertimbangan Anindya N. Bakrie yang menjadi pesaing Arsjad di Munas Kendari.

Berbicara di acara pelantikan, Arsjad menginginkan para pengurus Kadin yang baru saja dilantik bisa bekerja maksimal khususnya dalam mengembangkan dunia usaha di Indonesia.

"Kami mengharapkan agar seluruh pengurus bekerja bersama-sama, berpadu secara kolektif dalam membina dan mengembangkan dunia usaha nasional," kata Arsjad.

"Dalam pelaksanaan tugasnya harap dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai pengusaha pejuang dan pengusaha pembangunan, menghormati etika usaha, bersemangat dan menjunjung tinggi nilai-

nilai patriotisme," tambahnya.

Arsjad mengatakan setelah dilantik otomatis pengurus sudah bisa bergerak mengatasmakan Kadin. Namun, ia menjelaskan setelah pelantikan ini masih ada rapat pimpinan nasional dan pengukuhan yang rencananya digelar pada akhir November atau awal Desember 2021.

"Bersamaan dengan rapimnas tersebut nantinya kita akan melaksanakan pengukuhan yang di mana kalau bicara UU, kepengurusan Kadin itu harus ada Keppres-nya. Jadi insyaallah bersamaan dengan demikian sekalian Rapimnas kita ada pengukuhan atau legal formalnya," ungkap Arsjad yang pernah menjadi CEO Indika Group ini.

Ia menegaskan, yang utama bagi Kadin Indonesia adalah Environment, Social dan Governance. Jadi, sambungnya, terkait Rapimnas dan pengukuhan, Kadin Indonesia berharap pengukuhan dapat dilakukan langsung oleh Presiden RI. Joko Widodo.

"Harapan kami pengukuhan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Bapak Presiden. Pengukuhan dari kepengurusan dan hasil Munas. Setelah itu



kemudian ada Rapimnas,” katanya.

Selain itu, sebagai Ketua Umum, Arsjad Rasjid juga menegaskan bahwa ia masih berpegang kepada empat pilar yang ia usung. “Pertama kesehatan, kedua ekonomi daerah dan ekonomi nasional, ketiga kewirausahaan dan kompetensi, dan keempat memperbaiki dan memperkuat yang namanya internal organisasi dan regulasi,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Wanita Rosan P Roeslani mengatakan, tantangan Kadin ke depan tidaklah mudah. Apalagi hingga kini penyebaran Virus Corona masih terjadi meskipun sudah landai.

“Dalam lima tahun ke depan tan-

“
Pertama kesehatan, kedua ekonomi daerah dan ekonomi nasional, ketiga kewirausahaan dan kompetensi, dan keempat memperbaiki dan memperkuat yang namanya internal organisasi dan regulasi.

tangan yang sangat berat. Alangkah sangat disayangkan jika kita tidak memberikan dedikasi dan kontribusi kita. Karena Kadin adalah payung dari semua asosiasi, organisasi, himpunan dan seluruh dunia usaha,” katanya di acara pelantikan.

Rosan mengatakan, kunci pemulihan ekonomi adalah dunia usaha. Sebab, dunia usaha memiliki peran mayoritas dalam GDP Indonesia. “Kita ketahui swasta memberikan kontribusi 60 persen dari GDP kita, 30 persen BUMN dan sisanya anggaran pemerintah. Jadi kalau perekonomian mau sehat dan tumbuh kuncinya di dunia usaha,” tandasnya. •

Berikut ini susunan pengurus Kadin Indonesia:

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN:

Anindya N. Bakrie

KETUA DEWAN PENASIHAT:

M.S. Hidayat

KETUA DEWAN KEHORMATAN:

Rosan P. Roeslani

ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN:

Aburizal Bakrie, Mohamad S Hidayat, Adi Putra Tahir, dan Suryo Bambang Sulisto

KETUA DEWAN USAHA:

Chairul Tanjung

KETUA UMUM KADIN INDONESIA

Arsjad Rasjid

KOORDINATOR WAKIL KETUA UMUM (WKU)

KOORDINATOR WKU I BIDANG ORGANISASI, HUKUM, DAN KOMUNIKASI:

Yukki Nugra

KOORDINATOR WKU II BIDANG PEREKONOMIAN:

Franky O. Widjaja

KOORDINATOR WKU III BIDANG MARITIM, INVESTASI, DAN LUAR NEGERI:

Shinta W. Kamdani

KOORDINATOR WKU IV BIDANG PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA, RISTEK, DAN INOVASI:

Carmelita Hartoto

1. WKU I BIDANG ORGANISASI, HUKUM, DAN KOMUNIKASI

WKU Bidang Organisasi: Eka Sastra

WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah: Sarman Simanjanjor

WKU Bidang Asosiasi dan Himpunan: Wisnu W. Pettalolo

WKU Bidang Hukum dan HAM: Dhaniswara K. Hardjono

WKU Bidang Dana dan Sarana: Azis Armand

WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Firlie H Ganinduto

WKU Wilayah Sumatera: Teuku Zulham

WKU Wilayah Jawa dan Bali: Juni Rahman

WKU Wilayah Kalimantan: Feri Rizal

WKU Wilayah Sulawesi: Kukrit Suryo Wicaksono

WKU Wilayah NTB dan NTT: Ivan Batubara

WKU Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat: Amir Hamzah

WKU Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan: Edy Suryadi

2. WKU II BIDANG PEREKONOMIAN

WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo

WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik: Suryadi Sasmita

WKU Bidang Ketenagakerjaan: Adi Mahfudz

WKU Bidang Perindustrian: Bobby Gafur Umar

WKU Bidang Perdagangan: Juan Permata Adoe

WKU Bidang Pertanian: Arief Rahmat

WKU Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan: Sanny Iskandar

WKU Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional: Herman Heru Suprobo

WKU Bidang Kewirausahaan: Aldi Haryoprato

3. WKU III BIDANG MARITIM, INVESTASI, DAN LUAR NEGERI

WKU Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah: Mulyadi Jayabaya

WKU Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Infrastruktur: Insannul Kamil

WKU Bidang Hubungan Internasional: Benardino M. Vega

WKU Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan: S. Oscar Unggul

WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Joseph Pangalila

WKU Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Triawan Munaf

WKU Bidang Investasi: Tony Wenas

4. WKU IV BIDANG PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA, RISTEK, DAN INOVASI

WKU Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Patrick Waluyo

WKU Bidang Perhubungan: Denon Prawiraatmadja

WKU Bidang Energi dan Sumber Dana Mineral: Mardani H. Maming

WKU Bidang Kesehatan: Charles Honoris

WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Yani Motik

WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan: Tri Hanurita S.

WKU Bidang Industri Olahraga: Irawadi D. Hanafi

KEPALA BADAN

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan dan Keamanan: Bambang Soesatyo

Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatrya Sulisto

Kepala Badan Analisis Informasi dan Kebijakan: Ahmad Erani Yustika

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok: Akbar Djohan

Kepala Badan Ekonomi Syariah: Taufan E.N. Rotorasiko

Kepala Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu: Budiarsa

Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan: Bambang P.S. Brodjonegoro

Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital: Pandu Sjahir

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital: Andre Soelistyo

Kepala Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan: Tigor M. Siahaan

Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Ariful Yaqin Hidayat

Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham Habibie.

LANGKAH JITU PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM MERIT

Pelaksanaan sistem merit pada manajemen SDM Aparatur Sipil Negara (ASN), merupakan hal penting sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Sistem merit lahir berdasarkan keadilan, kemampuan, prestasi, dan kinerja sebagai landasan dalam proses rekrutmen, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mengatakan, seorang pegawai dengan kompetensi dan kinerja yang tinggi tentu akan mendapatkan kesempatan berkembang yang lebih baik.

"Sistem merit adalah pendekatan pengelolaan SDM ASN yang paling Pancasila karena mengedepankan asas keadilan dalam implementasinya, sebagaimana bunyi sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," kata dia dalam acara Seminar Nasional Komisi Aparatur Sipil Negara, di Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Penerapan sistem merit sebagai salah satu strategi dalam manajemen SDM ASN tentunya bukanlah hal yang mudah. Pada perjalanannya, banyak tantangan dan inkonsistensi yang ditemui dalam pelaksanaan sistem ini.

Tantangan dan inkonsistensi datang tidak hanya dari dalam ekosistem birokrasi semata. Namun juga dari ekosistem di luar birokrasi yang secara tidak langsung mempengaruhi.

Menteri Tjahjo mengungkapkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut terdapat beberapa langkah jitu dalam implementasi sistem merit secara komprehensif di seluruh instansi pemerintah. Pertama, kolaborasi antara Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan KASN perlu semakin diperkuat, serta harus bergerak bersama dan selaras.

Selanjutnya, penguatan database terkait kemajuan birokrasi, termasuk manajemen ASN. Database ASN tidak boleh berbeda versi, hanya boleh ada satu data yang didapat dari metode yang reliable. Hal tersebut menjadi penting karena setiap pengambilan kebijakan yang dilakukan, khususnya terkait dengan sistem merit, memerlukan

data yang tepat dan akurat.

Langkah terakhir adalah mendorong pelaksanaan sistem manajemen ASN menggunakan aplikasi yang terintegrasi. Saat ini, masih banyak aplikasi yang dibangun oleh masing-masing instansi pemerintah, menyebabkan lahirnya inefisiensi. Oleh karenanya, perlu adanya platform digital yang mengelola segala informasi tentang manajemen ASN.

Sebagai pengawas sistem merit di Indonesia, KASN telah menunjukkan kinerja yang baik. Penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah bahkan telah meyakinkan banyak menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk mengawal secara tuntas implementasi sistem merit di instansinya masing-masing.

"Berbagai hasil rekomendasi dari KASN yang merupakan hasil pengawasan pelaksanaan sistem merit juga telah banyak ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah. Hal ini tentu merupakan indikasi bahwa keberadaan KASN memiliki nilai tambah bagi pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia," katanya.

Lebih lanjut disampaikan percepatan implementasi sistem merit juga dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB No. 40/2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Lahirnya Peraturan Menteri PANRB ini merupakan bukti kuat komitmen Kementerian PANRB dalam mendukung terlaksananya amanat UU ASN, yang di dalamnya juga menetapkan sistem merit sebagai salah satu strategi implementasi manajemen ASN.

Sementara itu, Ketua KASN Agus



Pramusinto menuturkan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah menyatakan pentingnya reformasi birokrasi dan manajemen talenta sebagai agenda krusial, yang diharapkan mampu mendorong terwujudnya birokrasi Indonesia yang kapabel dan berdaya saing. Sehingga mampu memicu peningkatan daya saing Indonesia dan mewujudkan visi bersama 2045, yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

"Untuk mendukung terwujudnya manajemen talenta, khususnya bagi ASN turut didukung dengan perbaikan sistem merit manajemen ASN secara berkelanjutan," ucapnya.

Pihaknya masih menemukan banyaknya pelanggaran sistem merit, intervensi politik, dan pelanggaran netralitas. Berbagai permasalahan yang terjadi, biasanya dilatarbelakangi oleh politik balas budi dan balas dendam pada periode sebelumnya.

Sampai saat ini KASN sudah mengembalikan 335 ASN ke posisi semula, dan masih ada puluhan instansi di daerah yang sedang ditangani dan berada di tahap mediasi dan penyelesaian konflik antara ASN dan kepala daerah.

Disampaikan jika KASN telah berkolaborasi dengan berbagai instansi pemerintah. Kehadiran KASN sangat membantu melalui PPK agar tidak melanggar aturan dalam mengelola ASN dan sekaligus melindungi ASN dari ketidakadilan dan bekerja dengan benar.

"KASN akan terus bekerja keras memastikan penguatan sistem merit untuk mewujudkan birokrasi yang melayani bangsa," kata dia. •





MANGROVE ADALAH KEKUATAN KITA

► Jawab Isu Global Lewat Peta Mangrove Nasional

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang mencapai 81.000 kilometer. Dengan bentang alam itu, kita memiliki hutan mangrove terluas di dunia.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), saat ini, luas hutan mangrove Indonesia mencapai 3.364.080 hektare. Luas tersebut mengalami kenaikan dibanding periode 2013-2019 yang sekitar 3.311.207 Ha, atau terjadi peningkatan mangrove seluas 52.873 Ha.

Pemerintah saat ini menyatakan

sangat serius dalam mengupayakan rehabilitasi hutan mangrove yang mengalami kerusakan dan kondisinya kritis.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya memelihara, merawat dan merehabilitasi hutan mangrove di Tanah Air. Sepanjang tahun ini, pemerintah dikatakan telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 34 ribu Ha.

Jokowi mengatakan, hutan mangrove mampu menyimpan karbon 4-5 kali lebih banyak daripada hutan tropis daratan. Sehingga, keberadaannya akan berkontribusi besar pada penyerapan emisi karbon.

"Indonesia memiliki hutan mangrove

terluas di dunia, yakni sebesar 3,36 juta Ha. Kurang lebih 20 persen dari total hutan mangrove yang ada di dunia. Artinya, kita memiliki sebuah kekuatan dalam potensi hutan mangrove," kata Jokowi dalam siaran resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (28/9/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, pemerintah melibatkan peran dari berbagai pihak dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Indonesia. Menurutnya, pemerintah selalu melibatkan komunitas pecinta lingkungan hidup, komunitas nelayan untuk menanam, memelihara, merehabilitasi hutan-hutan mangrove.

"Sekali lagi, sebagai negara yang memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apa pun, ini adalah kekuatan Indonesia," tegasnya.

Sepanjang akhir September 2021 lalu, Jokowi memang punya agenda menanam mangrove, di antaranya di Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), Kabupaten Bengkalis (Riau) dan Kota Batam (Kepulauan Riau). Bahkan, kepala negara tidak canggung untuk ikut nyemplung bersama masyarakat untuk menanam mangrove.

"Nggak ada masalah basah, kan paling-paling hanya 5-10 menit," ujarnya saat melakukan penanaman di Pantai Setotok, Kecamatan Bulang, Kota Batam.

Awal Oktober lalu, Jokowi juga meninjau hutan mangrove yang berada di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurai Rai, Kabupaten Badung, Bali. Dalam kesempatan itu, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana berjalan kaki di atas jembatan kayu menyusuri hutan mangrove sejauh 500 meter hingga menara pandang.

Presiden bahkan berencana memamerkan hutan mangrove tersebut ke pemimpin-pemimpin negara yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun depan, di mana Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah.

"Ini juga nanti mungkin akan menjadi salah satu venue yang akan kitalihatkan kepada pemimpin-pemimpin G20 tahun depan," kata Jokowi, Jumat (8/10/2021).

Jokowi mengatakan, hutan mangrove yang ada di Bali dibangun sejak 2003. Hutan itu merupakan lokasi percontohan rehabilitasi ekosistem mangrove di Indonesia. Selain untuk rehabilitasi, hutan mangrove tersebut juga menjadi media pendidikan, edukasi, pariwisata, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Model rehabilitasi mangrove yang demikian, kata Jokowi, yang ingin ia replikasi ke provinsi-provinsi lainnya.

"Ini akan terus kita lakukan di kawasan-kawasan pesisir untuk memulihkan, untuk melestarikan kawasan hutan mangrove kita, dan juga untuk mengantisipasi dan memitigasi dari perubahan iklim dunia yang terus dan

akan terjadi," ujarnya.

Presiden berharap, penanaman mangrove tersebut bisa melindungi pantai dari abrasi, menghambat intrusi air, hingga memperbaiki kualitas habitat daerah pantai. Penanaman mangrove juga diharapkan dapat meningkatkan produksi ikan, kepiting, dan hasil laut lainnya.

"Dan yang paling akhir adalah bisa meningkatkan pendapatan

Surat Keputusan Dirjen PDASRH Nomor SK.6/PDASHL/SET/DAS.1/2/2021 tentang Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengharapkan Peta Mangrove Nasional 2021 makin mempercepat proses rehabilitasi dan konservasi mangrove untuk mencapai target pemerintah.

"Setelah launching ini, semua reha-



masyarakat," kata Jokowi.

Sebagai salah satu upaya melakukan rehabilitasi hutan mangrove di Tanah Air, KLHK bekerja sama dengan berbagai pihak membuat program Peta Mangrove Nasional. Indonesia punya target melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 ribu Ha hingga 2024 mendatang.

KLHK akan bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang tergabung dalam Kelompok Kerja Rehabilitasi Mangrove. Hal itu berdasarkan

bilitasi, konservasi, pemeliharaan, serta pengawasan harus dipercepat agar target rehabilitasi 600-620 ribu hingga tahun 2024 yang sering disampaikan Presiden di event internasional dapat terwujud," katanya dalam peluncuran Peta Mangrove Nasional 2021 di Taman Wisata Alam Angke Kapuk di Jakarta, Rabu (13/10/2021).

Luhut menyatakan, Indonesia terus melakukan langkah nyata terkait rehabilitasi mangrove, sebagai salah satu kebijakan terkait perubahan iklim untuk memastikan masa depan generasi penerus. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap KLHK sebagai wali

• INFO LINGKUNGAN

data mangrove telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menyusun Peta Mangrove Nasional 2021.

Menteri LHK, Siti Nurbaya, mengatakan, rehabilitasi mangrove adalah salah satu program nasional yang sangat penting, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Ia menyebut, pemerintah akan terus melakukan akselerasi untuk mencapai target rehabilitasi mangrove sampai 2024, berdasarkan pengalaman sebelumnya mentransformasi tambak yang ditinggalkan kembali menjadi ekosistem mangrove.

"Sekarang isu globalnya, kebutuhan globalnya, makin jelas dan mangrove

untuk cek lapangan, cek lapangan, perbaikan hasil interpretasi berdasar cek lapangan. Lalu, pengendalian mutu tahap II, kompilasi, analisis dan tabulasi, penyusunan laporan dan pembuatan layout peta, sampai dengan penetapan Peta Mangrove Nasional.

"Peta ini jangan hanya dilihat sebagai kartografik atau gambar, namun terdapat unsur politik di dalamnya. Ada rule based, aturan main, kebijakan-kebijakan dan kemudian didelineasi, artinya ditentukan garis-garisnya. Sehingga semua kementerian akan terlibat menjaga dan mengelola mangrove dengan baik," ujar Siti.

Sementara, Wakil Menteri LHK,

bangunan hijau atau green economy.

Alue menyebut, ekosistem mangrove memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai lahan budidaya ikan, kepiting, udang melalui pola silvofishery, pengolahan produk mangrove non-kayu, serta wisata alam dan memperkuat pengembangan kawasan industri hijau (green industrial park).

Sejak 2020, kata dia, pemerintah telah menjadikan program rehabilitasi mangrove menjadi salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PEN melalui penanaman mangrove telah menyerap ratusan ribu hari orang kerja (HOK), melalui penanaman bibit mangrove di ratusan ribu hektare areal pesisir yang terdegradasi.

Melalui mangrove, diharapkan menjadi salah satu penyokong dalam pelaksanaan green economy.

Alue menyebutkan, data eksisting mangrove di Indonesia saat ini seluas 3,36 juta hektare. Luasan tersebut terdiri dari mangrove lebat dengan tutupan di atas 70 persen seluas 3,1 juta hektare. Kemudian, mangrove sedang dengan tutupan 30-70 persen seluas 167.000 hektare, mangrove jarang 42.779 hektare.

Sementara itu, potensi habitat mangrove yang sudah diubah kurang lebih seluas 700.575 hektare. Terdiri dari daerah yang telah terabrasi seluas 3.235 hektare, mangrove lahan terbuka 46.569 hektare, mangrove yang terabrasi sekitar 7.341 hektare dan menjadi tambak sekitar 593.000 hektare, serta tanah timpur sekitar 50.000 hektare.

Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Hartono, mengatakan, format tata kelola yang diinisiasi KLHK akan menjadi acuan bagi akselerasi rehabilitasi mangrove nasional seluas 600 ribu hektare di sembilan propinsi prioritas sampai 2024.

"Percepatan rehabilitasi mangrove tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya perbaikan lingkungan, tetapi juga sebagai upaya penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pada masa pandemi. Ke depan, rehabilitasi mangrove dengan melibatkan masyarakat juga diharapkan dapat memperkuat aspek kelembagaan dalam pengelolaan eko-



ini tidak banyak di negara-negara lain dan kita termasuk yang terbanyak, cukup luas," kata Siti Nurbaya.

Siti menambahkan, instansinya merupakan penanggung jawab dalam penyusunan Peta Mangrove Nasional 2021. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000.

Siti menjelaskan, prosesnya telah melewati serangkaian tahapan yang komprehensif. Mulai dari koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan kunci interpretasi, penyiapan citra satelit dan peta pendukung, pra-pemrosesan (pre-processing).

Kemudian, interpretasi citra secara visual (digitasi layar), pengendalian mutu tahap I, penentuan titik sampel

Alue Dohong, menuturkan, rehabilitasi mangrove berperan penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan kedaulatan politik Indonesia, berupa keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut lantaran wilayah hutan mangrove berada di pesisir-pesisir yang merupakan titik pangkal terluar untuk batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen wilayah Indonesia dengan batas wilayah laut negara lain di sekitarnya.

"Jangan sampai batas negara ini tergerus oleh abrasi akibat tidak adanya ekosistem mangrove," kata Alue dalam konferensi pers KLHK, Senin (11/10/2021).

Alue menjelaskan, perbaikan ekosistem mangrove secara paralel akan memperkuat sosial ekonomi masyarakat, serta mendorong pem-

sistem mangrove yang lebih berkelanjutan,” ujar Hartono.

Hartono pun menyebut jika institusinya akan menginisiasi pembentukan pembenturan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM), meniru keberhasilan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), yang berhasil mempercepat restorasi gambut.

DMPM ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Diharapkan model desa seperti ini dapat diakomodasikan secara lebih permanen dalam bentuk pengelolaan perhutanan sosial mangrove.

Dia bilang, selain dalam bentuk hutan sosial, rehabilitasi mangrove dan pengelolaan mangrove juga dapat dilakukan dalam bentuk partnership. Bahkan bisa dalam bentuk model perizinan jasa lingkungan. Untuk itu, BRGM bersama KLHK akan mereview regulasi yang ada, serta mengembangkan kebijakan yang memungkinkan model-model tersebut dapat dilaksanakan.

“Agar semua target penugasan rehabilitasi mangrove dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis, perlu disusun dokumen roadmap dan rencana percepatan rehabilitasi mangrove sampai dengan tahun 2024. Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait. Dokumen dimaksud disusun berdasarkan Peta Mangrove Nasional (PMN) terbaru sebagai base line yang disepakati bersama,” paparnya.

Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM, Satyawan Pudyatmoko, merincikan target rehabilitasi 600 ribu ha mangrove hingga 2024.

Tahun ini akan dilakukan pembentukan kondisi pemungkin yang mencakup penguatan basis perencanaan, koordinasi antar lembaga dan penguatan organisasi kerja, inisiasi pembentukan DMPM, dan pelaksanaan rehabilitasi mangrove seluas 29.500 ha.

Pada 2022, direncanakan untuk melakukan rehabilitasi mangrove seluas 228.200 ha, penguatan terhadap rintisan DMPM pada 2021, dan pembentukan DMPM baru sebanyak 50 Desa. Pada tahun yang sama, dilakukan upaya-upaya koordinasi untuk mengintegrasikan rehabilitasi mangrove dalam

pengelolaan hutan dan lahan.

Program pada 2023 adalah rehabilitasi mangrove seluas 199.675 ha. Secara bersamaan akan dibentuk 50 DMPM baru, dan penguatan DMPM yang sudah ada, serta program integrasi rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan hutan dan lahan mulai dilakukan.

Program pada 2024 adalah pelaksanaan rehabilitasi mangrove seluas 142.625 ha, membentuk 50 DMPM baru, dan memperkuat DMPM yang sudah ada. Integrasi rehabilitasi mangrove dalam pengelolaan hutan dan lahan telah tuntas dilaksanakan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Di-

kungan. Namun dengan tetap dapat meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, serta meningkatkan kestabilan bentang alam yang berperan penting dalam geostrategi, geopolitik dan geoekonomi nasional.

Helmi menjelaskan, ada tiga aspek yang harus digarap agar program rehabilitasi mangrove dapat terlaksana dengan baik. Pertama, pengelolaan terhadap aspek kawasan, yaitu menyelesaikan informasi terkait lokasi lahan rehabilitasi ekosistem mangrove yang akan dikerjakan di seluruh Indonesia.

Keragaman lokasi dan karakteristik



rektur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK, Helmi Basalamah, menyebutkan, jika Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

“Pemerintah secara konsisten terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, terutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia,” ujar Helmi.

Dia menyebut, kegiatan RHL Mangrove menjadi salah satu kegiatan prioritas pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan tutupan hutan dan lahan, serta perbaikan kualitas ling-

tempat rehabilitasi mangrove, seperti di wilayah terabrasi, bekas-bekas lahan tambak, dan lain-lain termasuk wilayah perbatasan negara, harus didekati dengan mempertimbangkan aspek fisik, biologi, dan sosial yang sangat beragam tersebut.

Kedua, aspek kelembagaan, di mana rehabilitasi mangrove harus dibuat dengan melibatkan masyarakat. Peran masyarakat setempat yang kehidupannya sangat tergantung dari keberadaan mangrove harus dikedepankan. Caranya, melalui pengembangan pariwisata, budidaya ikan tangkap dan lain sebagainya.

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan adalah aspek teknologi, pendampingan dan lainnya. Tujuannya dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan hasil rehabilitasi mangrove. ●



BERLOMBA (JIKA) JOKOWI 3 PERIODE

Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Tiga gubernur terpopuler yang memiliki peluang sama besar untuk berlaga di Pilpres 2024. Tetapi, politik itu penuh ketidakpastian dan sarat kejutan.

Tetap saja ketiganya masih berada di bawah bayang-bayang petahana, yang kemungkinannya berkuasa tiga periode masih sangat besar. Dinamika politik dalam negeri akan ikut menentukan perjalanan politik mereka.

Meski bukanlah pimpinan atau setidaknya berstatus kader parpol, sejak awal tahun ini ketiganya langganan mejeng di papan atas mayoritas hasil survei bakal calon presiden. Salah satu yang teranyar adalah hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Kamis, 7 Oktober 2021.

Survei itu menunjukkan nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mengalami peningkatan dukungan publik. Dalam simulasi pilihan tertutup 15 nama yang dilakukan SMRC, elektabilitas Ganjar Pranowo di angka 19 persen dan Anies Baswedan 14,3 persen. Sedangkan Ridwan Kamil, walau hanya 4,4 persen, tetap bercokol di 10 besar.

Kemudian hasil survei Indonesia Elections and Strategic (Index) Research yang menunjukkan nama Ganjar Pranowo (17,5 persen), Ridwan Kamil (13,8 persen) dan Anies Baswedan (7,5 persen) masuk lima besar pemilik elektabilitas tinggi untuk maju sebagai calon presiden 2024.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, berpendapat, Ganjar Pranowo adalah orang dekat Presiden Jokowi yang kemungkinan besar mendapat dukungan luas untuk kontes Pilpres



2024. Selain memiliki kedekatan secara personal, keduanya juga berasal dari daerah yang sama, yakni Jawa Tengah.

"Mereka punya kesamaan. Saya percaya, kalau (Jokowi) disuruh memilih, dia akan memilih Ganjar, bukan (Ketua DPP PDIP) Puan Maharani," kata Jerry kepada *Info Indonesia*, Minggu, 10 Oktober 2021.

Namun, baik Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, maupun Anies Baswedan sama-sama perlu berjuang keras agar bisa berlaga di Pilpres 2024. Penyebab utamanya adalah mereka bukan pemilik partai. Nama-nama lain dari parpol seperti Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, dan Airlangga Hartarto, tentu

Emil, Jerry berpandangan ia bisa menjadi kuda hitam. Pasalnya, Ridwan sudah mulai mendekati partai politik untuk mendukungnya di Pilpres 2024; salah satunya Partai Amanat Nasional (PAN).

Bukan tak mungkin Emil bakal menyalip Ganjar. Sementara untuk Anies Baswedan, tampaknya masih akan sangat berat. Sebab, banyak janji politik sebagai Gubernur DKI Jakarta yang belum terealisasi. Sementara itu ada kebijakannya yang menuai keaduan. Misalnya, ajang balap Formula E hingga kasus dugaan korupsi terkait program Rumah DP nol rupiah.

Jokowi Masih Membayangi

Namun, harus juga diakui bahwa

rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan. April lampau, Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis survei elektabilitas calon Presiden di 2024. Hasilnya, Presiden Jokowi masih meraih angka 18,5 persen. Jokowi hanya dibawahi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menduduki posisi teratas dengan 24,5 persen suara.

Sebulan setelahnya, hasil survei Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas menyebut nama Jokowi di urutan teratas dari daftar tokoh nasional yang dianggap

pantas menjadi Capres 2024. Kemudian di awal Juni, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis



Ridwan Kamil, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo.

lebih nyaman untuk mencalonkan diri sebagai capres.

Jerry menilai langkah Ganjar akan sangat terhambat jika masih ber-naung di PDI Perjuangan. Jajaran elite PDIP, termasuk sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, tak sungkan menyentil Ganjar di depan publik karena dianggap terlalu berlebihan mencari simpati masyarakat.

Mengenai Ridwan Kamil alias Kang

tiga nama gubernur itu masih di bawah bayang-bayang 'Jokowi Tiga Periode'. Ada fakta politik bahwa gerakan pendukung Presiden Joko Widodo menjabat satu periode lagi masih aktif merangsang opini publik. Gagasan 'Jokowi Tiga Periode' pun cukup kuat di akar rumput.

Beberapa hasil riset lembaga survei yang kredibel menunjukkan bahwa Presiden Jokowi masih diharapkan

hasil survei yang mendata tanggapan responden atas wacana Presiden Jokowi maju kembali di Pilpres 2024. Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen.

Pakar politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo, mengakui bahwa Presiden Jokowi masih menjadi pilihan publik jika namanya disebutkan dalam sur-

vei politik 2024. Kapasitas Jokowi semakin menonjol karena dirinya adalah pengambil keputusan utama dalam penanggulangan pandemi Covid-19. "Persepsi publik bisa jadi bergeser manakala Covid-19 sudah terkendali," kata Wasisto kepada Info Indonesia.

Di sisi lain, Wasisto berpandangan, peluang Ganjar Pranowo, Anies Bas-

demokrasi secara teoritik tidak memiliki standar baku periodisasi masa jabatan pemerintahan. Dengan begitu, masa jabatan presiden dan wakil presiden lebih dari dua periode tidak bisa dikatakan melanggar demokrasi.

"Artinya kalau lebih dari dua periode itu tidak demokratis, ya tidak juga. Karena di negara-negara lain

ubah UU yakni hanya MPR. "Kalau MPR sebagai representasi rakyat berkehendak, ya bisa saja tiga periode terwujud. Hal tu tergantung konsensus yang dibangun," imbuhnya.

Menurut dia, rencana amendemen terbatas UUD 1945 bisa membuka kotak pandora. Artinya, akan banyak penumpang gelap di dalam proses-



Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

wedan, maupun Ridwan Kamil, sama besarnya. Hanya saja mereka bertiga terkendala partai pengusung. Sementara itu Gerindra akan kembali mengusung Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden.

Alasan mendasar yang membuat Prabowo berkeinginan mencalonkan diri lagi adalah belum munculnya calon kompetitif seperti Jokowi yang mengalahkannya di Pilpres 2014 dan 2019. "Selain itu pula, sebagai mantan prajurit, menjadi presiden itu adalah misi tugas yang perlu segera dibereskan," kata dia.

Nah, beberapa waktu lalu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai

yang menganut sistem demokratis bisa saja lebih dari dua periode masa jabatan presiden dan wakil presidennya. Jadi tidak ada standard bakunya," ujar Karyono, saat diwawancara pada September 2021 lalu.

Kata dia, masa jabatan kepala negara di suatu negara tergantung pada konsensus politik yang kemudian ditetapkan di dalam regulasi atau UU. Selama rakyat berkehendak maka bisa saja regulasi tersebut sewaktu-waktu diubah. Menurut Karyono, kewenangan untuk mengubah UU berada di wilayah MPR, bukan berada di wilayah eksekutif atau pemerintah.

Pasalnya, satu-satunya lembaga untuk melakukan kewenangan meng-

ya, salah satunya kelompok sipil yang mengusung cita-cita 'Jokowi Tiga Periode'.

Memang, hambatan legitimasi untuk tiga periode itu adalah Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Tertuang jelas bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden hanyalah dua periode. Tidak hanya dalam UUD 1945, dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, aturan mengenai lamanya satu masa jabatan kembali

dipertegas. “Orang dikatakan menjabat satu kali periode itu hitungannya kalau sudah menjabat setengah atau lebih dari masa jabatan.” Artinya, presiden atau wakil presiden yang sudah menjabat selama 2,5 tahun atau lebih sudah dihitung menjabat selama satu periode.

Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa tidak mempunyai niat dan minat menjadi presiden 3 periode. Ia menyatakan tetap patuh kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara, yang dalam isinya mengatur bahwa masa jabatan presiden ialah selama dua periode.

Namun, pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga punya pandangan lain. Ia menyoroti sikap Joko Widodo (Jokowi) dan Seknas Jokowi-Prabowo atau Jok-Pro 2024 terkait jabatan presiden tiga periode.

Faktanya, Presiden Jokowi diketahui sudah berulang kali menolak wacana tersebut, tetapi Seknas justru makin kencang mengampanyekannya. Jamiluddin menilai kampanye itu menimbulkan spekulasi seolah-olah wacana jabatan presiden tiga periode mendapat restu dari Jokowi.

“Spekulasi ini makin berkembang mengingat saat ini belum ada teguran langsung dari Jokowi terhadap sepak terjang Seknas JakPro 2024,” kata Jamiluddin, Juni 2021 lalu

Jadi, kata dia, wacana jabatan presiden tiga periode seperti layaknya drama dalam teori Dramaturgi. “Manusia sebagai aktor drama kerap kali menampilkan dirinya yang berbeda pada panggung belakang dan panggung depan,” ujar Jamiluddin.

Pada panggung depan, lanjut dia, sang aktor bisa saja menyatakan menolak wacana presiden tiga periode. Sementara pada panggung belakang yang bersangkutan justru menginginkannya.

Jamil melihat, hal tersebut bisa terjadi lantaran dalam sebagian budaya Indonesia, seseorang dinilai tidak baik bila mengajukan diri sebagai pemimpin. “Orang seperti ini (mengajukan diri) dinilai sosok ambisius. Sosok seperti ini dinilai berbahaya dan karenan-

ya tidak layak dijadikan pemimpin,” tutur Jamiluddin.

Sedangkan Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan amendemen UUD 1945 hanya akan dilakukan untuk mengembalikan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan mengulirkan ide jabatan presiden tiga periode. Pria yang akrab disapa Bamsoet

Undang-Undang yang cukup melibatkan pemerintah dan DPR?

Toh perubahan periodisasi jabatan presiden tetap harus melalui amendemen karena tercantum langsung di teks UUD 1945. Terlebih, jika wacana tiga periode presiden ini benar terjadi, salah satu pihak yang juga diuntungkan ialah partai politik dan elite yang



Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo

ini menjelaskan wacana penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode lebih banyak kerugiannya ketimbang manfaat. Ia juga menegaskan MPR tidak pernah melakukan pembahasan mengenai masa jabatan presiden tersebut.

“Pilihan dua periode sudah tepat. Tetapi apakah amendemen perlu? Perlu. Tapi tak diarahkan ke penambahan masa jabatan,” katanya, Senin, 13 September 2021.

Namun, politik itu dinamis. Misalnya, apakah PPHN harus melalui amendemen konstitusi? Bukankah PPHN dapat disusun hanya melalui

mendukung gagasan itu. Setidaknya, stabilitas, kesinambungan, dan keseimbangan akan berlanjut lebih lama.

Justru karena partai-partai politik di parlemen itu yang dapat mengubah konstitusi untuk mengubah periodisasi jabatan presiden, maka kemungkinan itu tetap terbuka. Alhasil, Presiden Joko Widodo dan MPR dinilai menjadi elemen kunci yang bisa menyudahi polemik penambahan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Selanjutnya, baru kita bisa melihat lagi perjalanan politik Anies, Ganjar, dan Ridwan Kamil. Di panggung depan maupun belakang. ●



► Ke Labuan Bajo dalam Sehari

BEKERJA TIADA HENTI, BEBERAPA PROYEK TERLAMPAUI

Bertolak dari Jakarta menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis tak lama setelah matahari terbit, 14 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo beserta rombongan tiba kembali di Ibu Kota pada hari yang sama selepas senja. Namun, perjalanan sehari itu, menandai kelanjutan sejumlah program penting pemerintah.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Presiden menuju Kabupaten Manggarai Barat untuk meresmikan penggabungan Badan Usaha Milik Negara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan Terminal Multipurpose Wae Kelambu di Pelabuhan Labuan Bajo. Sampai di tempat tujuan, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo langsung menuju tempat aktivitas bongkar muatan kapal dengan menggunakan golf cart.

Saat meninjau, tampak Presiden memperhatikan proses bongkar muatan

tersebut. Presiden juga berbincang dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono.

Selesai meninjau, Presiden dan Ibu Iriana menuju acara utama, yaitu peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Wae Kelambu. Sebelumnya, pada 1 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Penggabungan PT Pelindo I, III, dan

IV (Persero) ke Dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Hadir dalam acara peresmian ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri I dan II BUMN, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Jajaran Komisaris dan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat Manggarai Barat.

"Penggabungan BUMN layanan kepelabuhanan diharapkan dapat mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat melalui konektivitas maritim di seluruh Indonesia, sehingga dapat membantu menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN kepelabuhanan di tingkat global," ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Arif Suhartono dalam sambutannya.

Merger Pelindo membuka kesempatan perusahaan untuk go global. Integrasi ini akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Penggabungan ini juga menyatukan sumber daya keuangan, peningkatan leverage dan memperkuat permodalan perusahaan.

"Untuk itu kami memohon dukungan dan kerjasama yang baik agar Pelindo dapat mewujudkan visinya menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia," kata Arif.

Sedangkan Presiden dalam pidatonya mengemukakan merger BUMN pelabuhan ini diyakini akan meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara lain. "Hari ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan Dirut Pelindo, Pak Arif, sudah terjadi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV menjadi PT Pelindo atau PT Pelabuhan Indonesia. Apa yang ingin kita harapkan dari sini? Yang pertama sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Artinya daya saing kita, competitiveness kita kan jadi lebih baik," ujar Presiden dalam sambutannya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar segera dicarikan mitra yang memiliki jaringan yang luas sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Dengan demikian, produk-produk dan barang-barang Indonesia bisa menjelajah dan masuk ke rantai pasok global. Menurut Presiden, saat ini biaya logistik di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Biaya logistik di Indonesia masih sekitar 23 persen, sedangkan negara-negara tetangga hanya lebih kurang 12

persen.

"Artinya, ada yang tidak efisien di negara kita. Oleh sebab itu kenapa dibangun infrastruktur, baik itu jalan, baik itu pelabuhan, baik itu airport, karena kita ingin produk-produk kita, barang-barang kita bisa bersaing kalau kita adu kompetisi dengan produk-produk negara lain," jelasnya.

Presiden pun mengapresiasi Menteri BUMN beserta jajarannya yang telah berhasil mewujudkan penggabungan BUMN kepelabuhanan tersebut. Kepala Negara berharap, penggabungan ini akan menjadikan Pelindo menjadi sebuah kekuatan besar dan bisa diikuti oleh BUMN lainnya. "Nanti akan menjadi sebuah kekuatan besar, tadi sudah disampaikan akan masuk ke 8 besar dunia, inilah yang kita harapkan. Nanti perusahaan-perusahaan yang lain juga seperti itu. Jangan sampai kecil-kecil bertebaran sehingga kekuatannya menjadi minim, baik dari sisi keuangan, modal. Kalau bergabung

seperti ini, kekuatannya akan menjadi gede," tandasnya.

Selain seremoni penggabungan BUMN Pelabuhan, dalam kesempatan ini juga turut diresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, yang diprakarsai oleh Kementerian Perhubungan dan didukung penuh oleh berbagai pihak, termasuk Pelindo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa Terminal Multipurpose Wae Kelambu ini akan difokuskan untuk melayani lalu lintas logistik dan kegiatan bongkar muat komoditas seperti peti kemas, general cargo dan curah cair, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2021.

"Pembangunan Terminal Multipurpose ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden untuk menjadikan Pelabuhan Labuan Bajo



di pusat kota sebagai area pariwisata utama, sedangkan pelabuhan bongkar muat dipindahkan ke Wae Kelambu," tutur Menhub Budi.

Terminal Multipurpose Wae Kelambu mulai dibangun sejak Agustus 2020 dan sudah mulai beroperasi sejak April 2021. Adapun fasilitas

III Labuan Bajo 378 meter persegi, dan kolam pelabuhan yang dapat disandari kapal hingga berukuran 25.000 DWT.

Selain itu fasilitas Pelabuhan pada sisi darat Terminal Multipurpose Wae Kelambu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti Power House, Workshop,

ramah lingkungan (green port) diaplikasikan baik dalam bentuk bangunan maupun penggunaan peralatan sehingga kelestarian lingkungan sekitar pelabuhan tetap terjaga.

"Keberadaan Terminal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas distribusi logistik di wilayah Nusa Tenggara Timur, sekaligus mendukung program pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai tujuan wisata super prioritas," tambah Menhub Budi.

Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Presiden mengapresiasi kecepatan pembangunan terminal pelabuhan tersebut.

"Saya juga sangat mengapresiasi, dikerjakan secara cepat, di bulan Agustus 2020 dimulai kemudian hari ini bisa kita selesaikan. Alhamdulillah," ujar Presiden dalam sambutannya.

Fasilitas terminal ini dibangun untuk memisahkan kegiatan logistik/barang dengan angkutan penumpang yang sebelumnya bercampur di pelabuhan yang lama. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium.

"Pelabuhan Wae Kelambu ini kita memang ingin pelabuhan yang lama itu bersih karena memang di sana adalah wilayah dan daerah wisata sehingga kita geser ke sini," imbuhnya.

Terminal Multipurpose yang berfungsi sebagai terminal khusus logistik ini juga bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan menopang kelancaran arus logistik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presiden berharap, terminal dan pelabuhan baru ini bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama.

"Kita harapkan ini bisa kita pakai dalam jangka 15-20 tahun yang akan datang masih memungkinkan, feasible, untuk angkutan barang-barang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, utamanya di Kabupaten Manggarai Barat," tandasnya.

Nah, dari Labuan Bajo, Presiden menuju Puncak Waringin, yang masih berada di Kecamatan Komodo. Di lokasi ini Presiden meresmikan penataan Kawasan Puncak Waringin,



utama dari infrastruktur sisi laut yang telah dibangun antara lain : Dermaga (120x20) meter persegi, Trestle (60x12) meter persegi, Causeway (690x20) meter persegi dengan lebar jalan 10,5 meter. Selain itu Container Yard (3 Hektar), Gedung KSOP Kelas

Gate Utama dan Gate in/out, Kantor Operasional, Signage, Base Transceiver Station (BTS), Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), Gudang, Masjid, Terminal BBM dan fasilitas pendukung lainnya.

Dalam pembangunannya, konsep

penataan Kawasan Goa Batu Cermin, dan peningkatan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.

"Alhamdulillah pembangunan berbagai infrastruktur untuk mendukung pariwisata di Labuan Bajo telah selesai dan Labuan Bajo telah siap untuk menyambut kedatangan para wisatawan," ujar Presiden.

Setelah dilakukan penataan secara besar-besaran oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan, Presiden melihat wajah Labuan Bajo telah berubah total. Infrastruktur di Labuan Bajo telah lengkap, seperti bandara yang tahun depan akan dikembangkan landasan pacu dan terminalnya.

"Kemudian kita juga melihat hotel, pusat souvenir, creative hub, amfiteater, plaza, citywalk dan ruang-ruang publik yang lainnya semuanya sudah diperbaiki. Saya melihat perubahan wajah itu kelihatan sekali, juga infrastruktur pendukung pariwisata seperti jalan di sekitar kawasan, serta pelabuhan yang khusus melayani pinisi, yacht, dan cruise ini sudah siap semuanya," paparnya.

Kepala Negara menjelaskan, setelah diresmikan pada hari ini, hal penting yang perlu segera dilakukan adalah promosi besar-besaran dan menyiapkan Labuan Bajo untuk penyelenggaraan ajang-ajang nasional dan internasional. "Nantinya ini akan menjadi pendukung penyelenggaraan KTT G20 dan juga nanti akan kita pakai untuk KTT ASEAN di 2023," tandasnya.

Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Puncak Waringin dilakukan mulai Agustus 2019 dan selesai pada Maret 2021 dengan luas kawasan yang ditata mencakup 0,39 hektare. Sementara KSPN Batu Cermin mulai mendapatkan penataan pada Maret 2020 dan selesai pada Maret 2021 dengan luas area yang dilakukan penataan mencapai 2,9 hektare.

Setelah meresmikan penataan Kawasan Puncak Waringin, Kawasan Batu Cermin, dan delapan ruas jalan di Labuan Bajo, pada Kamis sore 14 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo

dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan kaki menuju Kompas Bajo yang berada di Kawasan Puncak Waringin. Kompas Bajo dibangun dengan arsitektur bergaya rumah adat Manggarai.

Bangunan dengan atap berbentuk kerucut ini juga merupakan creative

hub dapat menikmati pemandangan matahari terbenam tiga kali lebih baik dari tempat lainnya. "Di sini kita bisa melihat matahari terbenam, siluet pulau-pulau, dan siluet ratusan kapal pinisi," ucap Yori.

Toh, Presiden Jokowi juga mencurahkan perhatian untuk lokasi lain.



hub bagi komunitas ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur, khususnya Labuan Bajo, yang berisi pusat cendera mata, sentra tenun ikat, lounge, pusat souvenir, dan sebagainya. Yori Antar, arsitek yang mendesain Kompas Bajo, menyebutnya sebagai tempat terbaik untuk menikmati Kawasan Labuan Bajo.

Yori bilang dari tempat itu pengun-

Saat akan menuju Puncak Waringin, Presiden sempat meminta singgah sejenak di Pantai Marina terlebih dahulu. Di lokasi ini, Presiden meninjau penataan KSPN Pantai Marina Bukit Pramuka, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Di Labuan Bajo bekerja sehari tiada henti. Hitung saja, berapa program terlampaui.●



► Mental dan Perilaku

TERDAMPAK AKIBAT KEMAJUAN TIK

Kehidupan manusia sudah sedemikian berubah dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Realitas virtual, sistem fisik siber, internet of things, big data, hingga kecerdasan buatan sudah kian dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, kerja repetitif (pengulangan) dan berbahaya dapat dikerjakan oleh mesin dengan kecerdasan buatan. Sehingga manusia dapat mengerjakan hal-hal lain yang lebih penting. Katakanlah pilot pesawat yang digantikan oleh

pengoperasian drone, atau kendaraan umum tanpa pengemudi karena sudah digantikan oleh aplikasi dengan kecerdasan buatan.

Namun di tengah berbagai kemajuan tersebut, terdapat sisi negatif lain dari adanya kemajuan teknologi, yaitu perubahan pola berpikir dan berper-

ilaku manusia. Dalam pidato pengukuhan guru besarnya yang berjudul "Manusia Dalam Era Industri Ke-empat: Isu Kesehatan Mental, Eksistensi, & Psikologi Sebagai Ilmu", psikolog Elizabeth Kristi Poerwandari memaparkan bahwa penggunaan media sosial cenderung menyebabkan penggu-

nanya mengalami permasalahan jati diri dan eksistensi.

"Ini karena pengguna media sosial cenderung membandingkan diri dengan teman sebaya yang tampil lebih cantik, kaya, lebih banyak teman, lebih keren, pandai, atau lebih internasional di media sosial. Akhirnya cara manusia mengukur nilai diri menjadi lebih superfisial, permukaan, dan shallow. Penampilan, status sosial, dan kemakmuran menjadi lebih penting daripada spiritualitas, kedamaian diri, ataupun pengetahuan," ujarnya.

Kajian tentang hubungan teknologi dan eksistensi manusia ini dipaparkan oleh Kristi pada pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Psikologi Klinis pada Sabtu, 16 Oktober 2021 lalu. Acara pengukuhan ini pun disiarkan secara langsung di kanal Youtube Universitas Indonesia.

Hadir secara langsung di acara itu sejumlah tamu undangan, antara lain Prof. Dr. H. Boediono, B.Sc., M.Ec. sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2009-2014, Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, dr. Lies Dina Lias-tuti, SpJP(K) sebagai Direktur Utama RSCM, dr. Ivan Rizal Sini, MD, FRAN-ZOG, GDRM, MMIS, Sp.OG. sebagai President Commissioner Bunda Medik Healthcare System.

Sedangkan Kristi saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor, Fakultas Psikologi UI. Ia menyelesaikan semua jenjang akademiknya di UI.

Dimulai dari menyelesaikan program sarjananya pada 1988 di Fakultas Psikologi. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya pada Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Interdisiplin pada 1991, dan menyelesaikan jenjang S3 pada program studi Filsafat di Fakultas Ilmu Budaya pada 2002.

Isu perempuan dan gender merupakan wilayah kajian yang ia tekuni. Ini terlihat dari beberapa judul karya ilmiah yang telah ia buat, antaranya yaitu *The Narrative*

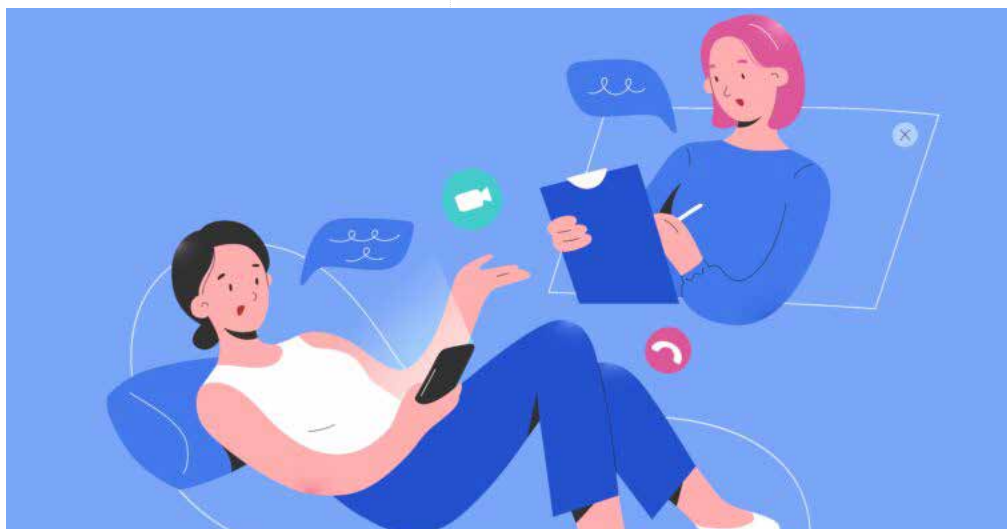
of Women in Prison: The Parenting Practices and the Concepts of Mother in Incarcerated Women, dan *Ambivalent Sexism & Sexual Objectification of*

Women

as Predictors of Rape Myth Acceptance Among Male College Students in Greater Jakarta. Dengan dedikasi dan komitmennya pada isu gender dan perempuan, saat ini ia menjabat sebagai co president Asian Association of Women's Studies.

maya juga mengakibatkan manusia dapat melepaskan sisi-sisi agresifnya tanpa harus bertanggung jawab terhadap perilakunya tersebut.

Alhasil fenomena cyber bullying kini kerap terjadi. Belum lagi kecemasan kolektif yang kini kerap terjadi karena arus informasi yang semakin cepat



Nah, terkait dengan kajiannya rasa sepi juga menjadi salah satu dampak sosial tertinggi yang terjadi di kalangan anak muda. Hal ini terjadi karena di era ini, komunikasi tidak perlu selalu dilakukan dengan tatap muka, sedangkan komunikasi memiliki unsur-unsur yang tidak dapat digantikan dari kegiatan bertemu langsung: ikatan emosional, kehangatan, dan kemampuan membaca situasi-kondisi.

Kemampuan-kemampuan ini tidak dilatih dalam interaksi maya, sehingga kemampuan bersosialisasi manusia menjadi berkurang. Sifat anonimitas atau tidak bernama dalam interaksi

dan tidak terfilter, antara lain berupa kabar bohong atau hoaks. "Teknologi menyebabkan saat ini terjadi suatu kondisi di mana kita tidak bisa lagi membedakan antara mana yang real (nyata) dan mana yang merupakan pencitraan semata. Ini menjadi sebuah isu tersendiri di era digital ini. Virtualitas menjadi realitas. Inilah yang kita sebut kondisi hiperrealitas," lanjutnya.

Kondisi ini kata dia, menyebabkan banyak orang terjebak pada fiksi yang dibangun dirinya sendiri melalui pencitraan diri yang ditampilkan dalam gambar, berita-berita yang tampil di beranda media sosial yang terfilter

karena algoritma, maupun komentar yang muncul dari unggahan.

Semua ini menjadikan manusia berpikir sempit, terjebak dalam pemikiran, dan “realita” dirinya sendiri. Kehidupan yang terisolasi dan egosentris ini kata dia,

terbukti menyebabkan fenomena bunuh diri, dan keinginan menyakiti diri sendiri, yang meningkat dalam 10 tahun terakhir ini.

Selain itu, perkembangan teknologi ikut menggeser perilaku seksual publik. Kehadiran aplikasi kencan memfasilitasi anak muda yang sulit bertemu karena minimnya pertemuan tatap muka. Namun, selain untuk

lai dari berkenalan, tatap muka, hingga pendekatan—berubah. “Ikatan emosional dan komitmen dianggap meropotkan. Konsep keintiman, komitmen, dan kesetiaan mungkin kini dimaknai secara berbeda,” ucap Kristi.

Jadi, kata Kristi, persoalan masyarakat digital tidak dapat diatasi secara individualis, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sebab, tidak semua orang dapat dituntut menjadi cerdas atau tangguh. Beberapa orang tidak memiliki keistimewaan, sedangkan semua individu berhak mendapat kehidupan berkualitas.

Sebagai catatan, dalam salah satu

with benefit, atau one night stand) (28 persen), dan mencari pasangan hidup (15 persen).

Fakta lainnya, sekitar 44 persen pengguna sudah melakukan hubungan seks dengan orang yang mereka kenal lewat dating apps. “Faktanya ternyata banyak yang memakai dating apps untuk memuaskan gairah seks mereka.”

Dating apps saat ini diterjemahkan sebagai sebuah usaha untuk mencari teman baru, menghibur diri sendiri, memperluas jaringan, dan memuaskan hasrat seksual serta fantasi seksual. Kristi mengungkapkan bahwa



mencari teman, aplikasi kencan juga digunakan untuk mencari pasangan seksual tanpa komitmen. Munculnya aplikasi ini juga sejalan dengan munculnya istilah-istilah baru, seperti friend with benefit, casual sex, dan hook-up.

Menurut Kristi, di era digital, sebagian orang mencari keintiman melalui aplikasi kencan. Model hubungan konvensional—yang umumnya dimu-

presentasi penelitiannya, “Internet Mediated Life and Its Implication on the Interpersonal Relationship and Romance in Young People, Case Study of Indonesia and the Netherlands”, Kristi mengungkapkan, motivasi memakai dating apps adalah untuk mencari teman baru (79 persen), menjalin hubungan romantis (53 persen), mencari pasangan seks (casual, friend

hubungan dari dating apps juga diterjemahkan sebagai tempat mencari pasangan untuk bersenang-senang, bukan untuk kencan serius. “Faktanya lagi, mereka suka risky sex tapi ketika ada risikonya mereka menghadapi secara kasual,” katanya.

Hasil survei menyebut bahwa 87 persen tidak menggunakan pengaman untuk dirinya atau pasangan

yang dikenal dari dating apps. Survei ini dilakukan terhadap pengguna internet yang tinggal di beberapa kota besar di Indonesia.

Total ada 1650 partisipan sebagian besar wanita (70 persen), dengan rentang usia 18-22 tahun (48 persen), 23-27 (35 persen), 28-32 (2,54 persen). Di antara partisipan jumlah pelajar (47,9 persen) dan pekerja (30,7 persen).

Dari total tersebut 38,4 persen (633 orang) pernah memakai atau masih memakai dating apps. Sekitar 74 persen di antaranya adalah perempuan. Meski demikian meski orang yang benar-benar serius untuk mendapat-



kan pasangan yang serius. Orang yang mendapatkan pasangan serius, menurut survei, mereka lantas menghapus aplikasi (uninstall). Ketika putus, banyak responden yang mengunduh kembali dating appsnya.

Toh ia menyebut dating apps mengubah kegiatan berhubungan bukan hanya mencari jodoh tapi juga partner seks. Pada sisi lain, seks sebelum

menikah dan pembicaraan soal seks masih tabu di Indonesia.

Kajian-kajian seperti ini sangat relevan juga karena mengingat Indonesia memiliki komposisi penduduk yang sebagian besar adalah generasi milenial dan generasi Z yang lebih aktif secara seksual dibandingkan dengan kelompok usia di bawah atau di atas usia kelompok dominan ini.

Nah, dengan rangkaian dampak TIK terhadap mental dan perilaku, kata Kristi, ilmu psikologi punya peran strategis dalam hal ini. Publik perlu difasilitasi untuk paham tentang tubuh, ruang, konteks sosial, dan hubungan semuanya. Pendekatan ini dinilai relevan untuk merespons turunnya empati di masyarakat.

"Selama ini psikologi bekerja dengan asumsi bahwa dunia bekerja secara mekanis, dapat diramal dan

ujarnya.

Lebih jauh, ilmu psikologi dinilai perlu mendukung inovasi bagi kesejahteraan semua orang. Masukan yang terbuka dan krisis tentang ilmu psikologi pun dibutuhkan.

Dari semua fenomena tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa secara psikologis dan mental, manusia belum siap menerima dampak jangka panjang dari ciptaan yang telah dibuatnya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, pendidikan menjadi salah satu kunci.

Kristi mengatakan bahwa di masa depan, harus diperkenalkan apa yang disebut dengan "pedagogi posthumanisme", yang merupakan kurikulum pembelajaran terarah untuk membantu manusia menangkap dimensi filosofis dan isu kompleks dari hubungan-hubungan dalam ruang daring. Dalam kurikulum ini, penekanan



dikendalikan. Ada pula teori relasi antarindividu melalui tatap muka. Tapi, sejauh apa teori yang ada relevan (dengan masa kini)? Apa ada pendekatan penelitian yang perlu diperbaiki?" kata Kristi.

Kristi menambahkan, ilmu psikologi perlu menjadi pengetahuan dasar sekaligus relevan untuk menjawab tantangan zaman. Hasil penelitian perlu digunakan juga untuk membantu manusia menguasai lingkungan dan menjaga kesehatan mental. "Permasalahan kesehatan mental itu terkait dengan bagaimana manusia bereksistensi dengan alam teknologi,"

terjadi pada diskusi mengenai topik-topik khas manusia seperti autonomi, kehendak bebas, relasi antar individu, antarkelompok, dan kaitannya dengan kondisi global.

"Pendidikan tinggi perlu menghasilkan lulusan yang berpikir dengan bijak untuk dapat membangun dunia bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain dan generasi mendatang. Ada sifat altruisme (tanpa pamrih) yang harus diajarkan kepada individu, agar mereka tidak terjebak pada dunia dan realitasnya sendiri. Ini berlaku di semua bidang ilmu, termasuk ilmu psikologi," ujarnya. •



KEMBALI SETELAH 19 TAHUN PERGI

Penantian 19 tahun akhirnya berakhir. Indonesia memulangkan Piala Thomas kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Terakhir kali juara pada 2002 saat Taufik Hidayat masih aktif menjadi pebulutangkis.

Berlaga di partai puncak di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu malam 17 Oktober 2021, Indonesia dengan percaya diri berhasil membungkam China. Lewat tiga partai tanpa terkalahkan.

Keberhasilan merengkuh juara kali ini, membuat Indonesia mencatatkan diri sebagai pemegang trofi Piala Thomas terbanyak sepanjang sejarah dengan 14 kali. Disusul China di urutan kedua yang meraih 10 kali gelar. Malaysia meraih empat kali dan Denmark satu kali gelar juara.

Anthony Sinisuka Ginting membuka kemenangan Indonesia atas Negeri Ti-

rai Bambu, kala berhadapan dengan Lu Guangzu yang berakhir 18-21, 21-14, 21-16. Merah Putih, menambah poin lewat pasangan ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang mengalahkan He Ji Ting/ Zhou Hao Dong dalam dua gim langsung 21-12, 21-19 dengan durasi 43 menit.

Pahlawan kemenangan Indonesia ditentukan oleh tunggal putra Jonatan Christie di partai ketiga. Kembali harus bekerja ekstra keras untuk menang, Jojo mampu menyingkirkan Li Shin Feng dalam tiga gim dengan skor 21-14, 18-21, 21-14.

Presiden Ikut Tegang

Keberhasilan Hendra Setiawan dan kawan-kawan membuat jantung Presiden Joko Widodo nyaris copot. Dia merasakan ketegangan pertandingan yang berlangsung di Denmark sana. Tapi, ketegangan itu berakhir bahagia.

"Ketegangan menyaksikan keseruan laga final Piala Thomas 2020 malam ini akhirnya berubah jadi kegembiraan begitu Jonatan Christie melompat, mengepalkan tangan, dan berteriak girang di akhir gim ketiga. Indonesia juara!" tulis Jokowi melalui Instagram-nya @jokowi.

"Piala Thomas akhirnya kembali ke



Indonesia setelah penantian 19 tahun lamanya,” sambungnya. Presiden mengaku senang dan bahagia akhir atlet Indonesia, perlahan mampu mengembalikan era kejayaan bulu tangkis Indonesia.

“Dari Tanah Air, saya menyampaikan selamat kepada seluruh atlet bulu tangkis Indonesia dan para pelatih, yang telah berjuang dan mengharumkan nama bangsa di Ceres Arena, Aarhus, Denmark,” ungkapnya.

Sedangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, dalam akun Instagram pribadinya @sandiuno menyampaikan pula ucapan selamat atas kemenangan Merah Putih. “3-0!!! Menyapu bersih babak final. 19 tahun penantian, malam ini kita berhasil merebut kembali piala #thomascup. Selamat kepada para pemain dan pelatih yang telah mengharumkan nama Indonesia. Terharu dan bangga, guys!” tulis Bang Sandi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memberikan ucapan selamat lewat akun Instagram @kemenpora. “Tim Bulutangkis Indonesia berhasil membawa

pulang Piala Thomas 2020 Tahun 2021! Tim Indonesia tampil apik dalam partai final menghadapi Tim Cina. Ginting dkk berhasil mengungguli Cina dengan 3 poin kemenangan sekaligus. Selamat! Indonesia bangga, Indonesia Juara!”

Di pentas lain, untuk Piala Uber 2021, China kembali menegaskan dominasinya pada turnamen beregu putri ini. Pada partai puncak, pasukan Negeri Tirai Bambu ini berhasil menghentikan perlawanan putri Jepang dengan keunggulan 3-1.

Kemenangan tersebut menambah koleksi Piala Uber China menjadi juara 15 kali. Sejak 1998, China tercatat hampir tidak pernah lepas menggenggam Piala Uber. Mereka hanya satu kali kehilangan gelar pada 2016 yang direbut oleh Jepang.

Sedangkan bagi Indonesia, kegagalan di Piala Uber memperpanjang puasa gelar ini sejak 25 tahun lalu atau terakhir kalinya pada 1996.

Nyaris Menyerah

Satu cerita paling memilukan dari keberhasilan Skuad Garuda meraih

Piala Thomas kali ini datang dari kapten Hendra Setiawan. Pada pergelaran Piala Thomas 2018 yang digelar di Bangkok, Thailand, dia hanya mampu membawa Indonesia sampai semi final.

Menjadi semifinalis menjadi pencapaian yang cukup buat dia saat itu. Bahkan, Hendra nyaris gantung raket dan meninggalkan Skuad Garuda. “Hari ini akan selalu memiliki tempat di hati saya. Ini mungkin akan menjadi Piala Thomas terakhir yang saya ikut, dan saya tak bisa mendeskripsikan betapa saya mencintai tim ini,” tulis Hendra yang dikutip pada postingan Instagramnya @hendrasansan yang diunggah 27 Mei 2018 silam.

Saat itu, dia merasa bukan saatnya untuk membawa pulang Piala Thomas kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meskipun dia dan seluruh tim pada 2018 lalu, telah bekerja keras untuk mengembalikan kejayaan bulu tangkis Indonesia. “Saya mengapresiasi seluruh usaha dan kerja keras yang melelahkan untuk membawa kembali piala,” tutur dia.

Namun, faktanya dia tak menyerah dan kembali ke lapangan untuk terus memberikan yang terbaik bagi bangsa

dan negara. "Akhir kata, ini semua tentang perjalanannya, bukan tujuan akhir," tutup Hendra

Lolos Dramatis

Skuad Garuda membuka turnamen beregu putra dua tahunan ini dengan meyakinkan. Melawan Aljazair di laga perdana, Hendra Setiawan dan kawan-kawan menang telak 5-0.

Kemudian, pada laga kedua, Merah Putih menang dramatis atas Thailand dengan 3-2. Di pertandingan terakhir

Grup A, yang juga penentu posisi Indonesia, Jojo dkk juga menang dramatis dengan skor 3-2.

Berhasil lolos ke perempat final, Indonesia berhadapan dengan Malaysia yang selalu bisa membuat kesulitan. Namun, tim ini mampu secara meyakinkan menumbangkan Malaysia dengan skor 3-1 untuk lolos ke semifinal.

Lawan di semifinal juga tak mudah bagi Indonesia karena bertemu tuan rumah Denmark. Namun, lagi-lagi Indonesia kembali menunjukkan mental juara-

nya tahun ini. Indonesia menyingkirkan Denmark dengan perjuangan yang melelahkan melalui hasil akhir 3-1.

Sang pembuka kemenangan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, mengaku, sempat tertekan pada gim pertama menghadapi wakil China, Lu Guang Zu. Pada gim pembuka, Ginting mengaku sempat bermain tidak nyaman, sehingga dari awal ia terus tertinggal dalam perolehan skor. Sementara, lawannya malah memimpin dan terus menambah angka.

"Jujur, saya sempat deg-degan, tegang di gim pembuka. Makanya saya selalu tertinggal dan kalah di gim pertama. Pasti ada tekanan yang saya rasakan waktu itu dari lawan," kata Ginting.

Namun di gim kedua dan ketiga, pemain berusia 24 tahun itu mengaku sudah bisa bermain dengan lebih baik. Strategi permainannya bahkan bisa ia terapkan dengan tepat.

Ginting merasa sangat nyaman dan bisa menikmati permainan. Dalam waktu 1 jam 17 menit, Ginting menumbangkan Lu Guangzu dengan kemenangan rubber game yang berakhir 18-21, 21-14, 21-16.

"Di gim kedua dan ketiga, saya bisa mengontrol permainan. Saya bisa bermain dengan baik dan bisa memenangi pertandingan. Puji Tuhan, akhirnya saya bisa bermain bagus di gim kedua dan ketiga," ungkap Ginting.

Di atas kertas, Ginting memang jauh lebih diunggulkan, mengingat saat ini ia merupakan tunggal putra peringkat kelima dunia, sedangkan Lu berada di urutan ke-27. Selain itu, dari dua pertemuan sebelumnya, Ginting unggul 2-0. Mereka pernah berjumpa di turnamen Indonesia Open 2019 dan Japan Open 2019.

"Bicara soal strategi, sejak tadi malam saya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tunggal putra China. Dengan Lu, saya sudah pernah bertemu dua kali. Jadi, saya tidak kaget saat bertemu Lu di laga pembuka ini," tutur Ginting. ●



TANPA KIBARAN MERAH PUTIH

Keberhasilan Indonesia membawa pulang trofi Piala Thomas 2020, setelah penantian selama 19 tahun, menjadi pelepas dahaga gelar turnamen beregu bulu tangkis di Tanah Air. Namun, di tengah kegembiraan publik atas kemenangan tersebut, satu hal yang menjadi ganjalan adalah tidak bisa dikibarkannya bendera Merah Putih saat penyerahan trofi Piala Thomas.

Meski lagu Indonesia Raya masih bisa dikumandangkan sebagai penghormatan atas prestasi skuad Garuda,

Indonesia (LADI), menyusul larangan pengibaran bendera Merah Putih di berbagai kejuaraan olahraga internasional. "Salah satu keputusan dari rapat (dengan LADI dan KOI), saya membentuk tim yang tugasnya ada dua. Yaitu untuk melakukan akselerasi terhadap upaya-upaya kita supaya sanksi terhadap LADI ini bisa diakhiri," kata Zainudin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin, 18 Oktober 2021.

Zainudin bilang, tim tersebut juga bertugas untuk melakukan investigasi duduk perkara terkait ketidakpatuhan

yang kami kerjakan," ujarnya. Politisi Partai Golkar ini menyatakan tidak ingin mengulang kejadian yang sama untuk kali kedua.

Atas insiden tersebut, Zainudin dan LADI juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. "Saya mohon maaf terhadap kejadian yang membuat

kita semua tidak enak, tidak nyaman. Seharusnya kita bisa menikmati kegembiraan dengan Piala Thomas yang kembali ke pangkuan kita setelah dua dekade, tapi itu berkurang karena kita



ketiadaan kibaran bendera yang menjadi simbol penghormatan visual begitu terasa. Sang saka harus berganti dengan bendera organisasi induk cabang olahraga badminton, PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia).

Tidak bisa berkibarnya bendera Merah Putih lantaran Indonesia mendapatkan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) dengan alasan dinilai tidak patuh terhadap aturan antidoping. Sanksi ini juga jadi yang pertama setelah WADA resmi memberikan surat teguran awal Oktober 2021 lalu.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, menyatakan telah membentuk tim yang bertugas untuk mempercepat pencabutan sanksi WADA terhadap Lembaga Anti-Doping

LADI atas aturan uji doping. Sehingga gagal memenuhi ambang batas minimal sampel pengujian.

Tim tersebut diketuai oleh Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari dan dibantu oleh Sekretaris Jenderal KOI, dua orang perwakilan LADI dan induk cabang olahraga yang sering mengikuti kejuaraan internasional, serta satu orang perwakilan dari pemerintah atau Kemenpora. Menpora Zainuddin mengatakan pula sudah berbicara kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengenai langkah-langkah penyelesaian permasalahan Indonesia dengan WADA.

"Saya sudah komunikasi dengan Mensesneg tentang langkah-langkah

tidak bisa menyaksikan merah putih dikibarkan. Kami akan serius menangani ini," ungkapnya.

Sedangkan Ketua Umum KOI, Raja Sapta Oktohari, menyatakan, pihaknya siap untuk memaksimalkan berbagai upaya serta lobi-lobi agar sanksi terhadap LADI segera dicabut. Menurut dia, insiden di Piala Thomas merupakan peringatan bahwa keikutsertaan Indonesia di pentas dunia tidak terlepas dari regulasi internasional.

"Langkah pertama, kami akan segera berkoordinasi internal antara Kemenpora dan LADI. Kami butuh satu bulan untuk merapikan data-data yang kami serap dari LADI, dan memaksimalkan lobi-lobi untuk bisa memaksimalkan upaya pencabutan sanksi," ujar Okto. •



Berwisata dengan Seaplane

MODEL WISATA PASCA PANDEMI

Solusi menghindari kepadatan bandara dan kerumitan protokol kesehatan adalah pemanfaatan seaplane atau pesawat amfibi yang dapat mendarat di permukaan air selain di darat. Bukankah tetap memerlukan bandara yang menerapkan protokol dan kerumunan? Ya tinggal integrasikan saja seaplane dengan pelabuhan laut, tanpa melalui bandara umum.

Wisata dengan seaplane yang mendarat di landasan permukaan air (water aerodrome) sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Sejak 2018 lalu, di Kepulauan Riau sudah tersedia penerbangan

seaplane rute Bandara Hang Nadim, Batam menuju Pulau Bawah, Kabupaten Natuna pergi-pulang.

Dengan kemampuan dapat mendarat di permukaan air dan daratan, seaplane adalah pilihan untuk menjangkau pulau-pulau terpencil dengan

cara lebih cepat. Pesawat ini memiliki float (pelampung) pada bagian bawah badannya yang berguna untuk melakukan operasional di air. Selain juga memiliki sistem roda pendarat, sehingga pada saat tertentu tetap dapat melakukan operasional dari dan

menuju daratan.

Nah, seaplane Batam-Pulau Bawah menjadi layak karena perkembangan kawasan eksklusif Bawah Reserve. Sekadar mengingatkan, kawasan Pulau Bawah dengan Bawah Reserve itu menjadi pilihan jaringan media Cable News Network (CNN) sebagai pulau terbaik di kawasan tropis. Antara lain karena kandungan oksigennya yang tinggi.

Namun, harap maklum jika Pulau Bawah dan Bawah Reserve hanya satu. Sudah diborong oleh wisatawan beranggaran global.

Penerbangan seaplane ke Pulau Bawah menyasar wisatawan High-End tourists dari Eropa dan Rusia untuk tiga malam, termasuk penerbangan Singapura menuju Batam-Pulau Bawah pergi-pulang. Pulau Bawah semakin menjadi incaran para traveler, setelah sebelumnya pesepakbola David Beckham diving di pulau tersebut.

Toh sejak penerbangan perdana seaplane Batam-Pulau Bawah pada awal 2018 itu, keinginan mengembangkan moda transportasi ini untuk pengembangan wisata tampak meningkat. Belum setahun sejak penerbangan Batam-Pulau Bawah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan (Kemenuh) mengungkapkan rencana membangun bandar udara perairan di 10 lokasi di Indonesia.

Tujuan pembangunan bandar udara perairan didorong oleh meningkatnya wisata berbasis pantai, danau dan laut. Sehingga Balitbang Kemenuh menilai perlunya peningkatan aksesibilitas.

Sedangkan 10 lokasi yang disebut pada saat itu adalah Danau Toba-Sumatera Utara; Pulau Senua, Kepulauan Riau; Pulau Gili Iyang, Sumenep, Madura, Jawa Timur; Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur; Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat; Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur; Bunaken-Manado, Sulawesi Utara; Wakatobi, Sulawesi Tenggara; Pulau Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara; dan Raja Ampat, Papua Barat.

Hingga sejauh ini, bandara perairan yang beroperasi adalah aerodrome

milik Newmont (Aman Mineral) yang berlokasi di Benete NTB, kemudian di Pulau Moyo, masih di NTB, dan kawasan Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, selain yang di Pulau Bawah tadi.

Dua tahun berlalu, kendala anggaran kemudian juga pandemi Covid-19 seolah menenggelamkan gagasan membangun aerodrome, bandara untuk seaplane. Namun, pada Agustus 2020, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebut lagi bandara perairan ini bersamaan sederet proyek infrastruktur yang saat ini jadi prioritas untuk dibangun.

"Kita membangun 21 bandara baru. Kita membangun 10 bandara hub primer. Melakukan perbaikan

daerah atau pulau-pulau yang sangat sulit dijangkau dengan moda darat dan laut," urainya.

Ia mengakui pembangunan infrastruktur transportasi sempat terganggu karena pandemi Covid-19 ini. Hal ini lantaran adanya pembatasan pergerakan masyarakat yang membuat stakeholder perhubungan tak bisa bergerak bebas seperti dalam kondisi normal.

"Masa pandemi ini membuat kita dilematis dalam beberapa hal. Pertama, berkaitan dengan pembangunan, karena dengan adanya pandemi tentu semua stakeholder tidak maksimal melakukan kegiatan," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Kemaritiman dan Investasi



175 bandara, dan juga mengupayakan 5 lokasi bandara perairan untuk pariwisata perairan," kata Budi Karya Sumadi dalam sebuah webinar, Jumat, 14 Agustus 2020.

Namun, belum jelas kapan proyek tersebut bakal terealisasi. Hanya saja, Budi Karya menambahkan juga bakal membangun jembatan udara untuk pesawat-pesawat perintis sebanyak 37 rute ke lokasi-lokasi yang memiliki wilayah geografis tinggi di pedalaman. Hal ini menjadi konsen Presiden Jokowi dalam mendorong konektivitas.

"Saat ini Kemenuh terus melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur terutama di daerah-

Luhut Binsar Pandjaitan juga sempat mengungkit adanya rencana pembangunan bandara perairan. Ini untuk mendukung pesawat udara yang dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata.

"Kita juga ingin mengembangkan kapal-kapal seaplane ini untuk di daerah daerah yang banyak orang diving. Seperti Danau Toba, seperti Labuan Bajo, di Raja Ampat," ujarnya.

Ia menekankan bahwa proyek ini harus punya manfaat di dalam negeri. Komponen dalam negeri jadi perhatian serius agar berdampak positif bagi masyarakat.

"Ini kita coba pakai dalam negeri.

• INFO WISATA

Karena presiden perintahkan penggunaan APBN, penggunaan stimulus. Kita upayakan semua pakai lokal konten,” kata Luhut.

Lebih dari itu, pandemi Covid-19 meskipun melandai tetap mengurangi sisi leisure pariwisata karena protokol kesehatan dan kerumunan di bandara umum. Melihat perkembangan ini

yang baru.

“Kemarin kita ada sedikit isu di Angkasa Pura II, sebagai contoh ketika melakukan pembukaan kembali penerbangan bahwa kita mesti mendesain ulang arus lalu lintas penumpang dari drop zone sampai dengan masuk ke dalam bandara,” ujar Wamen yang akrab disapa Tiko dalam seminar dar-

fisik pada antrean penumpang mulai dari pintu masuk sampai dengan naik ke pesawat.

“Itu akan menjadi sesuatu yang semi-permanen. Bukan hanya satu atau dua bulan mungkin bahkan sampai dengan setahun mendatang atau bahkan selamanya mungkin penerbangan ini akan mengalami redesign penuh dalam sisi penumpang maupun kapasitas pesawatnya,” kata dia

Dalam konteks wisata, peluangnya adalah menghindari bandara umum. Jadi, pesawat seaplane ini tak perlu menggunakan landasan bandara umum, melainkan dengan mengembangkan bandaranya sendiri secara terintegrasi dengan pelabuhan laut. Misalnya, penerbangan dari Batam bukan bertolak dari Bandara Hang Nadim, melainkan dari Pelabuhan Marina Nongsa menuju Bawah Reserve.

Persoalannya mungkin di regulasi. Seaplane dapat terbang jika pilotnya memiliki izin khusus mendarat di darat dan di air. Lalu bandara water aerodrome juga harus memenuhi persyaratan dan izin pihak-pihak yang kompeten dan terkait.

Namun, secara ekonomis memang water aerodrome memerlukan biaya lebih murah karena tidak memerlukan landasan pacu di daratan yang terkait pembebasan lahan hingga kebutuhan materialnya. Pembuatan water aerodrome hanya memerlukan kurang lebih 100 m x 55 m untuk Apron (tempat menaik-turunkan penumpang dan kargo) tanpa perlu adanya runway, hanya perlu taxiway dengan luasan 15 m x 45 m. Sedangkan untuk bandara di darat memerlukan runway 800 x 30 m plus terminal dan apron.

Belakangan pemerintah mulai mencari terobosan dengan menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait seaplane dan water aerodrome itu. “Saat ini pengaturan bandara perairan di Indonesia masih sangat umum dan minimalis, dimana mengacu kepada payung regulasi penerbangan dan kebandarudaraan. Ketentuan yang ada harus dimodifikasi dan dikontekstualisasikan dengan kebutuhan pengoperasian bandara perairan,” ungkap Menhub Budi Karya



Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menilai sektor transportasi udara perlu melakukan desain ulang atau redesign, khususnya untuk arus lalu lintas penumpang di bandara dalam rangka menjalani tatanan kehidupan normal

ing di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2020.

Tiko mengatakan langkah tersebut penting karena perlu untuk memastikan terdapat pemeriksaan dari sisi kesehatan, dokumen kesehatan, surat tugas. Dengan demikian ini perlu rancang ulang daripada pembatasan

Sumadi, Jumat, 15 Oktober 2021.

Menhub Budi menjelaskan, harus ada usaha untuk mengharmonisasikan antara peraturan penerbangan dan pelayaran, termasuk kerjasama instansi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan akademisi, dalam penerapan peraturan tersebut agar tercapai tujuan dalam mendukung pariwisata nusantara melalui kolaborasi anak bangsa.

Budi pun memaparkan beberapa manfaat dibangunnya bandara perairan di Indonesia. Salah satunya untuk menopang sektor pariwisata di Tanah Air. "Selain mampu membuka konektivitas antar daerah, juga bermanfaat dalam menunjang pengembangan daerah yang berkelanjutan, menghubungkan daerah-daerah terpencil dan perbatasan, serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia," kata dia.

Lebih lanjut Menhub mengatakan,

sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar obyek pariwisata harus dilakukan melalui pendekatan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Maka fungsi dan manfaat bandara perairan di Indonesia dapat dimaksimalkan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umar Aris mengatakan, RPP terkait seaplane dan water aerodrome ini merupakan hasil kajian dan kemitraan antara Badan Litbang Perhubungan Kemenhub dengan Universitas

tasi konvensional yaitu darat, laut dan udara. Substansi dari RPP yang telah tersusun ini, pada dasarnya merupakan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam tiga rezim hukum, yaitu hukum transportasi darat, hukum transportasi laut dan hukum transportasi udara.

"Selain sudah tiga kali menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para ahli dan stakeholder, beberapa waktu yang lalu, kami juga telah melaksanakan uji operasi pendaratan



ran di Indonesia. Salah satunya untuk menopang sektor pariwisata di Tanah Air. "Selain mampu membuka konektivitas antar daerah, juga bermanfaat dalam menunjang pengembangan daerah yang berkelanjutan, menghubungkan daerah-daerah terpencil dan perbatasan, serta mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia," kata dia.

Gadjah Mada. "Kajian ini merupakan respon dari fenomena belakangan ini yaitu meningkatnya permintaan (demand) terhadap pergerakan transportasi yang bersifat water-to-water dan water-to-land melalui penggunaan pesawat apung atau seaplane," ujarnya.

Umar Aris mengungkapkan, pengembangan bandara perairan ini menggabungkan tiga sarana transpor-

dan lepas landas seaplane di sekitar Pulau Gili Iyang, Madura. Daerah ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata mancanegara karena dikenal memiliki kadar oksigen terbaik nomor dua di dunia." ujar Umar Aris.

Wah, akan banyak daerah dapat mengembangkan wisata dengan seaplane dan water aerodrome. Di pulau kecil atau di tengah danau. •



SUMENEP DAN GILI IYANG

Pulau Bawah dengan Bawah Reserve dikenal sebagai kawasan tropis berkadar oksigen terbaik di dunia menurut jaringan media Cable News Network (CNN). Lantas yang nomor dua di mana?

Yang nomor dua itu Gili Iyang tempatnya. Setidaknya begitulah menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Umar Aris.

Gili (pulau) ini terletak di sebelah timur Pulau Madura. Secara administratif termasuk wilayah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Maka, jadilah Gili Iyang terpilih sebagai lokasi uji operasi seaplane atau pesawat apung dengan rute Bali menuju Gili Iyang pada April 2021 lalu. Selain uji operasional pesawat apung, Balitbanghub juga merencanakan pembangunan bandar udara perairan sebagai tempat lepas landas (take off) dan pendaratan (landing) dari pesawat apung tersebut.

Seaplane yang diujikan dalam uji operasional ini adalah jenis Cessna Caravan Amfibi 208A yang saat ini beroperasi di Indonesia. Dikemudikan oleh pilot Captain Yopi Priherda, pesawat ini merupakan pilihan yang sesuai untuk digunakan pada perairan di Indonesia. Hal ini berdasarkan pengamatan dan analisis yang dilakukan oleh Balitbanghub terkait kedalaman perairan, ketinggian gelombang, serta kekuatan arus.

"Kegiatan ini telah melalui serangkaian proses penelitian dan pengembangan yang memperhitungkan secara cermat berbagai aspek mulai dari aspek teknis dan keselamatan. Kami optimis bahwa seaplane ini menjadi terobosan yang positif untuk turut me-

majukan pariwisata Indonesia, meningkatkan perekonomian juga layanan penghubung atau konektivitas antar pulau," ujar Umar Aris.

Sedangkan Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengakui, Gili Iyang menjadi salah satu lokasi yang potensial karena dikenal sebagai pulau dengan kadar oksigen tinggi. Gili Iyang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan dari serangkaian pulau di Sumenep.

"Selain melayani kebutuhan wisata, seaplane ini diharapkan dapat juga melayani kebutuhan masyarakat sebagai sarana transportasi. Dari hasil uji coba ini kami sangat menyambut baik dan akan mendukung sebaik mungkin," ujar Fauzi.

Lebih lanjut Fauzi mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep



menyambut dengan baik terobosan serta solusi transportasi ini. "Kami akan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah pusat untuk rencana ke depannya," tambahnya.

Menurut dia, Kabupaten Sumbawa memiliki 126 pulau. "Tentu saja membutuhkan transportasi yang cepat menuju objek wisata, salah satunya transportasi udara seaplane," jelasnya.

Ia pun optimistik akses wisata Pulau Oksigen Gili yang akan semakin terbuka. Terutama wisatawan asing yang ada di Bali.

"Penerbangan wisata jalur Bali menuju Pulau Oksigen ini jelas menjadi solusi persoalan waktu tempuh yang selama ini menjadi keluhan wisatawan ketika berkunjung ke objek wisata ke Pulau Gili yang," sambung Fauzi.

Memang, pesawat apung umumnya digunakan sebagai sarana transportasi ke daerah terpencil yang tidak memiliki bandara di daratan tapi memiliki wilayah perairan yang cocok sebagai landasan. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara

Capt. Novyanto Widadi menyatakan bahwa pesawat apung juga dapat digunakan untuk kepentingan search and rescue (SAR) dan patrol laut.

Tapi, kini semakin banyak juga pesawat apung yang digunakan untuk transportasi wisata di wilayah perairan luas. "Sebagai negara kepulauan, den-

gan wisata pantai yang sangat banyak, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan sarana transportasi pesawat apung. Harapannya setelah pandemi ini berlalu, adanya seaplane dan bandar udara perairan di Gili yang bisa meningkatkan kemajuan wisata di sana," ujarnya. •





MENDADAK SEPANGGUNG DI KILAU RAYA 30

Musik dangdut jelas identik dengan Indonesia. MNCTV menyiapkan panggung lintas generasi dan aneka variasi untuk memperingati ulang tahun ke-30 stasiunnya.

Selain menampilkan duet lintas generasi dengan pedangdut senior macam Mansyur S, Rhoma Irama dan Soneta group, panggung bertajuk

Malam Puncak Kilau Raya 30 tahun MCTV ini juga menampilkan pemusik dangdut dengan musisi beraliran pop.

Si Raja Dangdut Rhoma Irama, misalnya, sepanggung dengan band Ungu. Begitulah uniknya konser ultah ini.

Tak hanya itu, pedangdut Ayu Ting Ting juga akan tampil berbeda di acara tersebut. Pelantun Sambalado itu akan berduet dengan tokoh animasi buatan anak bangsa di konser tersebut. "Konsep aksi panggungnya berbeda. Belum bisa membayangkan, tapi aksi saya bakalan keren," ujar Ayu Ting Ting.

Perayaan ulang tahun ke-30 MNCTV memang dibuat cukup megah. Panggungnya didesain memakai teknologi canggih. Karenanya, Ayu Ting Ting bisa berduet dengan karakter animasi. Tentu saja, performa ini dipastikan bakal lebih berbeda dari biasanya.

Acara ini juga menampilkan Ratu Dangdut Elvy Sukaesih. Kelompok pemirsa seusianya tentu menantikan Elvy Sukaesih berduet dengan Si Raja Dangdut Rhoma Irama.

Raja dangdut Rhoma Irama mengatakan bahwa senang bisa tampil Kembali di malam puncak Kilau Raya MNCTV 30 dan berterima kasih kepada MNCTV untuk terus konsisten terhadap musik dangdut. "Saya senang MNCTV mau terus membawakan musik dangdut tanah air" ujar Rhoma Irama.

Selain aksi panggung dari para pedangdut lintas generasi, bakal ada acara mengenang kembali kolaborasi Epic Trio Cecepy. Selain itu, pemirsa juga diajak mengenang mendiang Julia Perez sebagai bintang yang paling bersinar.

Sederet artis dan musisi merayakan Malam Puncak Kilau Raya MNCTV, seperti Rhoma Irama dan





Soneta, Band Ungu, Ayu Ting Ting hingga Via Vallen dan Zaskia Gotik. Ikut bernyanyi pula Elvy Sukaesih, Caca Handika dan Mansyur S, Tasya Rosmala, Happy Asmara sampai Ndar-boy Genk, dan para penyanyi KDI.

Duet fenomenal juga sangat layak menjadi obat rindu. Kehadiran Ayu – Pasha, Masnyur – Zaskia, Via – Caca Handika, Rita Sugiarto – Wahid KDI semuanya bintang yang memiliki suara khas dan cengkok memukau akan tampil memanaskan panggung Kilau Raya.

Noersing, selaku Managing Director MNCTV, mengatakan, bakal menyuguhkan panggung canggih konsep augmented reality. Panggung tersebut juga berbalut kekayaan budaya Indonesia siap membawa pemirsa ke pesona Indonesia.

“Sejalan dengan temanya, pemirsa akan diajak masuk ke dalam pesona Indonesia melalui panggung canggih dengan konsep Augmented Reality berbalut kekayaan budaya Indonesia,” kata Noersing saat jumpa pers virtual HUT Ke-30 MNCTV, Rabu, 20 Oktober 2021.

Oktober, lanjutnya, merupakan bulan yang spesial bagi MNCTV. Pada 20 Oktober 2021, MNCTV genap 30 tahun mengudara di angkasa Indonesia. “Hari bahagia ini, MNC rayakan dengan menggelar Malam Puncak Kilau Raya MNC MNCTV 30,” kata Noersing.

Tahun ini, peringatan HUT MNCTV mengangkat konsep Indonesia Mempesona. Jadi, selama pertunjukan juga menghadirkan budaya-budaya

dari Indonesia. Acara ini nantinya dipandu oleh Wika Salim, Indra Herlambang, Anwar Sanjaya hingga Vega Darwanti.

Noersing mengakui, puncak acara itu adalah kolaborasi mega bintang dan lintas generasi antara Rhoma Irama bersama Ungu Band. Juga Ayu Ting-Ting, yang akan memberikan warna baru kolaborasi band pop dan penyanyi dangdut populer.

“Seperti kesuksesan dalam menyambut ulang tahun atau HUT MNCTV di tahun-tahun sebelumnya, tahun ini dalam malam puncak Kilau Raya 30 MNCTV akan menyajikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi pemirsa setia MNCTV di seluruh Indonesia,” tandas Noersing.

Selamat konser, dan selamat ulang tahun ke-30 juga MNCTV. Semoga banyak yang ikut berbahagia. ●





Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie

UU PAJAK BERJUDUL HARMONISASI

Mungkin banyak yang enggan mendalami Undang-Undang baru tentang Pajak. Namun, enggan atau tidak, ketentuan pajak baru ini memang ingin menjangkau lebih banyak warga untuk memenuhi kewajiban dan taat membayar pajak.

Mewakili Pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menyampaikan pandangan akhir pemerintah tentang ketentuan baru pajak itu di hadapan para wakil rakyat. Sebelumnya para wakil rakyat yang berhimpun dalam Rapat Paripurna DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar telah menyatakan setuju mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang bertajuk harmonisasi itu.

"Kepada seluruh anggota dewan, apakah RUU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Muhaimin. Terdengar serentak ucapan "setuju" para anggota DPR disusul ketukan palu tanda pengesahannya.

Sebelum pengambilan keputusan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP, menjelaskan, susunan UU HPP terdiri dari 9 bab dan 19 pasal. UU ini telah mengubah beberapa ketentuan di UU lainnya, di antaranya UU KUP, UU Pa-

jak Penghasilan, UU PPN, UU Cukai, UU 2/2020, dan UU 11/2020 Cipta Kerja.

Sebagaimana telah dikemukakan Dolfie dalam proses pembahasan, daya tembus UU baru soal pajak yang mengubah UU lainnya membuat namanya berubah menjadi harmonisasi atau penyelarasan. Dolfie memang banyak terlibat dalam pematangan UU HPP bersama pemerintah dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja).

Di depan Rapat Paripura Dolfie mengisahkan ulang, pembahasan

RUU tentang HPP didasarkan pada Surat Presiden serta Surat Keputusan Pimpinan DPR RI per 22 Juni 2021 yang memutuskan pembahasan RUU KUP dilakukan oleh Komisi XI DPR bersama pemerintah. "Dalam Raker Komisi XI, terdapat delapan fraksi menerima hasil kerja Panja dan menyetujui agar RUU HPP segera disampaikan kepada pimpinan DPR RI. Sedangkan satu fraksi menolak RUU," sebut Dolfie.

Fraksi yang menyetujui adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP. Sedangkan satu fraksi yang menolak adalah PKS.

Dalam paparan Dolfie, PKS menolak RUU HPP karena tidak sepakat rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Menurut dia, kenaikan tarif akan kontra produktif dengan proses pemulihan ekonomi nasional.

PKS juga menolak pengungkapan sukarela harta wajib pajak (WP) alias tax amnesty. Saat pelaksanaan tax amnesty pada 2016, PKS juga menolak program tersebut.

"Sedangkan Fraksi PDIP menyetujui karena RUU memperhatikan aspirasi pelaku UMKM dengan tetap berkomitmen bahwa bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat, jasa pendidikan, jasa kesehatan, transportasi darat, keuangan, dibebaskan dari pengenaan PPN," ucap Dolfie.

Kemudian Fraksi Gerindra menyatakan program pengungkapan sukarela WP (tax amnesty) akan memfasilitasi WP yang punya itikad baik untuk patuh. Harapannya program dapat meningkatkan kepatuhan sukarela pada peningkatan perpajakan.

"Fraksi PKB menyatakan mendukung penerapan pajak karbon sebagai salah satu instrumen mengurangi emisi karbon ke depan," ungkap Dolfie.

Ringkas cerita, sah sudah UU HPP. Tinggal menunggu tanda tangan Presiden untuk pemberlakuan dan penerapannya. Toh akan perlu peraturan lebih rinci untuk efektivitasnya, termasuk peraturan pemerintah, hingga petunjuk pelaksanaannya.

Itu tersirat dari pernyataan Menkumham Yasonna pasca pengesahan di momen Rapat Paripurna DPR Kamis, 7 Oktober 2021 itu. Dia bilang, penerapan tarif PPh Badan sebesar 22 persen,

penerapan tarif PPN sebesar 11 persen pada April 2022. Antara Oktober 2021 ke April 2022 sekitar enam bulan.

Nah, Menteri Yasonna menyebut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan bagian penting reformasi perpajakan. Reformasi dalam arti proses menata ulang. "Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mempercepat proses reformasi perpajakan untuk menata ulang sistem perpajakan Indonesia agar mampu mengadopsi praktik-praktik terbaik dan mengantisipasi dinamika sosial ekonomi di masa yang akan datang," ungkap Yasonna.

Ia mengemukakan, reformasi perpajakan dilakukan baik di dalam aspek administrasi maupun aspek kebijakan.

Oleh sebab itu, kata Yasonna, pemerintah sangat menghargai dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai kalangan masyarakat, serta dapat menerima berbagai usulan DPR dalam pembahasan yang sangat konstruktif di Panja RUU HPP. "Sehingga dapat tercapai keseimbangan antara kepentingan Pemerintah untuk melaksanakan reformasi perpajakan, dengan kepentingan untuk menjaga kondisi masyarakat dan dunia usaha, serta keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah," sambungnya.

Pemerintah berharap, kata Yasonna, melalui UU HPP ini, pajak benar-benar hadir untuk mendukung rakyat



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.

"UU HPP yang telah disepakati merupakan bagian penting dari reformasi perpajakan untuk membangun fondasi perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel, dalam jangka menengah/panjang, dengan beberapa tujuan," terangnya.

Pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; Kedua mengoptimalkan penerimaan negara; Ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum; Keempat, Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak; Terakhir, kelima, meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional. Juga meningkatkan keadilan di tengah masyarakat.

Harapan lain, pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada Semester I 2022 dapat meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan pada APBN 2022 serta mendukung penyehatan kembali APBN dengan defisit maksimal tiga persen pada 2023. "Kami meyakini dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang ini, maka kita telah bergerak maju menuntaskan salah satu agenda reformasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara," ujar Menkumham.

Fokusnya pada harmonisasi dan lima tujuan tadi. Semoga tak ada aral melintang lagi. ●



MELIHAT LAGI LATAR BELAKANG UU PAJAK BARU

Pendapatan pajak naik terus sebenarnya. Tapi, persentasenya terhadap produk domestik bruto menurun terus sejak 2013. Itulah latar belakang penting Undang-Undang Pajak yang baru mendapat pengesahan DPR.

Produk domestik bruto (PDB, nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu -biasanya

dihitung per tahun) di Indonesia naik terus. Tapi, pembayaran pajaknya tidak sepesat kenaikan PDB. Bagaimana bisa?

Banyak jawabannya. Pemerintah

menyebut antara lain keterbatasan pengaturan dalam perundang-undangan yang belum memberikan kepastian hukum, masih rendahnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak, be-



lum optimalnya penerimaan pajak, serta belum terciptanya keadilan dan kesetaraan.

Mengutip kajian akademisnya, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang semula berjudul RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah menjelaskan lima poin terkait keterbatasan administrasi perpajakan. Pertama, keterbatasan pengaturan untuk menjangkau perencanaan pajak yang bersifat agresif (*aggressive tax planning*) karena ketentuan perpajakan lama, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang PPh) hanya mengatur mengenai Aturan Khusus Anti Penghindaran Pajak (Specific Anti Avoidance Rule-SAAR), sementara tidak seluruh model penghindaran pajak dapat dijangkau dengan SAAR.

Kedua, belum adanya pengaturan penagihan antaryurisdiksi dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP) sehingga bantuan penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra belum dapat dilakukan. Setiap tindakan penagihan yang dilakukan oleh otoritas pajak atas aset penanggung pajaknya yang terdapat di negara lain akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap wilayah negara lain tersebut.

Ketiga, belum adanya pengaturan mengenai pengenaan sanksi atas diterbitkannya putusan Peninjauan Kembali yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat dikenai sanksi Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP, serta atas Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Keempat, Keterbatasan pengaturan mengenai penerapan asas *ultimum remedium* dalam Pasal 44B Undang-Undang KUP yang mengakibatkan pemulihan kerugian pada pendapatan negara menjadi tidak optimal, karena pembayaran kerugian pada pendapatan negara dan/atau sanksi pada saat perkara telah dilimpahkan ke pengadilan atau pada saat persidangan, tidak membatalkan tuntutan jaksa. Kondisi ini menyebabkan asas *ultimum remedium* tidak berlaku bagi terdakwa.

Terakhir, kelima, Kurangnya fleksibilitas penambahan atau pengurangan objek cukai berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Undang-Undang Cukai) bahwa untuk menetapkan suatu barang menjadi Barang Kena Cukai, perlu mendapatkan persetujuan alat kelengkapan DPR RI yang membidangi keuangan.

Sedangkan mengenai rendahnya kepatuhan wajib pajak, terlihat dari masih banyak Wajib Pajak yang belum atau sudah memanfaatkan program Pengampunan Pajak, tetapi belum mengungkapkan hartanya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan data Pertukaran Informasi Otomatis (Automatic Exchange of Information-AEol) yang diterima oleh DJP terdapat selisih data keuangan berupa data kas dan setara kas antara data AEol dengan data SPT Tahunan 2018.

Mengenai belum optimalnya penerimaan pajak, pemerintah beralasan karena masih terbatasnya basis pajak. Indikatornya, pertama, belum adanya pengaturan mengenai pemajakan atas korporasi yang melaporkan kompensasi kerugian dalam Surat Pemberitahuan dan tidak membayar pajak selama bertahun-tahun, tetapi masih dapat menjalankan kegiatan usaha.

Kedua, pengaturan mengenai barang dan jasa yang tidak dikenai PPN berdasarkan Pasal 4A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Undang-Undang PPN) serta pemberian fasilitas PPN berdasarkan Pasal 16B Undang-Undang PPN mengakibatkan rendahnya rasio Efisiensi-C (*C-Efficiency*) PPN Indonesia dibandingkan dengan negara lain.

Ketiga, pengaturan mengenai tarif tunggal PPN sebesar 10 persen berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang PPN tidak dapat memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat. Penurunan tarif PPh Badan berdasarkan Undang-Undang PPh telah mengakibatkan turunnya penerimaan pajak, yang seharusnya diimbangi dengan peningkatan sumber penerimaan pajak lainnya, seperti PPN.

Keempat, keterbatasan pengaturan yang belum menjangkau perubahan pola bisnis khususnya transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pengaturan mengenai pemungut pajak dalam administrasi perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya menjaring perkembangan model transaksi bisnis terkini khususnya transaksi bisnis yang dilakukan melalui pihak lain sebagai perantara (*intermediary*).

• INFO KHUSUS

Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak menjadi tidak efisien dan potensi penerimaan pajak menjadi berkurang.

Kelima, belum adanya kebijakan fiskal untuk mengatur isu terkait pengendalian emisi. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, komitmen pengendalian emisi gas rumah kaca diperkuat dengan memasukkan penanganan perubahan iklim sebagai bagian dari Priori-

kesetaraan dalam pemajakan, pemerintah mengajukan beberapa alasan. Pertama, keterbatasan pengaturan mengenai natura dan/atau kenikmatan (fringe benefit) dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang PPh yang mempengaruhi perilaku Wajib Pajak karena terdapat perbedaan tarif antara Wajib Pajak badan dan orang pribadi. Imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan menjadi lebih mengun-



Panja DPR.

Tabel 1. 1. Rasio Pajak (Tax Ratio) Indonesia

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
(triliun rupiah)								
Penerimaan Perpajakan:								
- DJP	298,5	358,2	425,4	571,1	544,6	628,0	742,8	835,9
- DJBC	48,5	51,0	65,6	87,6	75,3	95,1	131,1	144,6
	347,0	409,2	491,0	658,7	619,9	723,1	873,9	980,5
PNBP	107,0	164,9	130,7	221,1	136,2	165,3	209,9	221,7
PDB Nominal	2.774,3	3.339,2	3.950,9	4.948,7	5.603,9	6.422,9	7.427,1	8.237,6
Tax Ratio*	16,36%	17,19%	15,74%	17,78%	13,49%	13,83%	14,59%	14,59%

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(triliun rupiah)							
Penerimaan Perpajakan:							
- DJP	921,4	985,1	1.060,9	1.106,0	1.151,0	1.313,3	1.332,7
- DJBC	155,9	161,8	179,5	179,0	192,5	205,5	213,4
	1.077,3	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.343,5	1.518,8	1.546,1
PNBP	222,2	236,2	95,9	59,9	105,6	173,1	147,4
PDB Nominal	9.084,0	10.542,7	11.540,8	12.406,8	13.588,8	14.837,4	15.833,9
Tax Ratio*	14,31%	13,12%	11,58%	10,84%	10,66%	11,40%	10,70%

Sumber: DJP, data diolah

Catatan:

- 1) Penerimaan DJP: PPh, PPN, PBB, & Pajak Lainnya
- 2) Penerimaan DJBC: Bea Masuk, Bea keluar, & Cukai
- 3) PNBP: Penerimaan SDA Migas & Pertambangan Umum
- 4) **Tax Ratio** Definisi Luas: (Penerimaan Perpajakan+SDA Migas & PertambanganUmum)/PDB

tas Nasional ke-6. RPJMN 2019-2024 menempatkan target emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen dari kegiatan bisnis normal pada tahun 2024.

Selanjutnya, mengenai keadilan dan

tungan bagi Wajib Pajak daripada dalam bentuk tunai. Undang-Undang PPh pada prinsipnya menggeser titik pemajakan atas natura dan/atau kenikmatan, dari pegawai selaku pen-

erima penghasilan kepada pemberi kerja.

Kedua, pengaturan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif PPh dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh mengakibatkan struktur penerimaan PPh orang pribadi masih sangat kecil. Ketiga, pengaturan mengenai insentif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang PPh dinilai kurang tepat sasaran karena telah terdapat pengaturan mengenai insentif bagi Wajib Pajak dengan omzet tertentu. Selain itu, terhadap Wajib Pajak juga telah diberikan penurunan tarif PPh badan mulai tahun 2022.

Keempat, belum adanya pengaturan yang mengakomodasi hasil Mutual Agreement Procedure (MAP) dalam putusan pengadilan pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak kehilangan hak untuk mendapatkan kompensasi atau pengurangan (relief) atas pemajakan berganda karena masalah administrasi, antara lain di dalam satu SKP terdapat beberapa sengketa dan masing-masing sengketa diajukan upaya hukum yang berbeda.

Alhasil, berbagai kekurangan itu tercermin dalam penerimaan pajak yang persentasenya terhadap PDB merosot terus sepanjang periode 2013-2019. Dengan kata lain, tax ratio Indonesia terus merosot. Pada 2020, pandemi Covid-19 yang dampak negatifnya terhadap ekonomi sudah jelas, menam-

bah suram proyeksi penerimaan pajak. Tax ratio Indonesia dalam lima tahun terakhir hingga 2019 berada pada kisaran rata-rata 11 persen. United Nations, International Monetary Fund (IMF), World Bank dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2015 sepakat bahwa untuk tercapainya tujuan pembangunan berkesinambungan (SDGs/ Sustainable Development Goals) sampai dengan 2030, kebutuhan mobilisasi sumber daya domestik tersebut tercermin dalam penerimaan negara yang secara spesifik dalam indikator tax ratio setidaknya 15 persen untuk memenuhi kebutuhan atau fasilitas dasar infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Terlebih dalam masa pandemi Co-

vid-19 yang menekan ekonomi dan keuangan negara dalam beberapa tahun ke depan, maka peningkatan tax ratio menjadi 15 persen tersebut juga penting untuk menjaga defisit anggaran pada batas wajar sehingga rasio utang terhadap PDB juga dapat terkendali dan tidak memberatkan generasi mendatang.

Pengeluaran pemerintah yang terus meningkat menyebabkan defisit anggaran menjadi semakin melebar, sehingga ruang fiskal semakin menyempit. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebija-

menengah-panjang untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal. Ringkas cerita, itulah beberapa latar belakang penting tentang hadirnya UU HPP.

Toh, tetap ada yang kritis melihat alasan pemerintah menyusun UU HPP ini. Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Perpajakan Universitas Indonesia Haula Rosdiana, misalnya, berpendapat, jika ada keterbatasan kapasitas administrasi, jawaban dalam rancangan tersebut seharusnya memperkuat kapasitas administrasi.

"Pemerintah selalu bilang harus tepat isu, tepat sasaran, dan tepat waktu. Maka lakukanlah itu," katanya pada rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja RUU KUP Dewan Perwakilan

sama terulang.

Dia juga mempertanyakan apakah tidak ada solusi lain dari pemerintah sehingga harus memakai pola yang hampir sama dengan tax amnesty. Di sisi lain, pemerintah selalu membanggakan tax amnesty berhasil dan yakin dunia akan belajar dari Indonesia mengenai itu. Akan tetapi naskah akademik RUU KUP menyebutkan kepatuhan wajib pajak rendah.

"Maka narasi yang ditulis dalam naskah akademik itu menjadi pertanyaan besar. Kok ada sesuatu yang inkonsisten antara apa yang diungkapkan pemerintah dengan apa yang ada di naskah akademik?" ungkapnya.

Itu masih dalam kajian akademis.



Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Perpajakan Universitas Indonesia Haula Rosdiana.

kan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2023 kembali menjadi paling tinggi sebesar tiga persen.

Sebagai solusinya, pemerintah menyebut perlu serangkaian kebijakan pemerintah berupa kebijakan perpajakan dalam rangka konsolidasi fiskal untuk keberlanjutan fiskal jangka

Rakyat, Rabu, 14 Juli 2021.

Haula menjelaskan bahwa dalam latar belakang itu juga disebutkan RUU KUP dibuat akibat selama ini tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Pemerintah dalam RUU KUP mengusulkan pola yang serupa dengan program pengampunan pajak (tax amnesty) tapi menggunakan istilah berbeda. Namanya adalah kepatuhan sukarela.

Namun, sambungnya, sistem yang sama dengan tax amnesty itu jadi pertanyaan karena yang sebelumnya apakah bisa dikatakan berhasil. Haula meminta jangan sampai kesalahan yang

Namun, kritik semacam itu memang seharusnya menjadi pertimbangan.

Khusus pengungkapan sukarela yang identik dengan tax amnesty jilid ketiga, baru akan terlihat hasilnya pada pertengahan 2022. UU HPP mengatur bahwa programnya direncanakan berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022.

Toh soal pengungkapan sukarela itu hanya satu bagian dari UU HPP. Masih banyak hal lain lagi yang tercakup dalam ketentuan pajak baru yang cakupan dan dampaknya lebih luas dan langsung terasa dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. •



SOAL NIK JADI NPWP DAN KENAIKAN PPN

Yang jelas paling luas cakupannya dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ringkasnya UU Pajak 2021, adalah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan yang berpotensi meluas tentu saja penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) pribadi atau perorangan.

Soal NIK menjadi NPWP ini diatur dalam Pasal 2 yang berarti di awal Undang-Undang. Pasal 2 ayat 1a UU Pajak 2021 berbunyi: "Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan."

Sedangkan ayat (1) yang diterangkan oleh ayat (1a) berbunyi: "Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak."

Pasal yang mengatur NPWP menggunakan NIK ini masih belum jelas atau sumir. Misalnya, apakah setiap yang memiliki NIK otomatis menjadi wajib pajak -karena memungkinkan melalui koordinasi data antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Tanpa harus mendaftar sebagai wajib pajak pun, NIK sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai NPWP.

Pada satu sisi, berbeda dengan sebelumnya, Wajib Pajak Orang Pribadi harus mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP. "Dengan ketentuan baru ini, maka Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP karena NIK tersebut berfungsi sebagai NPWP," demikian informasi resmi dari Kementerian Keuangan.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (kanan) Airlangga Hartarto.

Toh Kemenkeu menginformasikan bahwa pemberlakuan kebijakan baru ini tidak otomatis menyebabkan pemilik NIK akan dikenai pajak. Pasalnya untuk pengenaan pajak, pemilik NIK harus telah memenuhi syarat subjektif (termasuk sebagai subjek pajak) dan objektif (mendapatkan penghasilan setahun di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Nah, kebijakan yang memberlakukan NIK menjadi NPWP pada dasarnya diarahkan untuk memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. "Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan serta memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional."

Namun memang tak cukup dengan penjelasan beberapa baris seperti demikian. Perlu aturan lebih rinci yang tidak menimbulkan multitafsir.

Toh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tak ingin polemik ini terus menggelinginding liar. Ia menyatakan, banyak warga masyarakat yang salah paham dan

berasumsi dengan rencana NIK jadi NPWP ini.

Menteri Ani juga mengemukakan, tujuan dari penambahan fungsi NIK menjadi pengganti NPWP ini agar pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi bisa lebih terpantau secara administratif. "UU PPh itu untuk wajib pajak orang pribadi, dan sering dipelintir bahwa setiap punya NIK langsung bayar pajak. Saya ingin tegaskan dengan UU HPP," ujarnya.

Menkeu pun membuktikan dengan memberi contoh jika dalam UU HPP menyebutkan jika setiap orang pribadi berpenghasilan Rp 4,5 juta per bulan, atau 54 juta orang pribadi belum menikah alias single per tahun, dipastikan tidak kena pungutan pajak atau disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

"Jadi kalau masyarakat memiliki NIK jadi NPWP dan memiliki pendapatan Rp 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun, dia PPh 0 persen," ungksp Bu Menkeu.

"Ini untuk meluruskan, seolah-olah ada mahasiswa yang baru lulus, belum bekerja suruh bayar pajak, itu tidak benar," tambahnya.

Dia juga memastikan kategori kelompok masyarakat yang tergolong PTKP tidak diubah, yakni tetap Rp 54 juta per tahun, plus Rp 4,5 juta untuk pasangan dengan tanggungan tiga orang anak. "Tambahan sebesar Rp 4,5 juta diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan masih ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal tiga orang," ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menguatkan pernyataan Sri Mulyani. Dia meluruskan kesalahan persepsi di mana NIK sebagai pengganti NPWP bukan berarti masyarakat usia 17 tahun ke atas yang memiliki KTP sudah harus membayar pajak.

"Penggunaan NIK tidak berarti semua WNI wajib membayar PPh, tapi tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak, yaitu apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak), atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp500 juta setahun," jelasnya.

Sedangkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

• INFO KHUSUS

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor mengatakan, screening (penapisan) terhadap orang yang wajib membayar pajak dilakukan berdasarkan aspek tertentu. "Pemerintah akan melakukan screening kepada pemilik NIK berdasarkan aspek dipenuhi atau tidaknya syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak.

Untuk pengenaan pajak, pemilik NIK

pekerja lepas yang sudah memenuhi syarat subjektif sebagai Wajib Pajak tetapi syarat objektifnya belum terpenuhi, tidak dikenai pajak. Misalnya, karena penghasilan di bawah PTKP.

"Adapun ketentuan lebih lanjut terkait integrasi NIK sebagai NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan," ujar Neilmaldrin.



harus telah memenuhi syarat subjektif (pemilik NIK sudah berumur 18 tahun) dan objektif (pemilik NIK mendapatkan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak)," sambungnya.

Neilmaldrin menjelaskan, pembayaran pajak wajib jika penghasilan setahun di atas batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), atau peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final 0,5 persen (PP-23/2018).

Oleh sebab itu, untuk mereka yang belum memiliki penghasilan ataupun

la pun mengatakan, pemberlakuan NIK menjadi NPWP pada dasarnya akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi untuk memperoleh NPWP.

Dalam UU Pajak 2021, penghasilan yang dikenai pajak yakni minimal Rp 60 juta per tahun. Untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Rp 60 juta per tahun akan dikenakan pajak

penghasilan (PPh) dengan besaran 5 persen.

Berikut rincian lengkap lapisan kelompok yang dikenai PPh dan besaran pajaknya:

Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta per tahun dikenai tarif PPh sebesar 5 persen.

Penghasilan di atas Rp 60 juta sampai Rp 250 juta per tahun dikenai tarif PPh sebesar 15 persen.

Penghasilan di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta per tahun dikenai tarif PPh sebesar 25 persen.

Penghasilan di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar per tahun dikenai tarif PPh sebesar 30 persen.

Penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dikenai tarif PPh sebesar 35 persen.

Lepas dari kontroversi NIK sebagai NPWP, UU Pajak 2021 mengatur kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang semula 10 persen menjadi 11 dan kemudian naik lagi menjadi 12 persen. Jadi, bagi siapapun yang membeli produk atau berbelanja jasa dengan membayar PPN, biaya jelas meningkat.

Menteri Keuangan mengemukakan, tarif PPN naik menjadi 11 persen sesuai Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlaku April 2022. "Bertahap dari 10 persen saat ini di UU PPN akan naik jadi 11 persen pada April 2022 dan paling lambat 1 Januari 2025 akan naik lagi satu persen ke 12 persen," ujarnya.

Namun, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN, terutama untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, dan beberapa lainnya. "Masyarakat berpenghasilan menengah, kecil, tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini soal sembako, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial, DPR dan pemerintah sepakat mereka tidak dikenakan PPN," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, pengurangan atau pengecualian fasilitas PPN ini diberikan untuk mencerminkan keadilan terhadap masyarakat. "Sebab, kalau kita bicara sembako, tidak hanya satu sembako, ada yang menengah atas, san-

gat mahal, ada kebutuhan sembako masyarakat, sehingga kita harus bedakan. Ini disebut asas keadilan,” ujarnya.

Namun dari kalangan pengusaha, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) misalnya, menolak dengan tegas kenaikan PPN karena akan membuat daya beli masyarakat semakin anjlok. Sehingga bukannya membuat perekonomian semakin membaik tapi justru semakin terpuruk.

Sedangkan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi Siswaja Lukman men-

Hal senada disampaikan beberapa ekonom. “Bagaimana cara menggenjot pajak, ini kan bisa dari cukai, PNPB dan pengurangan belanja dan ada beberapa kemungkinan lainnya,” ujar Ekonom Bank Permata Josua Pardede.

Sedangkan peneliti Center of Industry Trade, and Investment Indef, Ahmad Heri Firdaus menyatakan, uji hipotesis terhadap dampak kenaikan tarif PPN terhadap ekonomi makro, menyimpulkan kenaikan PPN akan membuat ekonomi tidak stabil. “Per-

la pun mewanti-wanti agar pemerintah memastikan kenaikan PPN tidak menghambat dengan pemulihan ekonomi yang terdampak Covid-19. Sebaliknya pemerintah menegaskan kenaikan PPN tidak akan tabrakan dengan upaya pemulihan ekonomi.

“Kenaikan tarif PPN ini tidak bertentangan dengan proses pemulihan ekonomi, karena sejumlah PPN untuk kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap dikecualikan,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Acara Interna-



Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

gatakan dampak kenaikan PPN akan mengerek harga produk makanan dan minuman (olahan).

Selain kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen pada tahun depan, harga jual produk akan mengalami kenaikan karena adanya peningkatan biaya produksi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan baku selama pandemi. “Ketika tahun depan ada penyesuaian PPN, ditambah biaya produksi yang meningkat, saya perkiraan juga akan ada kenaikan harga, karena pada 2020 sampai saat ini pelaku usaha masih menahan untuk tidak menaikkan harga produk,” kata Adhi.

mintaan barang dan jasa akan turun, dan akan berdampak ke sektor usaha dan utilisasi, serta penjualan akan turun,” ungkap Ahmad Heri.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai UU HPP tak terlepas dari upaya pemerintah mencari pendanaan baru guna mengurangi defisit APBN 2022 dan 2023 yang harus kembali ke level tiga persen. Menurut dia, dampaknya pun beragam terhadap berbagai lapisan masyarakat, dan yang paling terasa adalah harga barang yang terkerek naik akibat kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 mendatang.

tional Tax Conference 2021, Selasa, 12 Oktober 2021.

Nazara menyebut kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara lewat pengumpulan dari pajak digital. Implementasi penarikan PPN pun melalui cara-cara yang baik. “Kami akan memastikan bahwa masyarakat miskin tidak akan membayar PPN untuk konsumsi item tersebut,” kata Wamenkeu.

Akhirnya, kita semua harus menunggu, paling tidak dua hal. Pertama, aturan lebih rinci sebagai turunan dari UU Pajak 2021. Kedua, ya hasil penerapan UU Pajak 2021 ini di tengah masyarakat. •

PINAKBET

Gunawan Effendi

Pinakbet itu salah satu masakan populer di Filipina, tetangga Indonesia. Sama seperti gado-gado atau cap cay di negeri kita. Kesamaannya terutama dalam hal jumlah bahan-bahannya yang beragam.

Membuat produk kuliner populer itu pun relatif mudah dan cepat. Bahkan bagi yang kurang berpengalaman atau enggan memasak.

Boleh jadi karena itulah ketiganya menjadi masakan populer karena mudah memasaknya (dan cepat saji pula). Yang lebih penting, rasanya sesuai dengan selera berbagai lapisan masyarakat tempat masakan itu berasal.

Juga terjangkau harganya dibandingkan dengan masakan yang didominasi protein hewani. Ya, pinakbet, gado-gado, maupun cap cay banyak menggunakan bahan yang tergolong sayur mayur dengan campuran protein dari ikan, daging, juga kacang-kacangan.

Namun, ada juga perbedaan antara pinakbet, gado-gado, dan cap cay. Yang dominan dalam pinakbet adalah kacang-kacangan yang merupakan sumber protein nabati sebagai bahan utama plus jenis labu-labuan. Sedangkan gado-gado menggunakan sayur-mayur dengan kacang tanah sebagai bumbu utama. Cap cay dominan sayur-mayur dengan sedikit kacang-kacangan; katakanlah kapri, kacang polong.

Nah, kacang-kacangan dalam pinakbet antara lain, kecipir –yang bersayap (winged bean), kacang panjang, kacang polong, dan buncis. Jenis labu-labuan masuk juga seperti oyong bahkan pare yang pahit. Labu kuning masuk juga dalam bahan pinakbet. Malah ubi jalar atau ubi manis juga, plus cabai hijau.

Sepintas tampak bahwa bahan-bahan pinakbet berasal dari tumbuhan atau tanaman yang mudah berkembang di lahan tropis. Juga sesuai dengan kultur persawahan yang berseling dengan tanaman palawija. Malah banyak tanaman bahan pinakbet itu juga mudah tumbuh di pekarangan.

Kombinasi kacang-kacangan, labu-labuan, juga ubi manis, menghasilkan rasa yang komplet menurut ukuran kuliner: Campuran antara asin, pahit, pedas, manis, asam, dan gurih. Lengkap sudah sebagai syarat sebagai masakan yang lezat.

Campuran rasa itu mungkin cocok juga untuk menggambarkan reaksi warga dan masyarakat Filipina ketika Maria Ressa, salah seorang wartawati senior di sana, mendapat hadiah Nobel Perdamaian tahun ini bersama wartawan Rusia Dmitry Muratov. Panitia Nobel, Akademi Ilmu

Pengetahuan Kerajaan Swedia, Akademi Swedia, Institut Karolinska, dan Komite Nobel Norwegia, menyebutkan Ressa dan Muratov mendapatkan penghargaan itu karena “upaya mereka menjaga kebebasan berekspresi, yang merupakan prasyarat bagi demokrasi dan perdamaian abadi.”

Baru tiga hari setelah pengumuman penghargaan itu Istana Malacanang, Kantor Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberi selamat kepada Maria Ressa karena memenangi Hadiah Nobel Perdamaian. “Binabati natin si Maria Ressa bilang kaunaunahang Pilipino na nagwagi sa Nobel Peace Prize (Kami mengucapkan selamat kepada Maria Ressa karena menjadi orang Filipina pertama yang memenangi Hadiah Nobel Perdamaian),” kata Harry

Roque, Juru Bicara Presiden Duterte, Senin, 11 Oktober 2021.

Sebagai perbandingan, Pemerintah Tiongkok menyebut Panitia Nobel sebagai badut atau pelawak menanggapi penghargaan Nobel Perdamaian 2010 untuk Liu Xiaobo, akademisi yang kritis terhadap pemerintah Tiongkok. Sedangkan Maria Ressa juga dikenal sangat kritis terhadap Presiden Duterte dan pemerintahannya.

Begitulah dinamika global pada umumnya. Campur aduk pahit, pedas, manis, asin, asam dan gurih. Seperti rasa pinakbet dan cap cay. Indonesia memilih gado-gado untuk mewakilinya. ●





www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

Network

**INFO
PASANG
IKLAN**
KIKI IBRAHIM
+62 818 931 562



Lautan
informasi
di dunia maya
melalui jaringan
internet
memberikan
banyak
referensi
iNFO
kepada
masyarakat

JALAN MPR III NO. 5B
KELURAHAN CILANDAK
BARAT, KECAMATAN
CILANDAK, JAKARTA
SELATAN (12430)
TELP 021-27812397



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #13 OKTOBER 2021



Rp75.000,-



3 TAHUN HD-MY MELANGKAH MAJU UNTUK SEMUA